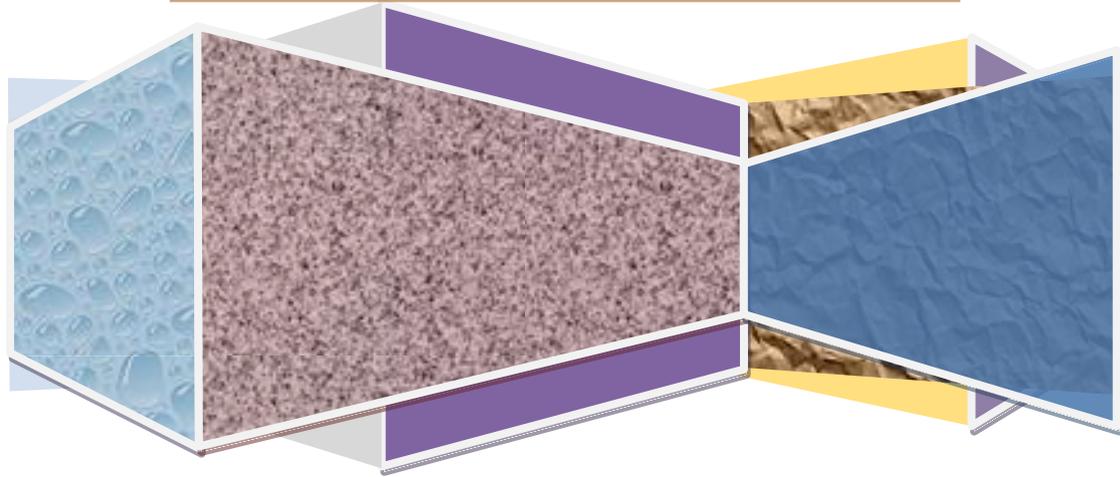


**PRAGMATISME POLITIK DALAM
PUSARAN DEMOKRATISASI
INDONESIA**

Momon Sudarma



**PRAGMATISME POLITIK DALAM PUSARAN
DEMOKRATISASI DI INDONESIA**

BERPOLITIK DI TENGAH PRAGMATISME

Sikap kritis terhadap BLT berpeluang besar dianggap sebagai bentuk perampokan terhadap hak rakyat, khususnya bila dilihat dari sudut penerima atau rakyat kecil itu sendiri. Hal ini terkait dengan tingginya sikap pragmatis rakyat kita. Kendati istilah perampokan itu tidak harus dimaknai negatif, namun demi pragmatismenya perilaku diri, persepsi ini sering muncul di tengah masyarakat. Larangan merokok dianggap sebagai melanggar hak individu, larangan menjual minuman haram di bulan ramadhan dianggap melanggar hak asasi ekonomi, dan larangan prostitusi (pornografi) dianggap melanggar hak asasi. Sejumlah larangan tersebut, dianggap oleh para pelakunya sebagai tindakan merampok hak asasi.

Di luar pro kontra terhadap masalah itu, dalam konteks ini kita menemukan ada satu fenomena yang patut dibincangkan. Fenomena yang saya maksudkan itu adalah sikap pragmatismenya masyarakat, baik yang terkait dengan praktek politik saat ini maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Merujuk pada kasus di atas, kita melihat ada bahasa-bahasa yang mengarah pada kampanye bahasa elitis dan kelompok lain menggunakan bahasa praktis (kendati tidak satu arti, namun kita maknai pula sebagai bahasa pragmatis). Partai-partai yang berbasis Islam, misalnya, lebih banyak menyuarkan isu-isu elitis. Isu syari'ah, amal shaleh, ibadah, dan sejenisnya. Bahasa seperti ini pada dasarnya masih merupakan anggota dari bahasa elitis dalam politik kelompoknya sendiri. Bahasa elitis mereka tidak

mendapat perhatian dari publik Indonesia pada umumnya. Tidak aneh, dan bukan hal yang mustahil, bila kegagalan partai Islam selama ini lebih disebabkan karena mereka lebih menyuarakan bahasa elitis dihadapan publik Indonesia, dibandingkan dengan mengartikulasikannya dalam bahasa praktis.

Kita masih melihat, bahwa eliti politik dan partai politik yang ada saat ini, masih miskin kemampuan merumuskan atau mengartikulasikan isu kampanye dalam bahasa praktis. Padahal, bila dilihat kondisi masyarakat saat ini, trend masyarakat kita sangat praktis (*pragmatis*). Ada beberapa indikasi yang menunjukkan dugaan ini.

Dalam bidang pendidikan, masyarakat kita cenderung tidak memperhatikan kualitas. Pemalsuan ijazah, ujian saringan masuk sekolah cenderung ke jalur khusus, dan pelaksanaan UN yang bersifat formalistik.. Kasus-kasus ini tidak lain adalah bagian kecil dari pragmatisme pendidikan. Oleh karena itu, kampanye tentang peningkatan kualitas SDM, meningkatkan mutu lulusan pendidikan, dan pembaharuan manajemen pendidikan, akan memiliki magnet yang lebih rendah dibandingkan dengan "pendidikan gratis (baca : meningkatkan mutu lulusan), membuka lapangan kerja (baca : lulusan berkualitas).

Di sektor ekonomi, pragmatisme masyarakat Indonesia lebih jelas lagi. Orang tidak akan memperdulikan halal haram, aman-celaka, sehat-sakit hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tidak aneh, bila kemudian di negeri ini marak perdagangan bawah tanah (*ekonomi underground*), seperti narkoba, *trafficking*, illegal logging, *illegal wedding*, perdagangan obat palsu, makanan mengandung zat berbahaya dan lain sebagainya. Orang ini adalah pelaku usaha yang pragmatis.

Di sisi lain, hasrat ekonomi masyarakat pada umumnya pun sangat sederhana. Lapangan kerja dan mendapatkan uang. Itu saja. Keinginan rakyat Indonesia tidak muluk-muluk.. Tidak aneh pula, tanpa memperdulikan partai apa atau siapapun tokohnya, sepanjang dirinya mendapatkan upah secara ekonomi maka kampanye politik pun akan mereka ikuti. Tingginya potensi money politic, adalah contoh lain dari situasi pragmatismenya masyarakat Indonesia.

Kaitan dengan masalah ini, rakyat Indonesia tidak akan tertarik mendengarkan kampanye tentang restrukturisasi perbankan, atau privatisasi dan masalah fiskal. Selain tidak mengerti terhadap istilah-istilah tersebut, mereka pun cenderung apatis untuk dapat merasakan dampak dari isu-isu yang dilontarkan tersebut. Oleh karena itu, kampanye tentang privatisasi atau nasionalisasi BUMN, kurang menarik dibandingkan dengan BLT itu sendiri.

Pragmatisme masyarakat kita ini masih banyak yang bisa dituliskan, baik dari sisi sosial-budaya kesehatan, ataupun agama. Tanpa harus menyebutkan satu persatu, hal penting yang ingin di sampaikan di sini, yaitu adanya kekhawatiran nyata mengenai perilaku elit politik kita saat ini.

Pertama, ketika elit politik tidak mampu mengartikulasikan ide normatif (umum, global, alitis) ke dalam ide (isu) praktis (pragmatis), khawatir akan menjadi indikasi bahwa elit politik kita memang tidak memiliki solusi praktis terhadap masalah bangsa. Dalam ajaran Islam, *nahyi munkar* (mengkritik, mengoreksi, oposan) itu penting, namun lebih penting lagi yaitu *amar ma'ruf*, yakni mengajak pada hal yang lebih baik atau solutif, alternatif dan berorientasi pemecahan masalah.

Kita tidak hanya butuh orang yang cerdas mengkritik. Bangsa ini pun membutuhkan orang yang mampu amar ma'ruf, yakni dengan ide alternatifnya dalam memecahkan masalah bangsa menuju tatanan yang lebih baik. Dan ide alternatif itu, harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan praktis bangsa dan negara ini.

Kedua, ketidakberdayaan elit dalam menyampaikan ide praktis (pragmatis) adalah bentuk lain ketidakmampuan elit dalam membaca aspirasi publik. Karena sesungguhnya, antara aspirasi publik itu adalah nyata, dan pemecahan masalahnya pun harus nyata. Rumusan ide yang nyata, hanya bisa ditunjukkan dengan kemampuan dirinya menyampaikan ide praktis dalam memecahkan masalah bangsa.

Dalam konteks ini, seorang elit tidak hanya berfungsi sebagai *advisor* (penasehat) bagi masyarakat, tetapi harus mampu menjadi bagian dari pemecah masalah (*problem solver*). Kemampuan sebagai pemecah masalah, hanya bisa ditunjukkan dengan cara mengeluarkan ide-ide strategis dan operasional (*executable*) di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga, kemampuan mengeluarkan ide strategis bukanlah kemampuan instan. Kemampuan ini muncul dan berkembang seiring dengan kematangan berfikir manusia. Oleh karena itu, elit politik yang instan, akan mengalami kesulitan dalam membaca aspirasi, merumuskan aspirasi dan mengkomunikasikan aspirasi. Hal yang paling mudah untuk mengatasi masalah ini, maka mereka akan mengeluarkan ide-ide normatif. Elit politik yang instan, akan merasa reformis bila mampu mengatakan bahwa dirinya adalah anti KKN, atau anti ordebaru. Ide itu 'genit' dan

'seksi' namun tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan orang yang mengatakannya.

Oleh karena itu, simpul dari hal ketiga ini, kita akan sangat memaklumi bila banyak elit politik yang manggung saat ini, banyak yang bergulat dalam ide-ide normatif atau ide umum. Atau malah bersembunyi dibalik ide orang besar di pucuk pimpinannya. Strategi ini mereka lakukan, karena rekam-jejak (*track record*)-nya dalam aspek pelayanan publik sangat minim.

Bila kondisi ini dibiarkan, bukan hal yang mustahil jika dikemudian hari banyak elit politik yang kurang mampu menunjukkan kemampuannya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Prediksi yang paling kuat, adalah mereka akan 'tenggelam' oleh rekayasa pimpinan partai atau elit politik tertentu.

Terakhir, kebiasaan menyampaikan ide normatif dalam kampanye terbuka adalah bagian penting dari ketidakmampuan elit dalam membaca lingkungan. Berkampanye dengan istilah elitis hanya akan menjauhkan hati rakyat dari publik itu sendiri. Ingat kemenangan SBY di tahun 2004 cenderung dipengaruhi oleh faktor emosional publik, kemenangan Megawati menggantikan Gus Dur pun adalah bagian dari perlawanan politik praktisnya rakyat Indonesia terhadap ide normatif (Islam) waktu itu. Kekalahan BJ Habibie tahun 1999, adalah contoh lain dari masalah praktis dan emosional elit Indonesia.

Kendati demikian, rakyat Indonesia saat ini terpaksa harus memberikan keputusan politiknya. Apapun dan bagaimanapun kualitas calegnya, 9 April mendatang harus menunjukkan sikap politiknya. Hal yang perlu kita sadari bersama, pilihan kita adalah masa depan kita semua.

Bangkit : Dari, Dengan dan Untuk

Berbagai persoalan bangsa, masih banyak yang terasa. Mulai dari masalah ekonomi, politik, social, pendidikan dan masalah hokum serta keamanan. Malahan, musibah yang disebabkan karena adanya bencana alam, seperti tsunami, gunung meletus, gempa dan banjir pun terus menjadi bahan berita dan penderitaan bagi sebagian masyarakat kita. Ini adalah sebuah realitas kehidupan bangsa kita saat ini. Realitas ini, perlu dihadapi.

Dalam teori geografi-budaya, perubahan lingkungan potensial memberi pengaruh nyata terhadap perilaku manusia. Apapun yang terjadi, apapun yang ada di lingkungan, atau apapun yang dihadapi oleh masyarakat sejatinya memberikan informasi tambahan bagi individu untuk melakukan sebuah tindakan. Karena ada rangsangan dari lingkungan itulah, kemudian seseorang melakukan sebuah tindakan.

Tindakan yang dilakukannya itu sendiri, merupakan reaksi terhadap lingkungan yang ada. Artinya, ketika ada rasa keprihatian terhadap kondisi lingkungan, seseorang akan menunjukkan reaksinya untuk melakukan perbaikan atau adaptasi terhadap lingkungan itu sendiri. Serupa itu jugalah, ketika di masa lalu, rakyat Indonesia merasa prihatin terhadap kondisi bangsa yang terjajah, kemudian mereka bangkit dan bersatu untuk melawan kaum imperialisme-kolonialisme. Karena sadar lingkungan dan sadar kondisi, kemudian rakyat Indonesia bersatu padu bangkit dan melakukan perlawanan terhadap kaum penjajah.

Meminjam istilah dunia pendidikan, kita belajar dari masalah yang kita hadapi saat ini. Belajar dari masalah (*problem based learning*), belajar berorientasi pemecahan masalah (*problem solving based learning*). Pendekatan ini, merupakan satu ikhtiar manusia untuk melakukan perbaikan diri dan perbaikan situasi, dengan mempelajari kondisi social yang ada. Lingkungan social dijadikan sebagai bahan ajar untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas hidup.

Pada konteks inilah, seiring dengan peristiwa sejarah di masa lalu, yaitu Kebangkitan nasional kita diingatkan pada satu kebutuhan untuk merumuskan satu strategi kolektif dalam menyelamatkan bangsa. Kendati sering kita dengar, dan atau malah kita ikuti acara seremonial kebangkitan nasional tersebut, kita pun kadang alpa terhadap apa yang harus kita lakukan saat ini. Hari Kebangkitan Nasional itulah peristiwa sejarah yang kini sedang kita dengar. Sedang kita renungkan. Tafakuri. Bahkan patut untuk aktualisasikan ke dalam kontek kehidupan kita saat ini.

Dalam kaitan ini, hari kebangkitan nasional ini, perlu dimaknai dalam tiga tahapan gerak sosial. Pertama, kita perlu menekadkan diri untuk '*bangkit dari*'. Kita harus bangkit dari krisis, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kebodohan, bangkit dari situasi yang penuh dengan perilaku korup, bangkit dari kemiskinan dan lain sebagainya. Bangkit dari, adalah sebuah prinsip kesadaran kolektif terhadap kondisi diri, kondisi bangsa, kondisi negeri atau kondisi kolektif bangsa ini yang belum beradap pada satu titik harapan. Bangkit dari adalah energi untuk mengubah kondisi diri menuju puncak harapan yang dicitakan.

Kedua, "*Bangkit dengan...*". Sebagai sebuah bangsa yang besar dan berharap menjadi bangsa yang besar, kebangkitan nasional

tidak bisa secara parsial dan sendiri. Kita harus menjalin kerjasama dengan seluruh komponen bangsa dan harus melibatkan partisipasi seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, bangkit bersama atau bangkit dengan merupakan pendekatan operasional dalam mewujudkan cita-cita.

Keluar dari krisis bukan karena ada peran si A, si B, atau golongan A dan golongan B. Tidak boleh ada yang mengklaim, bahwa sebuah keberhasilan bangsa, merupakan kerja keras dari seseorang atau golongan tertentu. Hukum sosial sangat jelas, *“membangun bangsa ini mutlak membutuhkan peran serta seluruh komponen bangsa, tetapi menghancurkan bangsa cukup satu orang atau satu golongan saja yang berkhianat”*. Hal ini menggambarkan bahwa memporakporandakan sebuah bangsa, tidaklah membutuhkan musuh dalam selibut terlalu banyak. Cukup satu golongan saja berkhianat terhadap bangsa ini, maka kekacauan akan mudah terjadi.

Berpatokan pada konsep ini, maka ‘bangkit dengan’ merupakan strategi operasional dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang berkualitas dan berwibawa. Indonesia besar dan jaya, bila mengedepankan prinsip *“bangkit dengan....”*

Terakhir, yaitu *bangkit untuk*. Tidak boleh dilupakan, kita bangkit karena ada alasan kondisi, tetapi tujuan atau target pun harus sudah dimiliki. Bila niat sudah ada, tetapi tujuan tidak jelas, maka gerakan kebangkitan akan kabur atau salah arah. Bila perjalanan kita tidak memiliki tujuan, maka kita akan berhenti ditempat yang salah, dan atau tidak sampai pada apa yang diinginkan. Kesadaran kondisi riil tidak dibarengi dengan kesadaran kolektif mengenai visi dan misi, maka jalan kebangkitan ini akan mudah terseok-

seok, dan mudah surut kembali. Oleh karena itu, bangkit dari harus digenapkan dengan bangkit untuk.

Pembongkaran kasus mafia pajak, merupakan satu upaya untuk bangkit dari keterpurukan birokrasi perpajakan dan birokrasi keuangan negara. Gerakan pembongkaran kasus mafia pajak ini adalah gerakan positif mengenai *bangkit dari*. Namun bila visinya berubah haluan, dari semula mereformasi birokrasi perpajakan, ke arah politis, maka idealisme gerakan *bangkit dari* kondisi korup tidak akan terwujud. Hal itu terjadi, karena kita gagal merumuskan prinsip *bangkit untuk*.

Berdasarkan analisis ini, setidaknya kita diajak untuk terbiasa merumuskan strategi hidup, bangkit dari, bangkit dengan dan bangkit untuk. Kita bangkit dari keterpurukan, dengan potensi kolektif dan kesadaran nasional bangsa, menuju Indonesia yang bersih dan berwibawa.

Citra Ketertindasan Yang Tidak Elegan

Dalam dua minggu terakhir, pemberitaan di media massa, banyak memunculkan kondisi psikologi Presiden SBY. Suasana bathin SBY, yang terbaca dari luar adalah bentuk keluhan atau reaksi bentuk tertindasan diri oleh pihak lain. Sebagai proses pencitraan, banyak yang memberikan apresiasi positif terhadap strategi pemasaran politiknya SBY di tahun 2004. Dengan teknik ‘keluhan’ atau ‘pencitraan tertindasan’ menyebabkan dirinya populer dan mendapat simpati yang luas dari masyarakat.

Tidak terlalu salah, bila kita pun saat ini menilai bahwa keluhan SBY adalah bentuk lain dari upaya pencitraan tertindasan diri oleh ‘hegemoni’ oposannya. Namun demikian, kita melihat sisi paradoks dari keluhannya itu sendiri. Dengan kata lain, kita lebih melihat bahwa keluhan atau perasaan tertindasan oleh fitnah kelompok oposisi, menjadi sangat tidak relevan terkait dengan ‘perilaku politik’ dirinya dalam pemerintahan KIB periode II ini.

Ada beberapa alasan yang mendukung pada pencitraan tertindasan SBY menjadi sangat tidak elegan.

Pertama, dalam proses penyusunan kabinet, SBY sendiri sesungguhnya lebih tercitrakan sebagai pelaku tidak adil daripada sebagai pemimpin yang bijak. Presiden adalah pemilik hak prerogative dalam menentukan siapa menduduki apa dalam jabatan kabinetnya. Namun, ketidakterpilihannya Nila A Moeloek sebagai Menteri Kesehatan, menyisakan pertanyaan yang sempat kontroversial. Ada dua kontroversi yang menyelimuti masalah ini, (a) mengapa hanya semalam keputusan itu harus berubah, padahal Nila sudah mengikuti proses yang cukup panjang, dan (b)

mengapa penggantinya adalah orang yang juga menyulut kontroversial ?

Mau tidak mau, kebijakan politik SBY tersebut menyebabkan citra SBY menjadi kurang baik dihadapan (sebagian) masyarakat. Prosesi yang selama ini dianggap familiar, populer dan demokratis, serta transparan, akhirnya terkubur sudah oleh 'kaburnya' prosesi pemilihan Menkes jilid II ini. Bahkan buntut dari kebijakan itu, beberapa saat di awal masa jabatannya, Menkes pun sempat mendapat penolakan dari kelompok-kelompok tertentu di lingkungan penggiat kesehatan.

Kedua, rasa simpati terhadap keluhan dan citra ketertindasan sangat lemah, terkait dengan tidakresponsifnya Partai Demokrat atau Fraksi Demokrat dalam mensikapi usulan hak angket. Lambatnya sikap tersebut, menjadi citraan yang buruk bagi SBY khususnya, dan Partai Demokrat umumnya.

Bagi Partai Demokrat sendiri, kehati-hatian dalam mensikapi hak angket adalah strategi politik yang formalis. Menunggu hasil audit BPK adalah sikap normative. Namun kenormatifan yang kaku bukanlah sikap politik yang mencerminkan kematangan dalam membaca trend atau psikologi politik publik. Pada konteks inilah, citra SBY sebagai pemimpin Negara sudah mulai berkurang.

Ketiga, keluhan dan rasa ketertindasan SBY menjadi kian tidak bermakna, terkait dengan adanya indikasi (dugaan sementara) keterlibatan orang-orang di sekitar dirinya tersangkut Skandal Bank Century. Orang yang banyak digunjingkan itu adalah Boediono (Gubernur BI, dan kini Wapres), dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan). Kedua orang itu, kini menjadi pendamping utama SBY.

Bila demikian adanya, maka dapat disimpulkan bahwa minimalnya ada tiga orang yang dianggap kurang memenuhi kepuasan politik rakyat Indonesia, yakni Menkes, Wapres dan Menkeu. Ketiga orang, menjadi titik lemah dari kekuatan dan ketahanan kabinet KIB jilid II.

Keempat, ketidaksimpatian itu terjadi pula atas tidak tegasnya SBY dalam menindak orang yang sudah dianggapnya mencemarkan nama baik dirinya. Masih ingat dalam benak kita, ketika SBY dicemarkan nama baiknya oleh Zaenal Ma'arif, beliau langsung melaporkannya dan menggusurnya ke meja hijau. Sikap ini, tidak tampak ketika dirinya dicatut namanya oleh oknum yang menjadi bagian penting dari perilaku Anggodo dalam kasus Bibit – Chandra. Presiden SBY seolah menganggap angin lalu terhadap pencemaran nama baik tersebut.

Terakhir, psikologi kepemimpinan SBY menjadi sangat tidak matang, bila dikaitkan kembali dengan sikap reaksionernya terhadap gerakan 9 Desember. Gerakan Indonesia Bersih yang bertepatan dengan hari Antikorupsi Se-dunia, dianggapnya sebagai satu gerakan yang ditunggangi oleh kepentingan politik. Sontak saja, reaksi seperti ini mendapat kritikan dari berbagai kalangan, khususnya dari kalangan oposisi atau aktivis di lapangan.

Dari sejumlah data atau gambaran psikologi kepemimpinan presiden RI tersebut, setidaknya kita menemukan informasi bahwa psikologi kepemimpinan dan kenegarawaran menjadi sangat penting dalam menjaga citra pemimpin itu sendiri. Terlalu banyak mengeluh dan atau mencitrakan diri sebagai orang tertindas, pada dasarnya hanya menunjukkan diri sebagai orang

yang tidak cerdas dalam memainkan peran diri dalam dinamika politik yang tengah berkembang.

Hal yang perlu diwaspadai, presiden SBY jangan sampai tersetir oleh opini di sekitar dirinya, sehingga dirinya terjebak oleh isu-isu murahan, yang malah dapat menyebabkan dirinya terjebak pada lubang-gaya kepemimpinan yang tidak sejati. Citra SBY sebagai pemimpin yang santun, bijak, dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan, rusak sudah oleh perilaku reaksioner dan kebijakan-kebijakan yang tidak memperhatikan nurani rakyat.

Isu murahan lainnya yang bisa menyebabkan SBY terjebak pada kubangan sikap politik yang tidak elegan, yaitu bila dirinya termakan isu sebagai pemilik kekuatan ekonomi yang kuat di parlemen. Betul bila ada yang mengatakan bahwa Partai Demokrat adalah partai pemilik suara terbanyak di DPR. Betul pula bila dikatakan bahwa SBY adalah pemilik suara mayoritas dalam pemilihan presiden 2009. Namun perlu dicatat pula, kekuatan suara politik –baik diparlemen maupun di pilpres— sesungguhnya sangat cair. Maksudnya, maka kekuatan itu masih sangat mudah untuk berubah dan bergeser. Oleh karena itu, kekuatan politik SBY sendiri pada dasarnya belum dapat teruji dengan baik. setidaknya belum banyak ujicoba politik yang dapat menguatkan keyakinan bahwa pemilik suara Partai Demokrat itu memang kuat dan bisa diandalkan.

Bila SBY termakan oleh isu sebagai orang yang memiliki kekuatan politik di Parlemen dan Eksekutif, maka dia akan dengan mudah terjebak oleh kubangan politik yang emosional dan reaksioner. Artinya, sikap reaksioner sebagaimana yang ditunjukkan dalam analisis di atas, potensial menjadi blunder bagi karir politik dirinya di masa depan. Karena sesungguhnya, sikap reaksioner dan

emosional itu bisa berada pada dua titik ekstrim, yaitu pemimpin yang manja dan atau pemimpin yang otoriter.

Pada konteks inilah, kekhawatiran terhadap tunggangan politik pada 9 Desember merupakan reaksi emosional yang tidak sejalan dengan citra kesantunan dan sikap bijak dirinya. Pada konteks inilah, SBY hendaknya dapat kembali menunjukkan diri sebagai seorang negarawan yang mengedapkan rasionalitas dan kepentingan publik.

Untuk sekedar contoh, daripada mengembangkan opini yang bersifat kontraproduktif, mendingan Pemerintah bersatu atau bergabung dengan gerakan 9 Desember untuk menuntaskan agenda pemberantasan markus dan mafia peradilan. Sikap ini jauh lebih elegan, dan jauh lebih mendorong menguatnya citra SBY dihadapan masyarakat. Bukankan gerakan Antikorupsi sama sebangun, senada seirama dengan misi Pemerintah ? mengapa harus dilawan dengan opini yang kontraproduktif ?

Pemerintah harus cerdas, bahwa musuh Indonesia saat ini adalah penguasa yang berkolusi dengan pengusaha dan mengkorup kekayaan negara ! Musuh nasional yang lainnya adalah mafia peradilan yang ditunjukkan dengan berkolusinya pengusaha, penguasa dan penegak keadilan.

Itulah musuh besar bangsa kita saat ini.

Dan saat ini, adalah saatnya kita bangkit untuk menyatakan perlawanan !!

Pengalihan Isu : dari Fokus ke Institusi

Banyak pihak yang memandang bahwa pada saat ini, ada yang sedang memainkan strategi pengalihan isu. Dari perhatian terhadap kasus Century, pindah ke Susno Duadji, kemudian pindah lagi ke kasus Gayus Tambunan dan lain sebagainya. Khusus dalam pemerintahan SBY jilid II ini, mulai dari pelantikan sampai sekarang, seolah tiada pernah berhenti. Masalah hukum, peradilan, dan penegakkan hukum terus bermunculan, seiring sejalan dengan gereget rakyat untuk mendapat keadilan hukum di hadapan negaranya sendiri.

Pada dasarnya, usaha mengalihkan isu itu menjadi tidak berhasil ketika orang merasakan bahwa ada yang sedang mengalihkan isu. Kesadaran itu adalah kesadaran nyata mengenai kepekaan politik rakyat Indonesia saat ini. Dalam ukuran tertentu, rakyat kita saat ini, jauh lebih cerdas dan kuat ingatan terhadap berbagai kasus yang sedang terjadi saat ini, dan atau kasus yang tengah dihadapi bangsa ini. khususnya masalah hukum yang membelit bangsa ini.

Tetapi, ada yang mungkin banyak dilupakan orang. Permainan pengalihan isu itu, pada dasarnya dapat terjadi pada beberapa tingkat, dan dari semua tingkatan itu, memiliki target masing-masing. Kealpaan kita terhadap fokus-fokus pengalihan isu, menjadi bukti nyata bahwa kita memang sudah teralihkannya.

Pertama, pengalihan fokus isu. Munculnya pembongkaran kasus 'markus', adalah upaya menghapus pemain pengalih isu. Markus adalah tokoh utama dalam permainan pengalihan isu. Mereka memiliki kemampuan, mengalihkan isu dari satu isu ke isu lain, dalam praktek persidangan. Sebuah tuduhan korupsi, akan

menjadi batal demi hukum, dan orang terdakwa bisa bebas, bila markus mampu menggiring opini dalam ruang sidang dari tuduhan korupsi ke tuduhan penggelapan uang, dan atau pencucian uang. Akibat dari pengalihan isu peradilan ini, maka jaksa bisa mengeluarkan keputusan hukum yang tidak sesuai dengan 'semestinya', minimalnya akan keluar pernyataan bahwa (1) berkas tidak lengkap, dan (2) tuduhan tidak terbukti, maka si terdakwa bisa dibebaskan. Semua hal itu, adalah buah dari pengalihan isu dari sisi titik masalah ke titik masalah lainnya. Inilah yang disebut pengalihan fokus isu.

Pada bagian ini, maka perhatian publik terhadap pentingnya pemberantasan marksu menjadi penting dan perlu didukung sepenuh hati. Karena, akibat adanya markus inilah keadilan menjadi kering, dan kepastian hukum menjadi tidak ada. Oleh karena itu, pengawalan fokus isu menjadi penting dalam rangka menghapus pengalihan isu. Misalnya, isu hukum jangan dialihkan menjadi isu politik, isu korupsi jangan digeser menjadi isu perdata. Atau sebaliknya.

Kedua, pengalihan isu. Yang dimaksud dengan pengalihan isu adalah pengalihan wacana Besar (dengan huruf B 'besar'). Pengalihan isu ini terjadi di luar persidangan. Pengalihan isu yang kita maksudkan ini, lebih banyak terkait dengan pusat perhatian masyarakat. Pemerintah atau pemilik isu, memainkan 'sensitivitas publik' untuk mengulur, menarik, menggiring, membentuk, atau mengarahkan dan mengerdilkan perhatian publik. Pengalihan isu adalah prosesi pusat perhatian publik dari satu objek ke objek lainnya, yang lebih bersifat kolektif.

Pengalihan isu yang bisa terjadi, misalnya dari isu pembongkaran kasus korupsi, ditutup dengan isu pemberantasan terorisme. Atau

isu terorisme diganti dengan isu penanganan bencana alam (tsunami atau gempa). Pindah haluan perhatian dari satu wacana ke wacana berikutnya itu, fenomena berbeda dengan pengalihan pusat isu. Dengan kata lain, peduli pada masalah baru adalah penting, tetapi menyelesaikan masalah lama jauh lebih penting lagi. Strategi mem'peti es'-kan merupakan strategi usang yang tidak boleh terjadi lagi di tengah hasrat bangsa ini untuk membangun kepastian dan ketegasan hukum.

Terakhir, dan ini yang kini jarang diperhatikan banyak kalangan, yaitu pengalihan isu dengan menggeser peran institusi. Mau tidak mau, peran atau kewenangan sebuah lembaga, memiliki potensi yang besar dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di Indonesia, termasuk masalah hukum yang membelit bangsa ini. Oleh karena itu, perhatian terhadap eksistensi lembaga tersebut, menjadi bagian penting dari para aktivis penegak hukum.

Pada kenyataannya, kita memang patut prihatin. Selama Orde Baru dan juga 10 tahun setelah Reformasi, peran dan fungsi lembaga negara tidak maksimal. Baik lembaga politik maupun lembaga penegak hukum, tidak mampu menunjukkan diri sebagai lembaga kualified dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya. Akibat dari kesadaran inilah, baik di tingkat masyarakat maupun negara, muncul hasrat untuk mengembangkan lahirnya lembaga-lembaga lain di luar lembaga negara yang ada.

Pada titik inilah, pengalihan citra terjadi pada masyarakat mengenai lembaga negara. Persepsi publik bergeser dari lembaga formal ke lembaga ekstra. Tidak percaya pada DPR, rakyat menggunakan mahasiswa. Tidak percaya ke lembaga formal, Pemerintah membentuk puluhan komisi nasional (komnas). Termasuk ketika Pemerintah tidak melihat adanya kemampuan

penegak hukum melakukan tugas pokok dan fungsinya, maka lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inilah fenomena yang kita sebut sebagai penghalihan isu berbasis organisasi atau peran institusi.

Lima tahun terakhir, orang sudah merasa gerah dengan peran dan kontribusi KPK yang sangat istimewa dalam membongkar kasus korupsi. Keberanian KPK dalam membongkar korupsi di Indonesia jauh lebih "hebat" dibandingkan dengan para penegak hukum formal negara (seperti kejaksaan, kepolosian atau badan pengawasan internal lainnya). Saking kuat dan tingginya semangat aktor KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, diceritakan ada pihak-pihak yang gerah dengan kehadiran lembaga ini. Kemudian muncul isu adanya usaha pengkerdilan KPK, atau kriminalisasi KPK.

Kriminalisasi KPK melalui isu korupsi pada individu pengurus KPK pun terjadi. Bibit-Chandra diseret ke ruang pengadilan dengan tuduhan ada indikasi pemerasan. Usaha ini menggusur individu pengurus KPK ini tidak berhasil, karena keputusan politik keluar dengan meng-SKP2-kan masalah Bibit-Chandra. Pengalihan isu tersebut dianggap gagal (sementara). Hal yang menarik, pada saat penyelesaian Cicak-Buaya itu, kemudian muncul "lembaga" yang bernama Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Lembaga inilah yang kemudian mampu 'menyelesaikan' sementara kasus Cicak-Buaya.

Pada konteks terakhir itulah, pengalihan isu dari kriminalisasi KPK secara individu dapat dinyatakan gagal, namun pemiskinan citra KPK secara kelembagaan jauh lebih berhasil. Indikasi nyata dari fenomena ini, yaitu tingginya animo masyarakat dalam melapor

dan berharap terhadap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dibandingkan kepada KPK atau aparat penegak hukum lainnya.

Mau tidak mau, bola pembicaraan tentang pemberantasan hukum di Indonesia saat ini ada di tangan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Tidak lagi di KPK atau di aparat penegak hukum negara lainnya. Mereka tetap memiliki peran-peran tersebut, sebagaimana KPK yang tengah menjalankan fungsinya untuk memeriksa Menkeu atau Wapres terkait dengan Century. Namun demikian, peran KPK seolah-olah telah menjadi pemain sekunder setelah Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Pada konteks terakhir itulah, pengalihan isu tingkat institusi berhasil dilakukan.

Kebutuhan kita saat ini, adalah perlu melakukan revitalisasi institusi negara, dan mensinkronkan peran dari setiap lembaga negara. Bukan mendirikan sebuah lembaga, sekedar untuk mengkerdilkan lembaga yang lain. Menghadirkan sebuah lembaga, sejatinya harus mendukung dan menguatkan lembaga yang ada.

DARI BIROKRASI KE BIROKREASI

Di setiap tutup akhir, banyak orang melakukan refleksi. Terhadap berbagai hal yang terkait dengan persoalan bangsa ini, termasuk di dalamnya adalah melakukan refleksi terhadap agenda (perjalanan) reformasi birokrasi di Indonesia. Terkait dengan persoalan ini, banyak kalangan masih melihat wajah birokrasi secara skeptik. Wajah birokrasi masih memancarkan aroma yang kurang membanggakan. Berbagai isu yang terkait dengan tuntutan reformasi birokrasi atau perbaikan pelayanan publik, seolah masih dianggap sebagai pemanis-lidah yang digunakan aparatur. Indikasi nyata yang digunakan untuk mempertegas penilaian ini yaitu masih tingginya indikasi korup di berbagai instansi di Indonesia, baik yang dilakukan eksekutif dan atau melibatkan legislatif maupun yudikatif.

Dalam banyak hal, baik-buruknya birokrasi sesungguhnya tidak bisa dibaca secara sepihak. Lahirnya wajah birokrasi dalam warna tertentu, merupakan bagian dari 'sistem komunikasi politik' atau komunikasi kewenangan antar berbagai pihak. Akibat dari adanya kondisi inilah, kemudian menyebabkan banyak berbagai hal yang terjadi dalam dunia birokrasi Indonesia.

Selaras dengan pandangan inilah, saya melihat perlu ada upaya pembenahan budaya birokrasi, dari birokrasi ke birokrasi menuju birokreasi. Tahapan dan karakter perjalanan ini, menjadi sangat penting bila dikaitkan dengan tuntutan dan kebutuhan pembenahan penyelenggaraan negara di Indonesia. Harapan kita untuk membangun pemerintahan Indonesia yang bersih dan berwibawa, akan sulit diwujudkan bila kita tidak berusaha keras

melakukan peningkatan budaya kerja birokrasi menuju birokrasi yang unggul.

Birokrasi Indonesia saat ini, kerap kali dibaca dalam dua warna. Satu sisi, birokrasi dianggap sebagai organisasi yang kurang memberikan nilai yang positif bagi masyarakat. Sikap dan responsibilitas birokrasi yang lemah dan lambat terhadap kebutuhan masyarakat, kinerja yang lemah, inefisien dan tidak jelas alat ukur kerja birokrasi, merupakan bagian dari kritikan publik (akademisi) terhadap birokrasi Indonesia. Bahkan dalam lembaga pemerintah tertentu, feodalisme birokrat masih kuat dirasakan. Sisa-sisa kolonialisme ini, bukan hanya tampak dalam produk peraturan-perundangan (misalnya KUHP), tetapi tampak pula dalam sikap feodalistiknya birokrat di Indonesia. salah satu diantaranya ditunjukkan dengan hasratnya yang besar untuk mendapat pelayanan dari masyarakat dan bukan melayani masyarakat.

Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan wajah lain dari birokrasi Indonesia. Wajah ini setidaknya sangat terasa dan kental dalam budaya birokrasi di era orde baru. Fenomena ini saya sebut sebagai pertemuan antara kerja-kerja birokrat yang bertemu dengan kejahatan-negara atau kesintingan elit politik akibat nafsu serakah atau nafsu *kapitalisme*. Bentuk perilaku ini, selanjutnya dapat kita sebut birokrasi dengan wajah birokrazi (*bureaucrazy*).

Bangsa yang memiliki birokrazi sangat jelas tandanya, yaitu tingginya biaya birokrasi. Semangat kerjanya mengacu pada doktrin, "bila masih bisa dipersulit mengapa mesti dipermudah". Semakin besar biaya pekerjaan semakin banyak meja yang harus dilalui. Bila masih bisa dipungut biaya mengapa harus digratiskan.

Doktrin-doktrin tersebut lahir dan tumbuh subur di lingkungan birokrasi. Sehingga tidak mengherankan bila kemudian melahirkan birokrasi berbiaya tinggi, dan merupakan salah satu penyebab utamanya rendahnya minat investor masuk ke wilayah tersebut.

Tidak bisa dilupakan, bahwa salah satu tuntutan gerakan reformasi 1997-1998 adalah melakukan reformasi birokrasi. Tuntutan ini didasari karena adanya fakta bahwa rendahnya kesejahteraan masyarakat Indonesia atau lemahnya fundamental ekonomi bangsa merupakan kondisi bangsa yang lebih disebabkan karena tumbuhsuurnya birokrasi tersebut. Birokrasi-birokrasi hanya mementingkan diri, kelompok dan atau penguasa. Anggaran negara habis oleh kegiatan seremonial dan tidak menyentuh kepentingan rakyat Indonesia.

Pada konteks inilah, reformasi birokrasi-birokrasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengembalikan peran dan fungsi birokrasi ke jalur yang sesungguhnya. Fenomena birokrasi merupakan bentuk nyata dari perselingkungan antara birokrasi dengan nafsu serakah (pragmatisme) dari kelompok 'penjahat negara'. Reformasi birokrasi adalah gerakan yang berhasrat untuk mengembalikan peran birokrasi ke jalur yang benar.

Sayangnya memang kita belum melihat hasil-hasil reformasi dalam bidang birokrasi secara maksimal. Pengalaman yang menekankan mengenai pentingnya profesionalisme birokrasi sebagaimana yang terjadi di era Orde Baru, malah melahirkan perselingkuhan baru. Birokrasi di era Orde Baru berselingkuh dengan kekuasaan atau kepentingan politik, yang pada akhirnya kerja-kerja birokrasi tidak lagi bersifat profesional dan netral.

Perselingkuhan birokrasi dengan kekuasaan politik ini menimbulkan dua karakter utama birokrasi di Indonesia. *Pertama*, birokrasi di Indonesia benar-benar menjadi kekuatan dan kepanjangan tangan pemerintah (penguasa). Angin kekuasaan (penguasa) menjadi kiblat dari kerja-kerja birokrasi. Sementara kepentingan rakyat dan atau keberpihakan kepada rakyat banyak yang terabaikan. *Kedua*, birokrasi muncul sebagai kekuatan kelima setelah komponen demokrasi yang lain. Dengan kata lain, selain legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta masyarakat sipil, kelompok birokrasi pun tampil sebagai kekuatan yang mampu memainkan kerja-kerja politik. Tidak mengagetkan bila kemudian, di era Orde Baru itu, Soeharto pun menggunakan birokrasi sebagai salah satu soko-guru kekuatan politiknya. Sebagaimana diketahui, penguasa Orde Baru itu berdiri di atas kekuatan ABCDEFG (Abri, birokrat, Cina, Da'i, Ekonom, Fraksi, Golkar).

Birokrasi sebagai sebuah kekuatan tersendiri dibandingkan dengan elemen demokrasi yang lainnya, merupakan indikasi eksplisit mengenai perselingkuhannya birokrasi dengan kepentingan politik. Ketika birokrasi memainkan peran *menscreening* warganya sendiri sesuai harapan penguasa, pada dasarnya hal ini sudah menunjukkan peran birokrasi dalam bidang politik. Dengan kata lain, bila hal ini terus terjadi, bahwa birokrasi benar-benar sebagai 'biro' yang 'berkuasa' (biro dan *cratos*).

Pada sistem politik yang korup, birokrasi dalam pengertian *birocratos* memainkan peran birokralnya untuk kepentingan politik. Banyak hal yang menunjukkan sikap *birocratos*, misalnya PNS yang tidak netral, intervensi birokrasi terhadap kebijakan pembangunan dan aparat yang turut melakukan manipulasi data pemilu. Hal ini merupakan segelintir contoh mengenai *birocratos*.

Kaum reformis sudah muak dengan birokratos atau birokrasi. Kedua karakter birokrasi itu harus segera dihentikan. Dalam setiap level apapun. Keputusan untuk melakukan reformasi birokrasi ini merupakan harga mati bagi masa depan Indonesia. Bahkan bila ada instansi yang masih menunjukkan sikap yang lamban dan tidak gesit melayani publik, maka publik berhak untuk mempertanyakannya. Perbedaan kewenangan, baik Pusat ataupun Daerah, tidak mesti menjadi alasan untuk tetap memegang karakter budaya birokrasi yang tidak efektif.

Sekedar contoh, dalam lingkungan pendidikan guru-guru di lingkungan Dinas Pendidikan sudah merasakan efek dari tunjangan profesi. Mungkin karena mereka sudah diotonomikan dan biaya tunjangan tersebut relatif lebih sedikit dibandingkan dengan guru-guru yang ada di lingkungan Departemen Agama. Untuk guru yang ada di lingkungan Depag ini, kendati peserta yang lulus sertifikasi profesi sudah sampai pada gelombang tiga, namun tidak ada satu pun diantara mereka (dari gelombang 1 – 3) yang telah menerima tunjangan profesi tersebut (studi kasus di Kota Bandung).

Potret ini bisa terkait dengan banyak aspek, misalnya (1) perbedaan pusat pengurusan, yang satu diurus daerah sementara Depag masih bersifat sentralistik, (2) jumlah kasus yang harus dilayani jauh lebih banyak dibandingkan urusan pendidikan yang sudah didesentralisasikan. Kedua argumen ini pada dasarnya tidak bisa dipertahankan, bila birokrasi di lingkungan instansi mampu belajar dari kasus yang ada. Pada konteks ini, ada dua argumen yang bisa dijadikan kritik terhadap komentar tersebut, yaitu (1) bila memang sudah tidak kuasa ditangani oleh Pusat, maka penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Depag pun perlu didesentralisasikan, (2) bila mau tetap di urus oleh Pusat, maka

budaya kerja birokrasi di instansi tersebut harus mampu menunjukkan sikap yang kreatif dan prima.

Harapan untuk membangun birokrasi yang kreatif ini, selaras dengan semangat pemberdayaan organisasi sebagaimana yang citakan dalam organisasi pembelajar (*learning organization*). Birokrasi yang kreatif yaitu organisasi yang tumbuh dalam semangat belajar yang berkelanjutan. Pepatah yang mengatakan bahwa "pengalaman itu adalah guru yang terbaik" perlu dijadikan spirit birokrasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri.

Di tingkat terakhir ini, saya ingin menyebut karakter birokrasi ini sebagai birokreasi (*bureaucreation*). Birokreasi adalah organisasi birokrasi yang membuka diri untuk melakukan perubahan, pembenahan dan pemberdayaan diri. Birokreasi adalah organisasi yang tidak menutup diri dan merasa benar sendiri. Ukuran dasar dari birokreasi bukan pada keterlaksanaan tupoksi sebagaimana yang diinstruksikan penguasa, namun keterlayanan kepentingan publik.

Melalui refleksi akhir tahun ini, kita tidak berharap lagi, perjalanan panjang reformasi nasional saat ini, terpelanting kembali pada birokrasi. Kita tidak berharap, revolusi mental itu "mental" dan kembali terpelanting pada birokrasi. Hal yang kita inginkan saat ini, justru adalah memelantingkan budaya birokrasi ke birokreasi. Pentingnya semangat birokreasi ini, bukan hanya relevan dengan kebutuhan penanaman mental spirit organisasi pembelajar, namun terkait pula dengan pentingnya penguatan modal intelektual di lingkungan birokrasi. Dengan demikian, cermin birokrasi tahun 2008 dapat dijadikan pijakan awal untuk membangun birokrasi Indonesia menjadi birokreasi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Semoga.

Demoralisasi Institusi Kepolisian

Akhir Oktober ini (2013), saat bangsa kita merayakan Sumpah Pemuda yang mengusung nilai-nilai kesucian kebangsaan, kita malah dihadapkan pada isu yang kurang sedap lagi. Kesatuan Polisi di Lampung, dihebohkan dengan munculnya foto bugil seorang anggota polisi wanita (polwan). Foto itu beredar di dunia maya. Pelaku dalam foto itu, mirip dengan seorang polisi yang bertugas sebagai sekretaris pribadi Polda Lampung.

Belum reda masalah itu, beredar lagi kasus foto yang tidak etis secara norma masyarakat Indonesia. Seorang pimpinan polsek di Wonogiri tersangkut dengan hal serupa. Foto yang beredar di dunia maya, pelaku mempublikasikan foto dirinya dalam keadaan yang tidak sesuai dengan etika polisi dan juga norma agama.

Jauh sebelum ini, kita mendapatkan informasi mengenai kasus Briptu Rani dari Polres Mojokerto Jatim, yang buron, depresi dan kemudian dikeluarkan dari kesatuannya. Masalah Briptu Rani pun, berawal dari pengakuannya mengalami pelecehan seksual di institusi. Karena merasa tidak nyaman dengan perlakuan itu, kemudian dia mengalami depresi dan tidak masuk kantor. Selama itu pula, malah disebut disersi. Kasusnya diusut oleh Propam, hasilnya atasannya diturunkan jabatannya, dan Rani di pecat dari kesatuannya.

Publik bertanya-tanya. Mengapa hal itu terjadi ? apakah hal ini merupakan bentuk demoralisasi satuan kepolisian ? atau aspek lain ?

Kita patut prihatin. Bila memang terjadi proses demoralisasi norma dan budaya organisasi di kesatuan ini. Lebih prihatin lagi, bila kemudian orang menduga, apakah hal ini, adalah puncak gunung es demoralisasi kepolisian, atau hanya oknum belaka ?

Sebagaimana dimaklumi bersama, media komunikasi dan media jejaring sosial yang berkembang saat ini, cukup besar berpengaruh pada perilaku dan psikologi manusia. Media jejaring sosial, secara psikologis mendorong keberanian seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Sementara secara sosiologis, media jejaring sosial mengubah total makna dari masalah pribadi dan masalah sosial.

Hari ini kita melihat kecenderungan bahwa masyarakat mengartikan media jejaring sosial sebagai sesuatu yang *absurd*. Masyarakat tidak mampu menunjukkan batasan yang tegas dan jelas, mengenai ruang pribadi dengan ruang publik. Media jejaring sosial adalah media publik, tetapi dimanfaatkan untuk mempublikasikan masalah pribadi. Sisi lain, media sosial diposisikan sebagai media pribadi, tetapi malahan dipublikasikan dan dijadikan media untuk berkomunikasi.

Karena merasa sebagai media pribadi, seorang pejabat negara mengunggah berbagai dokumen kegiatan pribadinya di instagramnya. Tetapi kemudian, saat foto dalam instagram itu dikomentari orang lain, malah marah-marah. Begitu pula kasus yang lainnya, sejumlah aparat polisi yang mengunggah foto yang kurang etis ke media massa, adalah bentuk dari absurditas pemahaman mengenai ruang publik dan ruang pribadi. Mereka itu menggunakan media jejaring sosial pribadi, tetapi dipublikasikan.

Kesalahpahaman memaknai ruang publik dan ruang pribadi ini, banyak terjadi juga di kalangan anak remaja. Tetapi, hal itu memang bisa dipahami sebagai kewajaran anak muda yang kurang paham mengenai batasan ruang pribadi dan ruang publik. Tetapi, bila terjadi pada wilayah elit, maka sangat masuk akal, bila kemudian, fenomena ini, pada dasarnya merupakan satu bentuk puncak gunung es demoralisasi masyarakat kita. Bahkan, kalau dikaitkan dengan kasus yang dikemukakan di awal, sudah bukan lagi demoralisasi mentalitas masyarakat, tetapi sudah masuk kategori pembusukan moral bangsa Indonesia.

Aparat kepolisian yang diposisikan sebagai penegak hukum, dan diharapkan mampu menuntaskan masalah-masalah penyakit sosial di masyarakat, malah terjebak dalam lingkaran masalah itu sendiri. Masyarakat berharap, ada pemberantasan terhadap pornografi dan pornoaksi. Tetapi pada kenyataannya, malah aparat kepolisian itu sendiri, yang tersangkut dalam masalah itu. Itulah maknanya, bahwa kasus ini bukan lagi demoralisasi lembaga kepolisian, tetapi sudah menjadi pembusukan moral bangsa Indonesia.

Bila dikaitkan dengan aspek sistem keorganisasian, dapat kita sebutkan bahwa kasus ini merupakan bentuk lain dari kerusakan 'kredibilitas organisasi'. Kepolisian sebagai sebuah lembaga, sedang mengalami konflik budaya organisasi. Dari sistem organisasi yang baku, dan terkomando sebagaimana yang berlaku di kesatuan TNI masa lalu, menuju sistem sosial yang "berorientasi sipil".

Dalam tahapan transisi seperti itulah, masalah-masalah keutuhan dan kredibilitas organisasi ini teruji. Berbagai hal terjadi saat ini, pada dasarnya adalah benih anomalia dari perubahan budaya

organisasi di lembaga kepolisian itu sendiri. Sistem komando yang baku dan ketat, sebagaimana di lingkungan TNI, melahirkan pengawasan, kontrol dan tindakan yang tegas. Karakter seperti ini, tampaknya kurang muncul dan menguat dalam tubuh kepolisian.

Fenomena yang ada, justru cenderung menunjukkan bahwa sistem pengawasan di lingkaran tubuh kepolisian, sangat cair dan kurang terkoordinasikan. Fakta yang kita sebutkan tadi, merupakan contoh nyata, lemahnya pengawasan dari pimpinan atau kesatuan terhadap kineja dan atau perilaku organisasi anggota kesatuannya.

Berdasarkan pertimbangan itu, dapat disederhanakan bahwa sebagai salah satu pionir dalam proses reformasi, kepolisian wajib hukumnya melakukan pembenahan dalam lembaganya. Kepolisian sebagai sebuah lembaga, perlu melakukan revitalisasi sistem koordinasi dan kepemimpinannya. Kasus-kasus yang muncul saat ini, menunjukkan lemahnya kontrol kedisiplinan dalam tubuh kepolisian.

Digerakkan Mitos

Menjelang akhir tahun, banyak orang yang mudik. Pulang kampung. Bertemu orangtua dan saudara. Mereka rela berdesakkan di kendaraan umum, atau bermacam ria di jalan raya. Semua itu, didorong oleh satu impian umum yang ada dalam benaknya, yaitu mudik ke kampung dalam rangka tahun baru.

Ada juga yang siap membongkar dompet dan celengan. Berlibur ke tempat wisata. Usahakan yang jauh. Usahakan tidak sendirian. Usahakan yang belum pernah dikunjungi. Usahakan yang bisa membuat heboh, dan bisa menjadi cerita selepas liburan panjang tahun baru. Biar orang lain, bisa dengerin, ‘aku baru liburan tahun baru lho..!’”

Banyak laku yang dikerjakan orang, di akhir tahun atau awal tahun ini. Tempat hiburan, rekreasi, atau tempat wisata, menjadi pilihan utama kalangan pemburu tahun baru.

Di lain pihak, ada juga yang “hare” atau cuek dengan pergantian tahun baru tersebut. Tahun baru, bukan sesuatu yang istimewa. Pergantian tahun baru adalah biasa. Sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Bagi mereka itu, tidak ada yang istimewa mengenai hal ini. Di malam tahun baru, kelompok yang kedua ini, biasa tidur pulas, nyaman, dan menikmati tidur hingga pagi hari tiba.

Mengapa perilaku manusia berbeda dalam menanggapi peralihan tahun ini ? mengapa ada yang menganggap peralihan tahun itu sebagai sesuatu yang istimewa ? atau bagaimana kita mengartikan keistimewaannya dari sebuah peralihan tahun ?

Bagi seorang anak sekolah, peralihan waktu yang penting itu adalah tahun pelajaran baru, atau semester baru. Hal itu terjadi, karena bagi mereka, diakhir tahun atau awal tahun, dia memiliki kesempatan merancang agenda baru dalam memperbaiki dirinya. Hasil pelajaran masa lalu sudah nyata saat ini, dan impian masa depan, dapat diawali dari rancangan awal tahun baru. Bagi dirinya, tahun baru, bukan peralihan yang penting, karena yang mengubah dirinya itu adalah peralihan semester, atau tahun pelajaran.

Seorang pejabat Negara, tahun anggaran baru adalah hal penting. Bagi mereka, perjalanan tahun sebelumnya adalah potret kinerja selama ini, dan untuk memperbaikinya yaitu pada awal tahun anggaran sekarang ini. Peralihan tahun anggaran, merupakan momentum penting dalam memperbaiki masa depan. Peralihan tahun baru, bukan hal istimewa, karena tidak memberikan imbas pada perubahan kebijakan dan strategi penyelenggaraan Negara.

Bagi seorang elit politik, akhir masa jabatan adalah masalah krusial baginya. Di akhir masa jabatan itu, perlu mempersiapkan strategi dalam menyongsong event baru dihari esok. Karena itu, peralihan jabatan adalah masalah penting dalam merancang agenda pemerintahan untuk tahun selanjutnya.

Bila dicermati dengan seksama, kita dapat mengatakan bahwa setiap orang memiliki siklus hidup dan peralihan siklus hidup. Ada siklus akademik, siklus politik, siklus anggaran, siklus hidup, dan sejenis yang lainnya. Termasuk dalam hal ini, yaitu siklus kalender astronomi (tahun masehi atau hijriah).

Setiap orang memiliki persepsi keistimewaan yang berbeda terhadap siklus-siklus tersebut. Bagi seorang pelajar, siklus akademik jauh lebih penting dibandingkan siklus politik. Sementara bagi seorang politisi, siklus politik jauh lebih perlu dicermati dibandingkan siklus akademik.

Posisi kepentingan atau urgensi dari siklus itu, kalau kita perhatikan dengan cermat, informasi itu memberikan keterangan kepada kita bahwa siklus hidup itu penting, pada saat kita memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan baru dalam memperbaiki kualitas diri. Peralihan tahun, peralihan waktu adalah penting, pada saat kita memiliki kuasa untuk mengambil keputusan, atau langkah strategi untuk memperbaiki diri.

Jika anda adalah seorang pelajar, apakah dengan tahun baru, menyebabkan kita bisa memiliki kesempatan yang lebih baik, sementara, besok ada Ujian Akhir Semester ?

Jika anda adalah seorang elit politik yang baru saja ditetapkan sebagai terdakwa apakah dengan tahun baru akan mengubah nasib menjadi bebas tanpa sarat?

Sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa Peralihan tahun, peralihan waktu adalah penting, pada saat kita memiliki kuasa untuk mengambil keputusan, atau langkah strategi untuk memperbaiki diri. Atau lebih tepatnya, sesungguhnya, siklus tahun baru itu, cenderung diisi oleh siklus bisnis atau wisata, dan bukan siklus kualitas hidup. Karena kelompok yang aktif diwilayah itulah, yang memiliki kemampuan untuk merancang strategi dan mengubah nasib di masa depannya. Para pebisnis, atau penyaji jasa komersial, momentum tahun baru adalah momentum merancang strategi dalam memasarkan produk dan memperbaiki kualitas

kinerjanya. Sementara kebanyakan lainnya, hanya menjadi pengguna jasa wisata atau bisnis saja.

Dengan kata lain, bila kita hanya bermain dan berhura-hura, dan tidak memiliki kuasa mengambil langkah strategi dalam mengisi hari esok, maka sesungguhnya perayaan yang kita lakukan saat ini, cenderung digerakkan oleh “mitos” atau angan-angan belaka ! karena pada dasarnya, kita tidak tahu apa yang bisa dilakukan esok, dan kita tidak kuasa mengubah arah gerak zaman hari esok !

“semoga ditahun baru, kita bisa lebih baik lagi..” Masbu lho?

Efek Sistemik : Pasal, Pasar, atau Nalar

Dalam mendiskusikan masalah Skandal Bank Century, ada satu istilah yang terus dipertahankan oleh (mantan) para pengambil kebijakan di masa lalu. Baik Menkeu maupun Gubernur BI pada waktu itu, tetap berpatokan dan mengacu pada asumsi mengenai 'dampak sistemik' dari kasus Century. Keyakinan pada asumsi itulah, mereka mengeluarkan kebijakan dengan cara menggelontorkan dana sebesar 6,7 T kepada bank Century, yang kemudian malah memunculkan masalah di kemudian hari.

Karena ada masalah itu jualah, kemudian DPR membentuk Pansus Century dengan maksud untuk mengusut-uraikan (bukan mengusut-ngusut) masalah yang terjadi pada Century tersebut. Anggota Legislatif, dengan membawa atasnama rakyat dan penegakkan hukum, melangkah dengan gagahnya untuk melakukan pengusutan dan penguraian masalah, dengan harapan dapat ditemukan duduk persoalannya terkait Skandar Century tersebut. Namun demikian, sampai saat ini, agenda mengusut-uraikan itu belum juga mendapat titik terang, yang terjadi malah semakin mengusut-kusut.

Bila sedikit dibandingkan, mungkin kita akan merasa senang, puas dan bangga terhadap kinerja "PANSUS" yang dibentuk Presiden dalam mengurai-kan masalah terkait Bibit-Chandra. Kurang dari 10 hari, Tim Khusus itu mampu mengeluarkan rekomendasi yang dapat menengahi dan menghentikan semrawutnya "konflik" antar aparaturnya penegak hukum. Kepuasan dan apresiasi yang dirasakan public terhadap kinerja Tim Tujuh itu, rasanya sulit untuk bisa dialamatkan kepada Pansus Century.

Salah satu kesulitan yang bisa menyebabkan mentoknya kerja Pansus ini, yaitu pada titik asumsi atau keyakinan dasar. Antara Pengambil Kebijakan (Menkeu dan BI) dengan para pengamat atau Panitia Pansus. Perbedaan itu menganga dan cenderung menjadi 'perdebatan' yang bersifat wacana. Sulit mereka menemukan indikasi yang saling menjatuhkan, namun sulit pula mereka saling meyakinkan. Karena kedua pihak hanya berdiri diatas asumsi-asumsi yang diyakininya masing-masing.

Untuk menggambarkan peta masalah ini sekiranya kita dapat meminjam istilah Jane M Jacob (2006) seorang geografer dari Universitas Edinburgh, yang membedakan antara global dan besar. Berfikir global adalah berfikir sistemik yang memetakan berbagai unsur terkait antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk satu fenomena. Sedangkan berfikir besar adalah berfikir dengan skala luas. Berfikir besar tidak mesti interkoneksi. Memikir bangsa bisa jadi adalah berfikir besar (skala nasional), tetapi bila tidak mampu memahami konteks dan interkoneksi antar persoalan yang ada dalam bangsa tersebut, sesungguhnya dia masih tetap berfikir parsial (bukan global).

Antara pengambil keputusan Century dengan Pansus (juga masyarakat umum) tampaknya ada di dua wilayah ini. Kedua kelompok ini, beradu argumen mengenai posisi Century pada satu titik dengan titik yang lainnya. Bagi Gubernur BI dan Menkeu, menganggap bahwa Century bisa berdampak sistemik (baca global) terhadap perbankan, dan mungkin jadi ekonomi nasional secara keseluruhan. Konsep sistemik inilah, yang menjadi kunci persoalan dari Century ini. Sedangkan, bagi Tim Pansus, efek dari Century tidak sistemik. Artinya, bisa jadi nasabahnya ada yang berasal dari luar negeri (baca : besar) namun tidak memiliki 'kekuatan' pengaruh terhadap sistem perbankan atau ekonomi

nasional (baca: global). Oleh karena itu, pengaruh dari Bank Century itu tidak bersifat sistemik.

Hal yang menarik lagi, mereka (Menkeu dan BI) begitu yakin dan mampu menunjukkan data-data kontekstual dan faktual yang mendukung pada kesimpulannya tersebut. Krisis finansial yang terjadi pada tataran global, dan juga pengalaman empirik Indonesia tahun 1997-an, menjadi tanggungjawab moral mereka untuk menemukan solusi praktis dalam menjaga sistem perbankan dan ekonomi nasional. Betul ada perbedaan fundamental ekonomi Indonesia antara tahun 1990-an, dengan 2000-an. Tetapi, tendensi badai krisis tetap sama kuatnya dan bahkan dianggapnya jauh lebih kompleks tahun 2000. Oleh karena itu, logika praktis dalam menghadapi efek sistemik itu perlu diantisipasi dan dicegah. Jadilah, Century harus diselamatkan !!

Ini adalah asumsi dan itulah keyakinan. Ilmu manajemen mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang harus berani mengambil keputusan. Keputusan publik seorang pemimpin dalam ukuran tertentu, bisa lahir dari sebuah intuisi. Intuisi seorang pemimpin, memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan. Pada konteks itu jugalah, konflik antara Pansus dengan BI-Menkeu itu sesungguhnya adalah konflik asumsi.

Bila pandangan ini benar (maksudnya : asumsi penulis ini benar), maka selain menguji prosedur pengambilan kebijakan yang dilakukan BI-Menkeu, Pansus pun harus bisa melakukan kajian terhadap kekokohan asumsi yang dimiliki BI-Menkeu.

Saya berkeyakinan, bila kedua pihak tidak bisa membuktikan tentang sistemik-nya efek Century, maka pembahasan skandal itu hanya akan menghabiskan dana rakyat saja. Kecermatan Pansus dalam mengurai konsep sistemik dan data sistemik itu sendiri, akan menjadi kunci dalam proses pengungkapan skandal ini.

Pada sisi lain kemudian muncul pertanyaan, mungkinkah kesalahan pengambilan keputusan dapat diadili ?

Ada beberapa hal yang harus diuji kesahihannya. *Pertama*, validitas isu atau sentimen publik yang menjadi informasi inti dalam proses pengambilan keputusan. Kegagalan kita mencermati keabsahan isu, hanya akan menyebabkan keputusan kita secara tidak sadar masuk pada pusaran rekayasa pihak pembuat sentimen. Dengan kekuatan pasar, sesungguhnya pemilik modal mampu memainkan isu atau sentimen pasar. Dan ketika kita terjebak pada isu sesaat, dan kemudian malah menganggapnya sebagai isu permanen, maka keputusan kita pada dasarnya terjebak pada pusaran pemain isu atau sentimen.

Kedua, meminjam pandangan Paul C Nutt (2005) kegagalan dalam mengambil keputusan bukan hal aneh. Hal itu sering terjadi dalam dunia bisnis. Ada beberapa jebakan kegagalan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu (a) gagal menyelesaikan klaim, (b) kegagalan mengelola tekanan akibat keputusan, (c) petunjuk yang tidak jelas, (d) keterbatasan pencarian dan tiadanya inovasi, (e) salah guna evaluasi, (f) mengabaikan masalah etis, dan terakhir (g) yaitu tidak belajar. Pada konteks inilah, pengambilan keputusan merger Bank Century dan atau pengucuran dana terhadap Bank Century dapat terjadi oleh salah satu atau akumulasi dari beberapa persoalan di atas. Hemat kata, meminjam pandangan Nutt dapat dikatakan bahwa kegagalan

dalam pengambilan keputusan adalah salah satu resiko yang dihadapi oleh seorang pebisnis, dan atau seorang pemimpin. Pengaruh yang paling nyata dari kesalahan ini, adalah kerugian secara ekonomi terhadap perusahaan/organisasi tersebut.

Ketiga, ini merupakan aspek yang paling mudah diuji, yaitu prosedur. Analisis terhadap prosedur pengambilan keputusan, adalah aspek yang dapat diadili dibandingkan dengan dua aspek sebelumnya. Kita sepakat, bila ada prosedur yang dilanggar, maka inilah sisi delik pasal yang dapat diangkat oleh tim Pansus.

Sebagai penutup, terkait dengan persoalan ini, akankah sebuah kegagalan dalam proses pengambilan keputusan diadili ? jawabannya, bila prosedur pengambilan keputusan melanggar hukum sudah jelas, dapat diproses secara hukum. Namun, bila yang terjadi itu adalah sebagaimana yang mengemuka selama ini, yaitu "perang asumsi", maka yang ada bukan pasal-pasal dalam hukum yang berbicara, namun pasar yang berbicara.

Mengacu pada tiga aspek yang dikemukakan tersebut, aspek pertama, hanya bisa diuji oleh nalar, sedangkan aspek kedua diserahkan kepada pasar. Sedangkan bila ada pelanggaran dalam aspek ketiga, maka pasal-pasal dalam KUHP-lah yang bisa berbicara. Dengan kata lain, ketika Pansus terjebak atau tidak mampu mematahkan aspek pertama dan kedua, maka tidak bisa memaksakan untuk menyeretnya kedalam tuntutan pasal-pasal, karena kedua hal itu, hanya akan diuji oleh pasar dan nalar !

EKSPEKTASI POLITIK

Di samping keunikan, keanehan, atau keajaiban fenomena kemenangan Hade di Pilkada Jawa Barat, pada dasarnya rakyat Jawa Barat telah memberikan pelajaran penting dalam menentukan pilihan politik. Perilaku yang telah ditunjukkan masyarakat Jawa Barat merupakan pilihan politik yang progresif, dinamis, serta menunjukkan sikap berharap daripada putus asa atau pesimisme dalam hidup berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat.

Bagi kelompok yang golput, sering merasakan bahwa sikap politiknya sebagai bentuk rasional terhadap apa yang ada dihadapannya. Namun dengan mencermati apa yang sedang terjadi di masyarakat Jawa Barat saat ini, kiranya dapat dirumuskan sebuah karakter dari ekspektasi politik yang positif.

Bila ada yang muda, mengapa harus yang tua. Bila ada yang masih bersemangat, mengapa harus yang sudah rempo. Bila ada yang masih bersih mengapa harus yang sudah kotor. Bila ada pemimpin baru, mengapa harus yang lama. Bila ada kader yang populer, kenapa harus yang tidak diketahui. Bila ada yang sipil, mengapa harus militer. Bila ada yang memiliki harapan mengapa harus yang sudah terhapus harapannya.

Harapan adalah satu gambaran dinamis. Bercermin pada pengalaman adalah sebuah gaya belajar yang dinamis. Memosisikan hasil yang ada, kemudian berharap pada yang baru adalah sesuatu hal yang sehat. Berkutat dengan apa yang sudah dirasakan, kendati cukup menguntungkan adalah satu sifat dari stagnasi atau kejumudan. Mencoba yang baru, mengambil inisiatif

dan berkreasi adalah cara sehat untuk melangkah pada posisi yang lebih baik.

Pada konteks inilah, budaya politik Jawa Barat saat ini mulai melangkah pada gerakan perilaku politik yang sehat. Kendati memang, masih cenderung bersifat temporer namun perilaku politik ini menjadi satu perilaku yang baik dan menarik. Bagi pemenang kompetisi politik itu sendiri, momen kemenangan dan ekspektasi ini harus tetap dipelihara secara baik. Kegagalan dalam mengelola ekspektasi dapat menyebabkan kegagalan jalannya pembaharuan di Jawa Barat.

Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan SBY-JK dapat dijadikan cerminan dalam memanfaatkan momentum. Berdasarkan polling yang dilakukan pengamat politik, keterlambatan atau gagalnya SBY-JK dalam momentum dukungan public, menyebabkan citra SBY-JK dari bulan ke bulan mengalami penurunan yang nyata. Hal serupa akan dapat terjadi pada pasangan Hade.

Berdasarkan hal ini, dukungan politik rakyat Jawa Barat merupakan modal social (social capital) dalam memobilisasi sumberdaya Jawa Barat dalam mewujudkan visi dan misi. Bukan hal yang mustahil, bila menjabat nanti, perlu ada target “100” hari membenahan Jawa Barat, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan Jawa Barat yang kondusif. Pembinaan, pencerahan, atau pemberdayaan birokrasi dengan spirit yang baru menjadi satu kebutuhan dasar untuk dijadikan katalis dalam mendukung pembangunan Jawa Barat. Meminjam istilah Renald Kasali, DNA birokrasi Jawa Barat perlu discharge ulang sehingga dapat lebih bersinar dan mendukung dalam mewujudkan visi dan misi Jawa Barat. Bila momentum dan strategi ini, gagal dilakukan, Hade akan

berhadapan dengan peta politik dan kekecewaan public yang mencuat.

Etika Berbiaya Mahal : Refleksi Akhir Tahun

Kasus Century masih terus berlanjut. Bahkan, buntut dari kasus ini belum ketahuan. Langkah politik yang diambil DPR saat ini pun, termasuk sikap politik atau tanggapan SBY terhadap kasus ini, menegaskan bahwa dirinya sebagai Presiden bertanggungjawab terhadap proses pengambilan keputusan kasus Century di masa lalu belum. Namun hal yang sudah pasti, kerugian negara, baik dari sisi material maupun immaterial sudah sangat terasa. Penanganan kasus Century ini, belum memiliki kepastian hukum dan kejelasan politik, namun dampak buruk dari situasi ini sudah sangat terasa.

Enam bulan tahun pertama, SBY-Budiono nyaris tidak luput dari hiruk pikuk dan kisruh politik dan hukum. Awal kepemimpinannya, dihangatkan oleh kasus Bibit-Chandra, dan kini kasus Century yang melibatkan Wapres Budiono (yang dulu Gubernur BI) dan Menkeu Sri Mulyani. Dalam enam bulan ini, biaya yang harus dikeluarkan dalam memecahkan masalah ini sudah sangat besar. Baik untuk membiayai Pansus Century maupun Rapat Paripurna di DPR dalam membahas hasil Pansus. Rakyat kecil berfikir, bagaimana bila dana pembahasan masalah ini untuk kepentingan pendidikan atau kesehatan rakyat ?!

Sementara di jalanan, gerakan Mahasiswa dan juga elemen masyarakat yang menuntut adanya penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa, sudah bergerak. Akibat demonstrasi tersebut, bukan saja konflik politik terjadi secara vertikal dan horisontal, namun stabilitas politik dan keamanan pun mulai terancam. Di hari kedua, saat rapat Paripurna DPR membahas

hasil Pansus Century, pasar uang meresponnya negatif. Inilah kerugian Negara yang ditimbulkan dari penanganan kasus Century ini.

Bagi masyarakat awam, kasus yang ada ini sesungguhnya hanya ada dua posisi. Satu sisi, kelompok yang mempertahankan Budiono-Sri Mulyani, dengan alasan bahwa kebijakan kedua tokoh pilar ekonomi Indonesia era SBY-JK itu tidak salah. Mereka telah melakukan kebijakan yang mengarah pada usaha penyelamatan krisis moneter saat itu. Karena ada asumsi tentang pentingnya penyelamatan bank yang potensial mengakibatkan dampak sistemik, maka kedua tokoh ini mengeluarkan kebijakan *bailout* terhadap Bank Century. Akibat dari kebijakan inilah, saat ini – demikian kata para pendukungnya—krisis keuangan di pemerintahan SBY-JK tidak terjadi di Indonesia.

Tetapi bagi para pengkritiknya, kebijakan yang diambil Gubernur BI dan Menkeu waktu itu, adalah sebuah pelanggaran dan bahkan merugikan keuangan negara. JK merupakan salah satu tokoh kunci yang menilai adanya pelanggaran kebijakan tersebut. Begitu pula auditor negara, BPK. Dalam pandangan ini, tidak ada krisis keuangan dan tidak ada dampak sistemik dari Bank Century. Hal yang ada adalah negara dirugikan dengan kebijakan *bailout* tersebut. Oleh karena itu, bagi para pendukung pandangan ini, sebagaimana tercermin dalam laporan Pansus, memandang perlu adanya tindak lanjut dalam menangani dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Mantan Gubernur BI dan Menkeu.

Dua opsi ini, kemudian mengerucut pada dua pandangan politik, yaitu (a) mempertahankan sekuat tenaga posisi Budiono dan Sri Mulyani, dan (b) memberikan kesempatan kedua pejabat itu untuk menghadapi proses hukum. Sayangnya, kedua pandangan

ini tidak memiliki kekuatan politik secara mutlak, sehingga malah melahirkan konflik politik yang berkepanjangan, dan bahkan melahirkan ‘wajah DPR’ yang tidak simpatik.

Dalam amatan sepintas, di luar pro kontranya masalah politik tersebut, sesungguhnya ada satu masalah penting yang perlu dijadikan bahan renungan bagi elit politik kita saat ini. Masalah yang dimaksudkan itu adalah masalah etika. Tampaknya, masalah inilah yang menjadikan bangsa kita ini lambat dalam menjalani proses pendewasaan berdemokrasi.

Di negara Jepang, sering terdengar ada Perdana Menteri atau Pejabat Negara yang mengundurkan diri karena dituduh melakukan pelanggaran etika dan pidana korupsi. Etika mengundurkan diri ini, memiliki nilai positif dan strategis bagi kelanjutan proses politik, proses hukum dan pembangunan bangsa. Hal yang pasti, baik proses politik, proses hukum maupun agenda pembangunan bangsa, tidak terhambat karena adanya pejabat yang ‘terbelit’ oleh masalah pribadinya. Dengan kata lain, andai harus diproses secara hukum maka pejabat yang mengundurkan diri itu, akan dapat dengan mudah mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Begitu pula dengan agenda pembangunan bangsa. Karena dengan adanya pengunduran diri dari pejabat tersebut, pejabat eksekutif akan memiliki kepastian hukum untuk mengganti dan melanjutkan estafeta pembangunan bangsa.

Hal itu akan sangat sulit diwujudkan, bila pejabat terkait tidak mengundurkan diri. Akibat sangat jelas, agenda pembangunan terhambat, psikologi politik carut marut, dan kepastian hukum serta kepastian politik menjadi silang sengkarut, sebagaimana

yang teralami bangsa Indonesia dalam 6 bulan pertama Pemerintahan SBY-Budiono.

Pada konteks inilah, saya mengusulkan, dan mengajak kepada elit negara ini, kiranya perlu kita membiasakan diri membangun etika politik yang berbiaya murah. Murah dalam proses pencapaian, namun memiliki agenda kebangsaan dan kenegarawanan yang sangat berharga.

Apa yang terjadi selama ini, hanya karena alasan untuk mempertahankan asumsi kepastian hukum, bangsa ini, rakyat ini, dan agenda pembangunan ini harus dibiarkan mengambang tanpa ada penangan dari para pemimpinnya secara sempurna. Memang benar, di saat kasus ini dibahas pun, para menteri dan Wapres sekalipun masih tetap menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Namun, psikologi kerja yang dimiliki orang yang tidak bermasalah (baik secara hukum ataupun politik) akan jauh lebih fresh dan jauh lebih orisinal dibandingkan dengan orang yang tengah banyak digunjingkan orang.

Hukum menjadi panglima adalah penting. Namun menjalankan hukum secara etis dan efektif, itu jauh lebih penting lagi. Karena mengutamakan hukum di saat kita tidak menemukan jalan yang efektif, hanya akan menghabiskan biaya hidup, baik secara ekonomi, politik maupun psikologi sangat mahal. Dalam konteks ini pulalah, Pledoi SBY adalah pledoi berbiaya mahal. Adnan Buyung Nasution sempat berpendapat, bila pidato itu disampaikan jauh sebelum Pansus Century bergulir kejadian tidak akan seperti hari ini. Bahkan, bila pledoi itu disampaikan jauh sebelum Pansus bergulir maka biaya politik tidak semahal. Bahkan, ada dugaan penyelenggaraan Pansus itu (secara ekonomi) mampu menghabiskan dana Rp. 5 M.

Terkait dengan hal tersebut, bisakah kita, seluruh elemen politik bangsa ini, memulai untuk mengembangkan etika politik dan atau strategi politik (lebih luasnya strategi pembangunan bangsa) yang berbiaya murah, tetapi mampu mensejahterakan rakyat ?

PEJABAT MARAH : DESAKRALISASI STATUS SOSIAL

Pejabat marah. Istri pejabat marah. Adalah berita yang kerap disaksikan, atau dibaca dalam media massa kita kali ini. Fenomena pejabat marah itu, dapat disaksikan dalam ragam bentuk tindakan. Ada yang marah-marrah di atas mimbar, dihadapan konstituennya. Ada pula yang marah-marrah di media jejaring sosial. Selain itu, ada pula pejabat yang marah-marrah, karena wartawan banyak bertanya-tanya mengenai berbagai hal yang cenderung dianggapnya sebagai masalah pribadi, dan bukan kasus yang tengah dijadikan konsumsi publik saat itu.

Mengapa hal itu terjadi, dan apa yang sedang terjadi pada pribadi pejabat kita ? mengapa mereka marah-marrah ? untuk menganalisis masalah seperti ini, kiranya, kita dapat mengawali penjelajahan fenomena ini dari kasus marah-marahnya pejabat atau istri pejabat di instagram atau di media jejaring sosial.

Sebagaimana diketahui bersama, media jejaring sosial merupakan media komunikasi modern. Status media ini, sampai sekarang masih 'kabur'. Satu sisi, sebagai media yang memiliki nilai pribadi, dan sisi lain, mengandung nilai publik. Dengan hadirnya media jejaring sosial ini, setiap orang bisa curhat, atau pun mengekspresikan pandangan dan masalah pribadinya.

Pada saat media, dijadikan sebagai sarana media ekspresi pribadi, sesungguhnya orang dimaksud sedang memosisikan media sebagai masalah pribadi dan media pribadi. Tetapi dalam waktu bersamaan, media itu pun malah dijadikan sarana untuk berkomunikasi dan membangun sosialitas di lingkungannya. Kategori yang kedua ini, maka media sudah berubah, dari

masalah pribadi dan menjadi ruang pribadi, menjadi masalah sosial dan membentuk ruang publik. Bahkan, selanjutnya, siapapun kita memiliki peluang untuk bisa mengaskesnya, termasuk memberikan komentar terhadapnya.

Irisan dan singgungan dua ruang-hidup itulah, kemudian menyebabkan kaburnya batasan antara ruang pribadi dan ruang publik. Bahkan, dari sisi ini, kita dapat menyebutnya ada indikasi desakralisasi status sosial. Seorang warga, tanpa dipengaruhi latar belakang dan status sosialnya, dapat berkomunikasi dengan rekanan media jejaring sosialnya lainnya. Tidak mengherankan, bila kemudian seorang ibu negara pun, bisa berkomunikasi dan (bisa dikomentari) oleh seorang pedagang asongan di pinggir jalan. Itulah fenomena desakralisasi status sosial.

Kematangan dan kesiapan mental individu, akan memberikan pengaruh nyata dalam merespon pola komunikasi dan interaksi tersebut. Di wilayah ini, lahir sebuah wilayah 'abu-abu', sebuah wilayah yang membentuk wilayah-ruang-baru, dengan status-sosial individu yang baru. Bahkan, kalau kita meminjam istilah George Ritzer (2002), dan mengembangkann teori tersebut, kita menemukan informasi bahwa media jejaring sosial itu, menyebabkan manusia tidak berinteraksi dengan status sosial.

Saat saya mengomentari sebuah status seseorang, yang ada pada sebuah media jejaring sosial, sesungguhnya, kita sudah tidak memperhatikan status sosial kita, dan status sosial mereka. Setiap para pengguna media sosial, secara umum sudah menganggap bahwa siapapun pengguna media jejaring sosial, memiliki hak yang sama, dan peluang yang sama untuk membuat status, memberikan komentar, dan dikomentari. Pada konteks itulah, media sosial pada dasarnya sudah membentuk satu fenomena

baru yang disebut berinteraksi bukan dengan status sosial (*non-status*).

Seorang pengguna media jejaring sosial, yang kurang memiliki kedewasaan psikologis atau kematangan emosi, akan mengalami 'goncangan peran' dalam dirinya. Satu sisi, dirinya merasa sebagai seorang pejabat, tetapi pada sisi lain, dia terdegradasi statusnya di media jejaring sosial. Ketidakmampuan dalam menjaga keseimbangan peran di media jejaring itu, kemudian akan melahirkan tindakan emosional. Pada konteks itulah, kita dapat melihat bahwa marah-marahnya pejabat di media jejaring sosial, adalah bentuk dari kegamangan psikologis pejabat, terhadap peran dan status sosialnya. Pejabat tersebut, mengalami 'goncangan peran' dalam dirinya, dan kemudian melahirkan tindakan yang tidak sesuai dengan konteksnya. Sementara publiknya sendiri, melihat orang yang masuk ke wilayah media jejaring sosial, akan diposisikan sebagai 'orang yang sama atau sederajat'.

Dari sisi lain, hal ini menggambarkan, desakralisasi status sosial ini, mengantarkan kita pada analisis bahwa konteks media sosial tersebut dan/atau zaman sekarang ini, tengah terjadi 'persinggungan antara keakuan status feodalistik dengan status egalitariani'. Seorang pejabat yang gila status, akan mudah tersinggung bila berhadapan dengan perilaku masyarakat yang dianggapnya kurang menghargai status sosialnya. Seorang istri pejabat yang feodalistik, akan merasa jauh lebih berharga dibandingkan seluruh bawahan suaminya. Jabatan suami, merasa menjadi jabatan-sosial bagi dirinya sendiri.

Karena itu, alangkah lucunya, bila sekarang ini, kerap melihat seorang istri pejabat marah-marah kepada rakyat, atau kepada

bawahan suaminya. Sementara, sang rakyat sendiri, memandang bahwa orang yang menjadi atasan dirinya, atau yang menjadi pejabat publik itu adalah suami sang istri tersebut. Bahkan, masyarakat kerap melihat sang istri, jauh lebih lebih galak dibandingkan suaminya itu sendiri.

Fenomena itulah, yang saya sebut sebagai fenomena desakralisasi status sosial, dan bercampurnya ruang publik dan ruang pribadi, sehingga menyebabkan hilangnya batasan ruang-publik. Kondisi ini, akan terus berlanjut, seiring dengan arah perkembangan peradaban masyarakat, bangsa dan negara kita.

Bagaimana, bila kemudian, marah-marah itu terjadi kepada wartawan, saat meminta konfirmasi mengenai sesuatu hal kepada pejabat tersebut ? masalah ini pun, perlu diposisikan dari batasan mengenai ruang-publik. Wartawan dan/atau rakyat pada umumnya, menganggap pertanyaan mengenai 'istri simpanan', atau 'rumah pribadi yang belum diketahui', adalah masalah yang perlu diketahui publik. Sementara sang pejabat, menganggapnya sebagai sesuatu yang bersifat pribadi. Singgungan ruang yang bias itulah, yang kemudian menyebabkan adanya ketersinggungan pejabat negara oleh kalangan jurnalis, dan kemudian menyebabkan mereka mereaksinya dengan marah-marah.

Hal yang memang memprihatinkan kita saat ini, ada dua arus yang berbeda, yang tengah terjadi saat ini, satu sisi ada yang merasa perlunya publikasi masalah pribadi, dan ada yang tetap merasa pentingnya untuk melindungi hak pribadi. Inilah nilai-nilai yang tengah terjadi di tengah masyarakat kita saat ini. Kegagalan dalam memberikan penjelasan dan pembatasan masalah ini, akan terus menyebabkan goncangan psikologi masyarakat, dalam

mengartikan diri, dan status diri, serta pola interaksi dengan yang lainnya.

FINALISASI AGENDA NEGARA

Bagaimana kita bisa melakukan pembangunan, bila tidak ada pijakan yang kokoh ? itulah pertanyaan dasar yang perlu kita jawab bersama. Bangunan apapun, dan seberapa besarnya bangunan tersebut, tentulah harus memiliki pijakan atau fondasi yang kuat untuk menopangnya. Tidak ada bangunan yang tidak memiliki fondasi. Dan tidak ada bangunan yang kokoh tanpa fondasi yang kuat.

Negara sebagai sebuah bangunan, dan proses pembangunan sebagai proses menjadi (*to be*) merupakan aksi-aksi kemanusiaan dan kebangsaan yang tidak bisa berdiri sendiri. Kehadiran kedua hal tersebut, mempersyaratkan adanya fondasi bangunan yang seiring sejalan dengan agenda pembangunan tersebut. Meminjam istilah Marx, di sinilah fondasi bangunan dasar (*infrastruktur*) dengan bangunan atas (*suprastruktur*) menjadi penting untuk diperhatikan secara seksama.

Rapuhnya agenda pembangunan di negeri kita ini, bisa jadi disebabkan karena fondasi kebangsaan dan kenegaraan yang tidak kuat dan kokoh. Fondasi kebangsaan yang tidak mengakar pada realitas nilai dan budaya kebangsaan. Spirit pembangunan yang dikembangkan, tidak mengacu dan tidak selaras dengan nilai-nilai kebangsaan yang tumbuhkembang di masyarakat. Sehingga tidak heran, bila kemudian menyebabkan adanya benturan yang berkepanjangan, dan terus menggoyahkan bangunan kebangsaan dan kenegaraan itu sendiri.

Ada satu hal penting yang perlu kita bicarakan di sini. Yaitu finalisasi fondasi kenegaraan dan kebangsaan. Untuk fondasi

kebangsaan ini, kita harus memiliki satu kesepakatan dan kesepahaman yang dapat dijadikan fondasi kenegaraan. Banyak pilihan mengenai fondasi kenegaraan ini, diantaranya adalah republik, komunisme, monarki dan atau federalism. Semua itu, telah menjadi bagian dari sejarah dan menjadi fakta kenegaraan. Apapun bentuknya, semua hal itu telah menunjukkan eksistensinya sendiri-sendiri.

Sampai wacana ini ditulis, Indonesia sendiri telah memosisikan diri sebagai Negara Kesatuan berbentuk Republik. Setidaknya itulah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Realitas formal ini, perlu disatukan dengan realitas politik dan ideologis dari setiap elemen bangsa. Artinya, statement ini telah menjadi sebuah pernyataan politik dan perlu diapresiasi sebagai posisi final, sampai UUD 1945 di amandemen.

Finalisasi bentuk Negara itu, terus berlanjut dan harus terus dilanjutkan kepada aspek-aspek lainnya. Diantara yang sudah sampai pada titik final itu, adalah Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Ketiga aspek ini (NKRI, Pembukaan UUD 1945, Pancasila) merupakan hasil finalisasi kenegaraan bangsa Indonesia.

Dalam ingatan saya, Umat Islam di masa lalu, sejak berdirinya Orde Baru, khususnya Nurchalish Madjid (alm) dan Koentowidjoyo (alm), telah menegaskan diri dalam memfinalisasi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Finalisasi Pancasila sebagai dasar Negara ini, setidaknya adalah bentuk kesadaran kebangsaan umat Islam Indonesia terhadap nasib bangsa dan Negara ini. Pada titik inilah, finalisasi itu dapat dijadikan sebagai modal politik (*political capital*) bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pembangunan dan pewujudan kesejahteraan rakyat.

Pada bagian lain, kita melihat ada sejumlah bangsa dan Negara yang telah melakukan finalisasi nilai-nilai kebangsaannya. Yang dimaksud dengan nilai-nilai kebangsaan itu, adalah identitas-budaya bangsa. Ada Negara yang berkembang dengan identitas kebangsaan yang monarkhi konstitusionalnya, seperti Jepang, Inggris, Belanda, dan Malaysia. Negara-negara ini sudah memantapkan posisi kebangsaannya sebagai bangsa yang mengembangkan nilai-nilai monarkhis, tetapi konstitusional. Sementara Australia dan Amerika Serikat memantapkan diri sebagai Negara liberal.

Dalam konteks ini, nilai kebangsaan dimaksudkan untuk menggambarkan nilai-nilai budaya kebangsaan yang dijadikan acuan dan landasan hidup bangsanya. Bagi Negara AS dan Australia misalnya, liberalism adalah prinsip dasar yang dalam membangun kehidupan bangsa dan Negara. Begitu pula di Jerman dan Belanda.

Mereka mengambil posisi nilai kebangsaan liberalism itu, atau Jepang dengan monarkhi konstitusionalnya, pada dasarnya lebih mengacu pada kecenderungan nilai-nilai budaya yang tumbuh dimasyarakat. Dengan kata lain, nilai kebangsaan itu akan kuat dan kokoh bila digali dan dikembangkan dari akar budaya bangsanya itu sendiri. Pada konteks itulah, Soekarno memosisikan pandangannya bahwa Kebudayaan Nasional Indonesia itu adalah kepribadian Indonesia.

Akar budaya dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat, adalah modal kebangsaan (*nation capital*) yang memiliki energy besar dalam menata dan membangun bangsa ke depan. Kealpaan kita dalam memahami hal ini, bukan saja akan menjadi penyebab awal gagalnya agenda pembangunan nasional,

juga akan rapuhnya fondasi kebangsaan dan kenegaraan bangsa ini.

Sekedar contoh. Energi kita habis dan terbuang percuma hanya untuk membicarakan masalah 'keistimewaan' sebuah daerah (misalnya DIY). Bila bangsa ini, melihat dan memaknai realitas kebangsaan di Negara lain (baca : bentuk monarkhi) dan juga mengapresiasi akar-akar budayanya sendiri, sejatinya kita tidak perlu mementahkan struktur dan model pemerintahan daerah. Cina adalah Negara yang menerapkan system dual-sistem (khususnya di Hongkong). Kemudian, Negara monarkhi pun banyak berdiri dengan maju dan makmur di berbagai daerah. Dengan kata lain, pada dasarnya, penghormatan kepada akar budaya sejatinya dapat dijadikan sebagai model finalisasi kebangsaan.

Energy kebangsaan ini, habis untuk berbicara dan membongkar pasang sesuatu yang sejatinya dapat dijadikan sebagai fondasi kebangsaan. Sementara nilai-nilai yang merusak fondasi kebangsaan, malah dibiarkan untuk 'membentuk-membangun' rumahnya sendiri. System Mafioso adalah system-nilai yang sedang membentuk-membangun "rumahnya" sendiri, dan kini nilai ini kian menjadi tatanan nilai yang merasuk pada setiap sumsum kebangsaan ini. Kasat mata tetapi sulit diruntuhkan !

Pada konteks ini, saya melihat bahwa KITA (bangsa Indonesia ini), harus segera melakukan konvensi nasional dalam melakukan finalisasi fondasi kebangsaan dan kenegaraan ini. Finalisasi kebangsaan ini, selain dijadikan '*sense of nation*' (jiwa kebangsaan) atau spirit kebangsaan, juga menjadi modal kebangsaan untuk melangkah ke depan. Istilah finalisasi itu perlu dimaknai dua sisi, ke dalam yaitu penguatan identitas diri, dan ke

luar yaitu rehabilitasi nilai-nilai yang merusak pada tatanan kebangsaan. Fondasi kebangsaan itu, tidak dimaksudkan untuk mengarahkan Negara ini pada absolutism (tirani modern), melainkan diarahkan untuk dijadikan sebagai dasar-dasar kebangsaan dalam membangun masa depan.

Kita melihat, bahwa sebagai bangsa besar, yang berharap menjadi besar, sudah saatnya –untuk tidak menyebut terlambat– untuk berbicara mengenai finalisasi kebangsaan dan kenegaraan ini. Sebagai bangsa yang besar, kita butuh dan perlu menetapkan agenda-agenda besar Negara.

Dalam agenda filosofik, memang ada yang disebut sebagai proses menjadi (*to be becoming*). Negara adalah bagian dari proses menjadi. Karena proses menjadi itulah, maka setiap saat, setiap detik, dan setiap waktunya adalah bagian dari proses usaha warga negaranya untuk membangun dan mengokohkan kebangsaan dan kenegaraan. Hal itu, akan berbeda dengan Negara yang bersifat otoritarianis, yang memosisikan dirinya sebagai Negara yang sudah final, dan absolute tidak akan mengalami perubahan kembali. Finalisasi agenda Negara ini, selain menjadi fondasi Negara dalam menata dan membangun bangsa ke depan.

PARADOKSI HALAL BI HALAL

Bila dilihat dari proses sosialnya, kegiatan *halal bi halal* merupakan usaha sadar kaum muslim untuk memantapkan, menguatkan atau menyisir ulang berbagai hal yang belum dilaksanakan pada bulan suci ramadhan. Sehingga, istilah yang digunakan para pendahulu bangsa ini, kegiatan shilaturahmi di bulan syawal, khususnya selepas pelaksanaan hari kesucian (*idul fitri*), mereka mengadakan kegiatan *halal bi halal*.

Bila kaum muslimin berpuasa dengan penuh ikhlas (*imanan wahtisaban*), maka Allah Swt akan mengampuni seluruh dosa yang pernah dilakukannya sebelumnya. Janji Allah Swt ini menunjukkan ciri bahwa seorang muslim yang sudah berpuasa akan menjadi orang yang bersih (*fitri*). Namun secara teologi diyakini bahwa kesucian ini sangat kondisional. Karena amalan ramadhan seorang muslim akan bergantung di langit sampai orang tersebut menunaikan penyucian diri melalui hartanya (*zakat fitrah*). Sehingga pada akhirnya status seorang muslim itu dapat meraih derajat bersih di hari kesucian (*idul fitri*).

Dalam waktu satu bulan itu, kesucian seorang muslim dilalui dalam dua tahapan, yaitu *tahapan penyucian diri oleh amal shaleh* yaitu melalui ibadah puasa dan tarawih, dan *tahapan penyucian diri oleh dan untuk harta* yaitu melalui bayar zakat. Dengan rangkaian amalan inilah, seseorang akan mendapatkan derajat kesucian di hari suci (*idul fitri*).

Cukupkah kesucian seorang muslim ini diukur oleh kedua hal tersebut ? secara normatif, ternyata tidak cukup. Karena pada

rujukan lain, ditemukan bahwa Islam memberikan keterangan lain yang lebih luas.

Dalam pemahaman kaum muslim, diketahui bahwa ampunan Allah Swt bergantung pada jenis dosa atau kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan akibat pelanggaran terhadap perintah Allah secara langsung, maka dia harus memohon ampun kepada Allah Swt. Sedangkan kesalahan akibat adanya pelanggaran terhadap masalah *mu'amalah* (pergaulan dengan sesama), maka selain memohon ampun kepada Allah, dia pun dituntut untuk minta maaf kepada sesama manusia. Pada konteks inilah, maka untuk memantapkan, menguatkan atau menyisir ulang berbagai hal yang belum dilaksanakan pada bulan suci ramadhan, seorang berkewajiban untuk saling memaafkan dengan sesama kaum muslimin, atau sesama warga masyarakat yang lainnya.

Bila ditelaah ulang, prosesi saling memaafkan yang dilakukan kaum muslimin dilakukan oleh orang yang sudah sama-sama suci (*fitri*). Hal selaras dengan proses ibadah yang dilakukan sebelumnya, yaitu proses penyucian diri melalui puasa dan zakat. Sementara selepas idul fitri, mereka kemudian saling menyucikan diri dengan sesama warga muslim. Peristiwa itu merupakan proses timbal balik saling menyucikan antara sesama muslim yang baru saja meraih derajat kefitrian. Hemat kata, pada wilayah inilah, makna *halal bihalal* menjadi sangat bermakna.

Mengapa *halal bihalal* ? ada beberapa makna sosial yang dapat dikembangkan dari konsep sosial-keagamaan ini.

Pertama, shilaturahmi dan saling memaafkan selepas ramadhan adalah usaha memantapkan, menguatkan atau menyisir ulang berbagai kesalahan yang belum terhapus oleh pengampunan Ilahi

dan zakat. Kategori kesalahan ini, yaitu jenis kesalahan yang dilakukan kepada sesama manusia. Maka untuk mendapatkan ampunan Allah, seorang muslim harus mohon maaf di bulan suci kepada sesama kaum muslim yang sudah mendapatkan kefitrian jua. Inilah halal bihalal, saling memaafkan kepada sesama anggota masyarakat.

Kedua, memberi maaf kepada orang yang baru saja keluar dari kefitrian adalah menyucikan orang suci atau mengagungkan orang agung. Seorang muslim terlarang untuk menghinakan orang fitri atau merendahkan orang lain. Menghormati orang terhormat adalah sebuah kewajiban, dan menghormati orang rendah adalah sebuah kemuliaan. Halal bihalal adalah bentuk menghormati orang terhormat, mengagungkan orang agung, dan menyucikan orang suci (memfitrikan orang fitri), atau menghalalkan sesuatu hal yang halal. Tidak boleh terbalik. Seorang muslim dan setiap manusia, tidak boleh menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal seenaknya sendiri.

Ketiga, andaipun ada orang yang mengatakan bahwa secara bahasa, istilah 'halal bihalal' itu tidak tepat (atau tidak logis), namun secara hakikiah dan sosial, praktek ini memiliki peran penting bagi usaha peningkatan kualitas dan kompetensi diri kita semua. Dalam bahasa konotasi (kiasan) atau sindiran, banyak hal yang dilakukan dengan cara paradoks seperti ini. Sejumlah kritik sering kali kita dengar mengenai paradoks perilaku kita. Seorang politisi seperti pebisnis, seorang pebisnis seperti politisi, seorang sipil seperti militer, seorang militer seperti sipil, seorang nasionalis seperti penjajah, seorang penjajah berlagak nasionalis, seorang pemimpin berlaku budak, seorang anggota bergaya pemimpin, seorang pembela rakyat menjual aset negara dan lain sebagainya.

Carut-marut perilaku budaya ini menyebabkan tidak jalannya usaha membangun karakter bangsa (*national character*) di Indonesia. Bangsa ini, mengalami kesulitan menemukan figur yang benar-benar menunjukkan karakter sebagai figur sesuai dengan status sosial-politiknya. Hal ini terjadi, karena pada satu sisi si pelaku sudah merasa benar (bahkan merasa paling benar), dan publik (*civil society*) belum mampu memainkan peran secara maksimal. Oleh karena itu, terhadap fenomena ini muncul satu kebutuhan bahwa "Kita perlu mengagamakan kembali orang beragama, mengislamkan kembali orang islam, mengindonesiakan kembali orang Indonesia, menyundakan kembali orang sunda, memuhammadiyahkan orang Muhammadiyah, meng-Nu-kan kembali orang NU, menasioanalisasikan orang nasionalis" dan lain sebagainya.

Idiom paradoks ini seolah tidak logis. Bagi mereka yang egois dan merasa benar, adalah satu ketidaklogisan untuk melakukan sesuatu terhadap sesuatu. Padahal, dibalik keparadokkannya itulah, terkandung nilai-nilai kebenaran. Karena sesungguhnya dibalik keparadokkannya tersebut terkandung satu kebutuhan bahwa kita perlu melakukan koreksi ulang terhadap status yang kita sandang hari ini. Kita sebagai pendidik, akademisi, politisi, ekonom, tokoh agama atau warga negara Indonesia pada umumnya akan berhadapan dengan pertanyaan yang sama, yakni apakah kita sudah mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan status yang dimilikinya tersebut ? bila tidak, maka dalam konteks ini, semangat dan prinsip *halal bihalal* perlu dilakukan. Artinya, secara nasional, kita perlu melakukan koreksi total terhadap perilaku dan budaya kita selama ini, untuk kemudian dikembalikan pada nilai-nilai asasi yang dikandungnya.

Akhirnya, sebagai penutup, *halal bihalal* adalah upaya sadar kita bahwa bila kita ingin dimaafkan oleh lingkungan maka harus memaafkan lingkungan. Bila kita ingin mendapat penghargaan dari orang lain maka harus menghargai orang lain. Bila kita ingin lingkungan kita pada diri kita, kita pun harus damai dengan lingkungan. Bila kita ingin dihargai sesuai status kita, maka kita harus menunjukkan sikap sesuai status kita. Bila belum sampai ke arah sana, mari kita bersama-sama untuk berhalal-bihalal. Menggurukan kita sebagai guru, mensiswakan siswa sebagai siswa, dan mewarganegarakan keindonesiaan kita sebagai warga Indonesia, dan mengislamkan kita sebagai seorang muslim, mengagamakan kita sebagai orang beragama. Tidak lebih dari itu. Sekali lagi perlu ditegaskan, bahwa kekeliruan kita selama ini sering kali menunjukkan sikap yang salah kaprah. Status guru seperti anak-anak, status anggota mirip pemimpin, status pemimpin seperti budak. Terhadap perilaku itu, sekali lagi kita harus mengatakan, mari kita saling *berhalal-bihalal*.

Keegoisan yang dimilikinya kadang menjadi penghalang untuk melakukan "*halal-bihalal*". Merasa diri sudah berada pada *track*-nya, dia bersikeras dalam bersikap dan berperilaku, sehingga pada akhirnya melahirkan kekerasan politik, kekerasan ekonomi, kekerasan budaya atau bentuk kekerasan struktural lainnya. Sementara, keterbukaan diri untuk melakukan "*halal bihalal*" akan menjadi ruang terbuka bagi seseorang untuk melakukan koreksi terhadap dirinya, dan berbuat adil pada sesama. Halal bihalal adalah upaya sikap adil diri kita terhadap diri, lingkungan, sesama dan Tuhannya sendiri.

Wallahu alam bi showwab.

Hijrah Tanpa Kepastian Hukum

Sri Mulyani, Menkeu, hijrah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sebagian orang mengatakan itu adalah kehormatan. Sebagian lagi menyatakan itu adalah sebuah rekayasa politik. Sebagian lagi mengatakan ini adalah awal dalam membangun politik Indonesia yang sejuk, dan sisi lain mengatakan ini adalah pintu awal jebolnya ketahanan politik istana. Mba Ani adalah figur menteri yang menjadi bahan pembicaraan. Bukan saja, karena beliau itu cerdas namun kebijakan keuangan yang diberlakukannya memancing kontroversial, begitu pula dengan rencananya memenuhi tawaran dari Bank Dunia untuk menjadi orang nomor 2 dalam organisasi keuangan dunia tersebut.

Sri Mulyani Indrawati lahir di Tanjungkarang, Lampung, 26 Agustus 1962. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Ia kemudian dipercaya oleh Presiden SBY untuk menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Pada 5 Desember 2005 ketika Presiden SBY mengumumkan perombakan (Reshuffle) kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Pada KIB Jilid II, Sri Mulyani pun dikukuhkan untuk tetap menduduki posisi sebagai Menkeu. Dalam posisinya sebagai Menkeu inilah, kemudian memancing kontroversi sekaligus menyeretnya pada ranah politik dan ranah hukum. Kasus Bank Century, dan juga persoalan reformasi birokrasi lembaga perpajakan, menjadi kebijakan kontroversial selama Sri Mulyani. Setelah masuk pada pusaran politis dan

hukum, kini beliau hendak hijrah dan menjadi pejabat keuangan internasional.

Bagaimana imbas terhadap kultur politik di Indonesia ? adakah persoalan ini memberikan gambaran positif bagi bangsa Indonesia ataukah akan menjadi bagian krusial bagi bangsa Indonesia ? Dalam konteks inilah, wacana ini ingin mengambil posisi sebagai bentuk kewaspadaan politis terhadap apa yang potensial terjadi di masa depan. Karena apa yang terjadi pada intern bangsa ini, tidak bisa melepaskan diri dari dinamika global, dan begitu pula sebaliknya.

Aspek yang paling sensitif sesungguhnya lebih pada titik belum jelasnya status hukum Menkeu KIB Jilid II ini. Sebagai presiden, SBY sering menyarankan bahwa kasus Century ini harus dibuka sejelas-jelasnya atau seterang-terangnya. Namun, ketika kasus ini bergulir dan berada pada bagian akhir, endingnya malah menjadi buram bahkan semakin membeku. Hijrahnya Sri Mulyani ke Bank Dunia akan menjadi sulit menegakkan kejelasan dan kepastian hukum di Indonesia.

Presiden Republik Indonesia hendaknya mengambil sikap politik terhadap masalah hukum (dan kehormatan bangsa) terkait dengan Sri Mulyani Indrawati. Artinya, bila memang peluang menjadi pejabat keuangan internasional itu adalah bagian dari kehormatan bangsa, maka tegaskan dan putuskan status hukum (dan politik) pribadi Sri Mulyani ini. Presiden sudah saatnya, mengambil jalan tegas. Karena berlarutnya masalah ini, selain menjadi biaya politik semakin mahal (*social cost*), juga tidak jelasnya proses penegakkan hukum di Indonesia.

Tidak bermaksud untuk mendahului kepastian sosiologis di masa depan, namun ini akan menjadi preseden buruk bila Pemerintah tidak bertindak dengan tegas. Presiden Republik Indonesia harus memberikan kepastian hukum terlebih dulu kepada masalah hukum yang membelit Sri Mulyani (juga Budiono). Publik dan DPR, secara ril politik telah memposisikan Menkeu dan Mantan Gubernur BI sebagai orang yang harus berhadapan dengan hukum, dan menjalani proses hukum. Ini ril politik.

Kendati kita belum tahu ujung dari proses hukum tersebut, apakah kedua pejabat negara tersebut bersalah atau tidak, namun bila tidak ada kepastian hukum, maka akan menjadi preseden buruk bagi masa depan hukum di negeri ini. Oleh karena itu, sekali lagi perlu ditegaskan, bila tidak dikeluarkan kebijakan politik dari Presiden, maka ada dua catatan buruk terhadap ketegasan politik negeri ini, yaitu (1) mengizinkan orang yang tengah berhadapan dengan hukum pergi ke luar negeri, dan (2) membiarkan orang bermasalah dengan hukum menjadi pejabat dunia.

Kelanjutan dari itu semua, rakyat telah banyak mencatat beberapa modus oknum yang sedang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Kalau tidak sakit permanen, maka dia akan melakukan lawatan ke luar negeri permanen. Dengan strategi inilah, yang kemudian menyebabkan penegak hukum di Indonesia tidak mampu menjamah dan menuntaskannya. Apakah dengan cara seperti ini, menjadi pejabat dunia adalah cara baru dalam menghindari dan atau menutup masalah hukum di negeri ini ?

Sebenarnya bukan hal baru, kalau di sebutkan Sri Mulyani menjadi pejabat keuangan di tingkat dunia. Sebelumnya, dia pernah menjadi Konsultan di USAid, serta Executif Director IMF.

Sebagaimana diketahui bersama, pada awal Oktober 2002, Sri Mulyani terpilih menjadi Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group). Sejak 1 November 2002, ia mewakili 12 negara anggota SEA Group di IMF. Tugasnya sebagai executive director terkait dengan pengambilan keputusan. Untuk menentukan berbagai program dan keputusan yang harus diambil IMF. Jadi ia tidak hanya mewakili kepentingan Indonesia, namun mewakili kepentingan negara-negara anggota di lembaga IMF maupun forum internasional yang relevan

Dengan demikian, karir dan kualifikasi beliau di lembaga internasional tersebut sudah lama di kenal dunia. Oleh karena itu, dengan kembalinya Mba Ani ke lembaga keuangan internasional kian memperteguh kompetensi yang dimilikinya, sekaligus memperkuat visi dan misinya sebagai bagian penting dari orang yang mampu 'merekayasa' keuangan global sebagaimana yang menjadi visi dan misi Bank Dunia atau IMF.

Dalam mengakhiri tulisan saya teringat analisis William Liddle. Ketika dia mengulas tentang demokratisasi di Indonesia, Liddle (2005:78-81) dengan meminjam pandangan dari Thomas Friedman mengenai hubungan antara proses demokratisasi Negara berkembang dengan dinamika politik global. Friedman melihat bahwa revolusi di Asia Timur, dan Liddle melihat kasus di Indonesia. Namun, pada titik kesimpulannya, ada irisan pemikiran yang sama, yaitu kedua analis itu mengemukakan ada indikasi bahwa demokratisasi negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur atau revolusi di Indonesia adalah revolusi dari luar. Kendati kita tidak sepakat seluruhnya dengan kedua analis tersebut, namun ide bahwa adanya peran dunia global dalam mempengaruhi dinamika politik di Indonesia patut menjadi

catatan penting. Termasuk dalam memahami kasus hijrahnya Menkeu ini.

Meminjam masalah ini, jangan sampai demokratisasi di negeri kita ini, disebutnya sebagai revolusi dari luar, dan penegakkan hukumpun adalah penegakkan hukum dari luar. Tatanan global yang cukup berkuasa dalam menghitamputihkan politik dan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, sebagian publik tetap mengatakan bahwa Sri Mulyani masih memiliki pekerjaan rumah di dalam negeri. Bagkan persoalannya pun sudah berada pada kawasan politik dan ranah hukum. Sejatinya, bila masalah ini tidak diselesaikan dulu, masalah ini akan menjadi masalah krusial bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia. Hemat kata, *menjadi pejabat internasional adalah sebuah kehormatan, tetapi kepastian hukum adalah kehormatan termulia*. Oleh karena itu, berikan kepastian hukum kepada orang yang memang pantas untuk mendapatkannya.

INDEKS KETAHANAN INFRASTRUKTUR

Musim hujan mulai rutin terjadi. Bahaya dan peristiwa banjir, sudah menjadi berita harian di media massa. Ikhtiar pemda, termasuk diantara menebang pohon di pinggir jalan, dan atau pengerukan sungai, pun sudah dilakukan banyak pemda. Tetapi, ada satu hal lain, kiranya yang belum banyak diperhatikan banyak kalangan, yaitu indeks ketahanan infrastruktur.

Bencana Situ Gintung – Cireundeu Tangerang– Banten (2009) adalah satu dari sekian kasus runtuhnya infrastuktur sarana umum dan pelayanan public di Indonesia. Selain kasus ini, kita pernah mendapat informasi longsornya tempat pembuangan sampah (misal Leuwigajah – Cimahi, dan Lembang – Bandung), jembatan, rusaknya jalur keretapi dan lain sebagainya. Selain itu, gagal landasnya pesawat terbang, merupakan contoh lain mengenai contoh tentang buruknya infrastruktur sarana umum dan pelayanan public di Indonesia.

Dalam kesehariannya, Situ Gintung adalah salah satu daerah wisata di daerah perbatasan Jakarta – Banten. Sebagai sebuah sarana public atau fasilitas rekreasi public, sudah tentu harus memberikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Keamanan dan kenyamanan itu salah satunya bisa didapat jika kita mendapatkan informasi mengenai cek kelayakan sarana public. Sebuah pesawat terbang dan atau kereta api, sebelum digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat harus menjalani cek kelayakan jalan, tanpa ada pengecekan kelayakan

jalan, dapat kita sebut sebagai bagian dari ketidakprimaannya pelayanan dari pengelola sarana public kepada masyarakat.

Musibah yang terjadi di Situ Gintung ini, sudah tentu bukan semata-mata bencana alam yang tidak terduga, namun dapat dimaknai pula sebagai bentuk nyata dari ketidak disiplin kita dalam melakukan cek kelayakan terhadap sarana public. Karena sesungguhnya, Situ Gintung itu sendiri pada waktu sebelumnya merupakan salah satu daerah yang dijadikan lokasi favorit bagi masyarakat Kota untuk melepas penatnya aktivitas sehari-hari.

Naas yang terjadi, di pagi hari (Jumat, 27/3/09) itu, debit air bertambah dan kemudian menyebabkan daya dorong air sangat besar. Sehingga pada akhirnya menyebabkan tanggul daerah Situ Gintung ini jebol dan kemudian menyebabkan musibah yang memilukan bangsa ini. Korban jiwa pun berjatuhan, dan kerugian material puluhan juta rupiah pun melayang sia-sia.

Bencana dan ambruknya jembatan, tanggul, atau bangunan adalah salah satu peristiwa yang kerap terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kejadian pohon tumbang, dan ambruknya tiang atau baligo, adalah contoh lain yang serupa dengan hal itu. Kita sepakat, untuk tidak boleh mempolitisir bencana ini demi kepentingan sesaat. Penyelamatan terhadap korban bencana menjadi satu kebutuhan mendesak, dan pertolongan kepada mereka yang selamat menjadi kewajiban kita bersama.

Kendati demikian, untuk menata kehidupan di hari esok atau untuk mengantisipasi munculnya bencana-bencana alam yang lainnya, kita perlu memikirkan cara untuk mencegahnya. Salah satu diantara solusi itu adalah, kita perlu memikirkan mengenai regulasi atau prosedur pembangunan infrastruktur ini di negeri ini.

Prosedur ini, bukan hanya terkait dengan IMB (ijin mendirikan bangunan) tetapi terkait dengan aspek-aspek lain, seperti tata guna lahan. Sekedar contoh, di Kota Bandung terhadap sebuah madrasah negeri yang berdiri di lahan yang lebih rendah dari saluran air. Sehingga pada saat air di saluran itu meluap, maka banjir pun tidak bisa ditangani. Kejadian ini, diberitakannya sudah menjadi langanan semenjak tahun 80-an. Bila kondisi ini dibiarkan, bukan hal yang mustahil suatu saat (seiring usia bangunan dan tanggul) akan menyebabkan jebolnya saluran air yang menghantam anak-anak yang sedang belajar di sekolah tersebut. Fenomena ini adalah contoh lain mengenai ketidakdisiplinan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Seiring dengan hal ini, penulis ingin mengajukan persoalan mengenai indeks ketahanan infrastruktur (selanjutnya kita sebut IKI). Sampai saat ini, kita sebagai rakyat kecil, hampir merasakan tidak pernah diberi tahu mengenai IKI, atau mungkin memang karena informasi tentang IKI ini tidak ada. Padahal, kebutuhan terhadap IKI merupakan hal penting dan strategis dalam menjaga keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di Indonesia.

Indeks ketahanan infrastruktur yang dimaksudkan dalam tulisan ini yaitu informasi mengenai kekuatan, usia pemakaian, dan waktu pemeliharaan. Sekedar contoh, menurut seorang pekerja bengkel, bila sebuah kendaraan roda dua diservis secara rutin, maka usia kelayakan motor itu akan lebih lama dibandingkan dengan motor yang tidak pernah diservis. Informasi mengenai kelayakan dan ketahanan kondisi motor itu, merupakan contoh lain dari indeks ketahanan infrastruktur. Dalam kaitan ini pula, bangunan, pesawat terbang, kereta api, jembatan, gedung sekolah, dan lain sebagainya merupakan infrastruktur pelayanan publik yang sangat membutuhkan adanya IKI.

Ada sejumlah indikasi atau alamat yang menunjukkan bahwa kita saat ini sangat-sangat membutuhkan IKI.

Pertama, sudah sering kita melihat, mendengar, atau merasakan dampak bencana yang disebabkan karena rusaknya infrastruktur sarana publik atau fasilitas umum. Bangunan tua, sekolah reyot, jembatan kuno, dan sarana transportasi. Bangunan atau sarana umum yang sudah tidak layak pakai itu seringkali kurang terkontrol oleh pemerintah (baik Pusat maupun Daerah). Akibat keteledoran ini, kemudian menyebabkan bertambahnya rangkaian peristiwa kecelakaan, dan jumlah korban jiwa yang dibuatnya.

Kedua, dalam setiap tahun (atau lima tahunan) Pemerintah mengeluarkan rencana pembangunan infrastruktur. Sayangnya, kita memang tidak pernah melihat ada kesungguhan hati – atau tidak maksimal, dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan atau infrastruktur yang ada. Rencana pembangunan infrastruktur tersebut, kadang lebih diarahkan pada hal-hal yang baru, dan bukan untuk kepentingan pemeliharaan (*maintenance*) atau rehabilitasi.

Andaipun ada program rehabilitasi, mereka lebih mengarah pada rehabilitasi asesornya, seperti mengecat, atau menambal bagian-bagian yang bocor. Sementara evaluasi terhadap ketahanan bangunan, seringkali luput dari perhatian pemerintah. Maka tidak mengherankan bila kemudian ada fenomena bangunan yang baru saja di renov malah sudah rusak kembali.

Pada konteks inilah, kita mengharapkan ada keseimbangan antara agenda pembangunan infrastruktur yang baru dengan *maintenance* secara substansi terhadap bangunan lama.

Kebutuhan untuk melakukan pemeliharaan terhadap bangunan yang lama itu, dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana akibat adanya bangunan yang sudah tidak tahan-kondisi.

Ketiga, pemerintah wajib hukumnya menyertakan informasi mengenai indeks ketahanan infrastruktur. Dalam informasi IKI ini, pemerintah (pihak terkait dan berwenang) perlu menjelaskan mengenai kapan pembuatan infrastruktur publik tersebut, dan berapa lama usia maksimal yang dimilikinya. Selain itu, dalam informasi tersebut perlu disertakan mengenai kapan waktu pemeliharaan rutin yang dilakukan pemerintah terhadap sarana publik tersebut.

Informasi mengenai IKI ini, selain memberikan efek keamanan dan kenyamanan bagi pengguna, juga menjadi 'jaminan' dari pemerintah terhadap kelayakan operasional atau pemanfaatan sarana publik tersebut. Jebolnya tanggul Situ Gintung, yang merupakan salah satu dari situ (waduk) yang dibangun di jaman Belanda, merupakan contoh lain dari kelalaian kita dalam membuat IKI di setiap sarana publik.

Kita sudah saatnya, memberikan informasi IKI ini. Lebih jauh dari itu, kita sudah saatnya disiplin diri dalam mengoperasikan sarana publik atau infrastruktur publik. Kedisiplinan ini, mulai dari perencanaan, pembangunan, pengawasan dan renovasi. Sebagai contoh pengingat, bencana Lumpur Lapindo adalah contoh lain dari ketidakdisiplinan pemerintah (swasta) dalam merencanakan dan merancang sarana publik. Sehingga pada akhirnya ada pipa yang bocor, dan kemudian menyebabkan bencana Lumpur Lapindo yang tidak terkendalikan sampai saat ini.

Terakhir, dengan adanya IKI ini Pemerintah dapat menyusun secara sistematis dan berkelanjutan agenda pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, bila kita sudah memiliki IKI maka dalam waktu tertentu, Pemerintah harus sudah mempersiapkan anggaran untuk melakukan renovasi dan atau melakukan pembangunan yang baru. Dengan IKI inilah, kita bisa melihat dan mengontrol sarana yang harus diapkir, direnovasi atau diremajakan. Tanpa ada IKI ini, bisa jadi kita akan bersikat sembarang dalam melakukan agenda pembangunan.

Sampai wacana ini dikemukakan, kita belum mendapatkan informasi keberadaan informasi serupa IKI ini. Andaipun ada, mungkin yang menjadi masalah itu adalah bentuk kedisiplinan pemerintah dalam melaksanakan standar operasional dari sebuah sarana umum. Dinas Pekerjaan UMUM (PU) memiliki kewajiban yang penuh untuk memberikan informasi yang terkait dengan masalah-masalah seperti ini.

Dengan adanya musibah Situ Gintung ini, diharapkan dapat membukakan mata Pemerintah dan hati para pejabat untuk tidak main-main dengan projek pembangunan dan agenda pembangunan. Agenda pembangunan infrastruktur jangan dijadikan sapi perahan dalam memuaskan nafsu korupsi oknum pejabat.

Semoga !!!

GOLPUT BUKAN INDEPENDEN

Banyak pihak yang menduga, angka golput dalam Pemilu dan Pilpres 2009 akan tetap tinggi sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam Pemilu 2004 atau sejumlah pilkada di tahun 2008. Kehadiran pemilih golput ini, menyebabkan para politisi yang tengah manggung di pentas politik geregetan, degdegan, dan ada juga yang geram melihatnya. Bahkan sikap pedas dari politisi ditujukan pada perilaku kelompok golput. Variasi sikap politik tersebut adalah sangat wajar dan alamiah. Karena apapun yang akan dilakukan kelompok golput, akan turut mempengaruhi terhadap kesempatan politik setiap orang di tahun 2009 nanti. Dengan kata lain, sikap politisi terhadap kelompok golput ini tiada lain hanya bagian dari usaha untuk mengamankan masa depan politiknya sendiri.

Selain persoalan tersebut, fenomena golput diapresiasi sebagai salah satu kegelisahan masyarakat untuk melakukan perubahan. Kelompok golput dianggap sebagai kelompok yang memiliki harapan yang besar tentang masa depan bangsa, dan memiliki imajinasi politik tentang masa depan yang berbeda dengan arus-umum politisi yang ada saat ini. Hanya karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan gerak dan pikiran politiknya berkembang secara maksimal, sehingga mereka terpaksa harus menarik pilihan politiknya ke wilayah golput. Hemat kata, dalam persepsi pelakunya, golput adalah pilihan politik yang paling realistis untuk menyelamatkan sikap politik dan masa depan bangsa.

Dengan kesadaran seperti ini pula, tidak mengherankan bila kemudian banyak politisi muda (atau juga politisi tua) yang mengartikan tingginya angka golput sebagai pasar politik yang perlu dimanfaatkan. Mereka menganggap bahwa tingginya angka golput merupakan pasar-politik yang menuntut dan membutuhkan "barang baru" untuk dijual. Rangsangan politik inilah, yang kemudian mendorong para politisi muda-tua dan politisi lama atau baru, berlomba-lomba mendirikan partai politik baru untuk diujikan dalam pemilu 2009.

Tingginya angka golput dianggap sebagai pasar politik yang segar dan potensial untuk dibidik oleh "partai baru". Pemikiran ini tampak realistis. Namun bila dikonfrontir dengan sejumlah kejadian di berbagai pilkada tahun 2008, tampaknya pemikiran seperti itu perlu dipertimbangkan ulang. Bagi mereka yang memandang bahwa kelompok golput adalah kelompok orang yang berharap munculnya figur alternatif, partai alternatif, atau kandidat alternatif bagi masa depan Indonesia, perlu mengkaji ulang pandangannya seiring dengan sejumlah kejadian yang terjadi dalam setengah tahun terakhir ini.

Untuk sekedar contoh, kekalahan calon independen dalam Pilwakot Bandung (2008) dan dalam Pilgub Lampung (2008) merupakan data awal untuk melakukan koreksi terhadap pemahaman yang menyatakan bahwa 'golput adalah pasar bagi kelompok independen'. Dalam kedua perhelatan politik tersebut, calon independen kurang mendapatkan dukungan, bahkan tidak mendapatkan dukungan yang signifikan sebagai opsi alternatif. Kekalahan calon independen dalam pilkada/pilgub tersebut, dapat disimpulkan bahwa (a) independensi dan (b) wajah baru saja tidak cukup untuk merebut perhatian publik. Masyarakat kita masih memiliki pertimbangan lain, di luar kedua masalah tersebut.

Bahkan angka golput di Kota Bandung ketika Pilgub Jabar ternyata tidak otomatis menyalurkan aspirasi pada kelompok independen.

Berdasarkan analisis awal terhadap perilaku politik tersebut, maka munculnya fenomena golput ini, tetap menyisakan pertanyaan terkait dengan afiliasi politik yang dimilikinya.

Terdapat sejumlah catatan

Penyederhanaan masalah tentang kelompok golput sebagai satu kelompok politik yang dikelompokkan sebagai "satu kelompok yang homogen" merupakan satu bentuk kekeliruan apresiatif. Hal ini terkait dengan berbagai penyebab dan atau berbagai kondisi sosial yang menyebabkan tidak digunakannya pilihan politik oleh masyarakat.

Pertama, tidak menggunakan hak politik tidak berarti bahwa mereka adalah kelompok golput. Pandangan ini penting dikemukakan seiring dengan adanya indikasi bahwa tidak digunakannya hak politik sebagai satu bentuk kesalahan teknis atau kesulitan geografis. Berbagai faktor yang dimaksud dengan kesalahan teknis, misalnya tidak terdata oleh pihak KPU, dan atau orang yang terdaftar dua kali (di dua tempat yang berbeda). Sedangkan karena tinggal di tempat yang jauh dari lokasi TPS – misalnya bekerja di luar kota—dan tidak mampu untuk pulang kampung, sehingga mereka lebih merelakan tidak menggunakan hak politik dibandingkan harus mengeluarkan ongkos pulang yang cukup besar.

Aneka persoalan ini potensial menyebabkan adanya angka golput yang tinggi di Indonesia. Sepanjang pemerintah tidak mampu memperbaiki dan atau mendisiplinkan distribusi KTP (kasus KTP Ganda), maka kepemilikan kartu pemilih ganda pun akan sangat terbuka. Dalam konteks ini, angka golput pada dasarnya bukan fenomena perilaku politik, namun sekedar kesalahan administrasi pemerintah. Tidak lebih dari itu.

Kedua, tepat kiranya bila dikatakan bahwa calon independen bukan merupakan pilihan-terbaik bagi pada pemilih golput. Dengan alasan seperti ini, tidak mengherankan bila kehadiran calon independen bukan menjadi obat terhadap kehausan aspirasi politik kalangan golput, malah dianggap sebagai dagelan politik. Dengan persepsi inilah, maka kehadiran calon independen tidak menjadi sesuatu yang mengejutkan dalam pilkada-pilkada di tahun 2008.

Akankah hal seperti ini menjadi satu trend bagi perilaku politik di Pemilu 2009 yang akan datang ? akankah publik memosisikan calon independen –khususnya dalam Pilpres— dianggap sebagai salah satu dagelan politik semata ?

Ketiga, adanya gejala apatisisme politik. Dengan kata lain, golput bukan berarti butuh pemimpin alternatif atau partai alternatif. Golput adalah apatisisme politik. Apapun dan siapapun yang muncul dalam pentas demokrasi, tidak menarik minat kelompok apatisisme politik. Oleh karena itu, tingginya angka golput bukan menunjukkan kebutuhan dan keghairahan masyarakat terhadap pemimpin baru dan atau partai yang baru.

Pada wilayah ini, keliru bila para pendiri partai atau para politisi yang merasa optimis dengan tingginya suara mengambang atau

suara golput sebagai 'pasar politik' yang akan dijadikan *segment* politiknya. Harapan itu alamiah, namun kekeliruan dalam mempersepsikan pasar akan menjadi awal kerugian-biaya politik yang dilakukannya. Para politisi tersebut hanya bergerak dalam wilayah persepsi-subjektif dan tidak mengena di masyarakat. Persepsi pribadi yang dipaksakan, sehingga 'barang dagangan politiknya' tidak pernah laku secara signifikans di masyarakat. Sejumlah partai (baa : kelompok pendukung partai) yang sudah dua kali gagal memasuki batasan *electrolal treshold* –misalnya, merupakan salah satu "dagangan politik' korban dari persepsi politisinya sendiri. Mereka memaksakan persepsi politiknya dengan mendirikan partai atau menjual figur yang sudah tidak mendapat apresiasi dari masyarakat umum. Dagangan yang tidak laku, dikemas ulang dan kemudian dijual kembali dengan harapan masyarakat dapat membelinya. Kita khawatir, kebiasaan seperti ini hanya akan mempertebal apatisme politik di tingkat masyarakat.

Terakhir, pandangan yang menyatakan bahwa andai saja kelompok golput itu dihitung sebagai salah satu kompetitor politik, maka mereka akan memenangkan sejumlah pilkada di berbagai daerah. Tampaknya pandangan seperti ini pun perlu dikaji ulang. Sebab, angka golput itu sendiri bukanlah angka bulat dan bukan pula satu warna politik. Pemeo yang bisa diberikan kepada para golput itu, yaitu "jika mereka diberi hak untuk mendirikan partai politik, bisa lahir jumlah partai golput sebanyak jumlah pemilihnya itu sendiri". Hal ini dapat terjadi, karena latar belakang dan motivasi golput antara satu dengan yang lainnya sangat berbeda.

Berdasarkan analisis ini, harapan besar dari politisi yang mengusung independen berarti memiliki kans besar untuk

memenangkan suatu perhelatan politik tidak selamanya menjadi dagangan yang menarik baik bagi masyarakat maupun bagi kelompok golput yang ada selama ini. Golput tidak berarti mau menyerahkan ke independen, dan independen tidak berarti figur kelompok golput. Pada wilayah inilah, para politisi —khususnya politisi dan partai baru—harus jeli, hati-hati dan selektif dalam membaca kegelisahan politik masyarakat.

Sementara di lain pihak, bukan saja membutuhkan perubahan perilaku dan budaya politik, namun mekanisme karir-politik di tingkat partai pun harus memberikan keyakinan dan optimisme pada tingkat kader dan masyarakat. Partai politik yang hanya mengusung retorika, dan tidak didukung oleh mekanisme partai serta budaya partai yang demokratis (baru dan berbeda dengan yang sebelumnya), hanya akan memperpanjang apatisisme politik di Indonesia.

INDIVIDUASI WAKIL RAKYAT

Karakter dan kualifikasi individu wakil rakyat merupakan taruhan bangsa untuk lima tahun ke depan. Siapapun dan darimanapun wakil rakyat itu berasal, akan menjadi bagian dari warna legislative di masa depan. Kelahiran mereka akan menjadi bagian penting dari masa depan bangsa Indonesia, khususnya dalam memperjuangkan aspirasi konstituen (pemilihnya) rakyatnya sendiri. Keberhasilan peraih tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia di masa depan, amat sangat tergantung pada kemampuan wakil rakyat itu sendiri. Karena sesungguhnya, dalam konteks demokrasi, agenda pembangunan eksekutif (pemerintah) merupakan bentuk *sharing-dan- interchange* kekuasaan dari kedua lembaga yang lain. Sudah tentu, pihak lain pun turut berpengaruh, namun legalitas politik penetap kesyahannya sebuah agenda adalah hasil sentuhan dari kedua lembaga tersebut.

Peran strategis ini sudah tentu menuntut kinerja atau performa dari legislative yang sangat prima. Baik dalam pengertian individu maupun kelompok (fraksi) dan kelembagaan, lembaga legislative perlu menunjukkan kinerja lembaga yang positif dan konstruktif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa dan negara. Tanpa ada kesadaran dan kemampuan seperti ini, mustahil agenda pembangunan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan koridor arah yang diharapkan bersama.

Implikasi nyata dari harapan ini adalah menuntut lahir, muncul dan berkembangnya budaya organisasi legislatif yang sehat. Budaya organisasi legislatif yang sehat adalah lahir dari individu

wakil rakyat yang sehat. Dengan kata lain, perilaku wakil rakyat dan kualifikasi wakil rakyat akan menjadi bagian penting dan faktor strategis dalam membangun warna budaya organisasi legislif di masa yang akan datang. Pada konteks inilah, peran dan fungsi strategis kualifikasi dan kapabilitas organisasi menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Fenomena yang muncul terakhir ini, yaitu lahirnya muka-muka baru dalam lembaga legislatif. Adalah menarik dan sepakat, bila lahirnya muka baru itu lahir dari sebuah sistem pengkaderan politik yang sehat dan disiplin. Ketat dalam pengertian memiliki mekanisme yang jelas dan tegas dalam partainya, dan disiplin mengandung makna tata prosedur atau asas partai. Sedangkan bila tidak memperhatikann kedua aspek ini, m sehat dan disiplin, maka akan lahir kader-kader baru yang instan atau prematur.

Di saat lahir wakil rakyat yang instan dan prematur, maka siapapun itu, baik karena kepentingan pragmatis politik (polularitas), kepentingan kelompok (misalnya dengan nepotisme), kepentingan stabilitas (mitos kharisma), maka eksistensi kader di lembaga legislatif akan menjadi permasalahan. Keberadaan anggota legislatif itu, akan sulit berkembang dan menjadi kekuatan politik dalam lembaga politik. Hal yang ada adalah munculnya fenomena individuasi wakil rakyat dalam lembaga politik.

Kepentingan pragmatisme politik potensial melahirkan kader prematur atau instan. Latar belakang kelompok ini, bisa dari kalangan artis, militer atau swasta. Kelompok asal mereka bisa dari mana saja. Sepanjang mereka tidak memiliki karakter politik pribadi, atau tidak memiliki idealisme politik dan kemampuan diplomasi politik, akan menjadi kontributor mungulnya kader yang

instan. Bila kondisi ini tidak diperhatikan dengan seksama, kader ini akan dengan mudah larut dalam hiruk-pikuk lembaga, dan mendapat kawalan dari partai (DPP), sehingga pada akhirnya, idealisme dirinya dan keberadaan dirinya hanya simbol dalam lembaga. Inilah yang kita sebut sebagai –meminjam istilah Festinger (1952) *individuasi* di lingkungan wakil rakyat.

Pada jaman Orde Baru, fenomena wakil rakyat yang dihuni oleh keluarga besar tokoh menjadi salah satu drama politik nepotik. Karena kekuatan politik tokoh, pada saat ini pun, orang masih menaruh kepercayaan dan harapan kepada orang-orang yang dianggap berkharisme. Anak tokoh atau anak pemimpin politik, muncul dan duduk di lembaga politik. Orde Baru adalah salah satu potret DPR nepotik, yang kemudian menyumbang pada besarnya individuasi-wakil rakyat.

Dalam suasana nepotik seperti itu, kedaulatan wakil rakyat yang notabene adalah representasi wakil rakyat, menjadi sangat tumpul. Kekuatan yang sangat besar dalam dirinya adalah bayangan dari leluhur atau tokoh lainnya yang telah mengantarkan dirinya masuk ke dalam gedung legislatif. Fenomena yang ada saat ini, diantaranya adalah ada anak, suami atau istri, dan adik yang menjadi (calon) wakil rakyat. Kemenangan mereka, sudah tentu, merupakan sebuah kenyataan politik. Namun kenyataan politik ini menuntut adanya kewajiban dan kebutuhan politik, yaitu kejujuran dirinya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat., bila mereka tidak memiliki karakter dan idealisme-diri mengenai apa dan bagaimana masa depan Indonesia, maka yang akan terjadi adalah dirinya dikendalikan oleh faktor luar (baca : suami/istri, kakak, atau orangtua). Kejadian ini pun, akan menjadi gejala individuasi wakil

rakyat, yaitu hilangnya eksistensi-wakil rakyat, dan yang ada adalah kendali faktor luar.

Hal yang sangat memprihatinkan lagi, yaitu bila kemudian ada kepentingan stabilitas-kelompok yang menyebabkan kedaulatan wakil rakyat menjadi minim. Atas nama sebuah stabilitas dan arah gerakan partai, pimpinan partai atau figur tertentu memberikan rambu-rambu yang kemudian menyebabkan aktualisasi dan ekspresi politik wakil rakyat melemah. DPP atau Dewan Pembina menjadi sangat berperan dalam menentukan hitam putihnya perilaku wakil rakyat.

Selama kampanye dan atau pemilu legislatif yang lalu, kita melihat bahwa kehadiran dan aktualitas visi politik caleg senantiasa dibawah bayangan tokoh lain. Secara terbuka, caleg-caleg itu ada membonceng tokoh-tokoh kharisma dikelompoknya, mulai dari Soekarno, Moh. Hatta, Soeharto, Amien Rais, Sri Sultan HB IX, SBY, dan JK. Kehadiran dirinya dihadapan rakyatnya, bukan karena kediriannya, melainkan karena sumbangan dari bayang-bayang tokoh dimaksud.

Tanpa bermaksud untuk mengagung-agungkan Barrack Obama, namun informasi yang berkembang dan sampai ke Indonesia, kemenangan Obama ini benar-benar merupakan wujud kekharismaan yang hadir dalam dirinya. Kekharismaan yang dimilikinya, selain dari retorika juga dari track record yang pernah ditorehkan di tengah-tengah masyarakat Amerika Serikat. Begitu pula dengan sumbangsih pemikiran dan atau visi yang diembannya. Akumulasi dan interaksi antara faktor tersebut dengan kebutuhan rakyat AS waktu itulah yang kemudian mendongkel popularitasnya, dan mendulang suara kemenanngan.

Publik Indonesia akan setuju dengan realitas sang fenomenal Obama itu. Demikian pula dengan fakta politik yang ada di tengah-tengah kita saat ini, publik Indonesia akan setuju bila kemenangan beberapa caleg baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat, tidak disebabkan karena adanya indikasi popularitas fenomenal yang dilatari oleh kemampuan-politik calon. Mereka lahir dari balik bayangan atau citra-citra yang tidak berkaitan dengan kompetensi politik. Dengan kata lain, ada indikasi bahwa wakil rakyat kita yang ada saat ini, lahir dari sebuah mekanisme yang tidak menunjukkan kualifikasi individu yang matang dan dewasa. Karena kelahiran mereka, bukan atas nama kemampuan diri (kualifikasi diri) namun lebu disebabkan karena bayang-bayang kekharismaan faktor luar.

Simpul pemikiran, kita ingin menegaskan bahwa kealpaan kompetensi politik dari seorang wakil rakyat, hanya akan menjadi penyebab lahirnya individuasi wakil rakyat. Kelompok wakil rakyat ini, hanya akan menjadi penyumbang suara-koor (kolektif) wakil rakyat yang ada dalam ruangan dewan. Suara mereka akan larut dan baur dalam gedung dewan, sesuai dengan irama dan dinamika partai, baik di dalam maupun di luar gedung.

Hipotesis ini muncul, dengan alasan karen adanya wakil rakyat yang lahir tidak dari sebuah mekanisme rekrutmen dan pengkaderan secara matang, serta lahir dengan membawa kharisma non-politik. Dalam konteks ini, kita perlu membedakan antara popularitas-selebritis dengan popularitas-politik. Keduanya mungkin dapat memiliki nilai popularitas yang sama, atau malah ada satu yang lebih dibandingkan yang lainnya. Namun kemampuan politik, tidak cukup dengan populer, dia membutuhkan kemampuan politik yang lainnya. Bila hal ini dibiarkan, maka ada beberapa tren yang potensial berkembang di

masa depan, yaitu (a) wakil rakyat yang dikendalikan oleh DPP, (b) wakil rakyat yang larut dalam suara-umum dalam ruang Dewan, (c) wakil rakyat yang tidak memiliki aktivasi politik yang maksimal. Ketiga kelompok ini, akan bermuara dalam satu perilaku, yaitu tidak eksis-nya kedirian seorang wakil rakyat. Ketidakeksisan kediriannya seorang wakil rakyat inilah, yang kita sebut individuasi wakil rakyat.

Dalam pandangan kita, individuasi wakil rakyat bisa merupakan musibah-demokrasi bagi bangsa Indonesia. Karena, individuasi wakil rakyat tidak jauh berbeda dengan homogenisasi-suara melalui banyak oknum. Artinya, jumlah wakil rakyatnya bisa banyak atau malah mendominasi kuris di legislatif, namun perilaku dan pikiran politiknya terkendali oleh seorang figur dibalik ruangan dewan. Pada konteks inilah, individuasi wakil rakyat adalah musibah-demokrasi bagi Indonesia.

Untuk menghindari musibah ini, maka ada satu kunci penting yang harus dimiliki, yaitu kejujuran pada diri, dan mulailah belajar. Dunia yang akan diduduki nanti, bukanlah sekedar kursi politik namun terkait pula dengan tanggungjawab politik, yang membutuhkan kesungguhan hati dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia.

Sakitnya tuh di kebijakan !

Munculnya fenomena pemiras oplosan, pada dasarnya hanya memperkuat mengenai dampak buruk dari kebijakan-kebijakan sepihak yang dilakukan pemerintah. Perayaan miras oplosan, sebagaimana yang terjadi di Sumedang, Garut, atau Malang, adalah sebuah kritikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya parsial.

Betul. Kita ingin mengatakan bahwa pesta miras oplosan adalah pesta kritik terhadap kebijakan parsial dari pemerintah. Kalau kita cek harga minuman keras yang original atau impor, kita semua akan tahu harga barang tersebut untuk setiap botolnya. Harga miras yang dianggap murah, ada dalam kisaran 200-500 ribu / botol.

Tingginya harga atau pajak dari produksi miras ini, sangat tepat. Setidaknya tepat untuk mengeliminasi kelompok masyarakat bawah dalam menjangkau barang haram ini. Dengan harga yang selangit seperti itu, masyarakat kelas menengah-bawah, setidaknya harus berpikir ulang dalam mengkonsumsi miras tersebut.

Hal itu sudah kelihatan dampaknya. Masyarakat kelas bawah, jarang mampu menjangkau miras original dimaksud. Bisa jadi, sebagian diantara kita akan menetapkan keputusan bahwa kebijakan menaikkan pajak minuman keras tersebut berhasil.

Tetapi fakta di lapangan berbeda. Konsumsi miras bukan seperti ganti baju, yang bisa dilepas setiap saat, dan diganti sesukanya. Mengkonsumsi miras, terlebih lagi bagi mereka yang sudah ketagihan, dan belum mendapatkan kesempatan untuk menjalani

proses rehabilitasi, maka persoalannya tidak sesederhana itu. Bagi mereka, setinggi apapun harga, akan tetap dikejanya, dan andaipun tidak terjangkau, maka dia akan berusaha untuk mendapatkannya.

Dalam konteks yang terakhir itulah, para pemiras, akan mencari cara untuk memenuhi hasrat mirasnya. Apapun caranya !

Ada banyak pilihan. Menjual barang, mengambil barang orangtua, atau mencuri. Semua itu adalah pilihan satu diantara alternative lain yang mereka miliki dan bisa lakukan. Di luar pilihan itu, alternative termudah bagi kelompok ekonomi menengah bawah, yaitu memanfaatkan teknik oplosan.

Dengan kata lain, saya ingin menegaskan bahwa munculnya pesta miras oplosan, lebih merupakan dampak nyata dari ketidakterjangkauannya harga miras-original oleh kelompok pelaku. Teknik dan kebiasaan ini, merupakan gambaran nyata dari hasrat pemiras yang tinggi, dengan ketidakberdayaan masyarakat dalam menjangkau kebutuhannya.

Hal yang serupa, terjadi pula pada kelompok perokok. Setinggi pajak rokok atau setinggi apapun harga rokok, mereka akan upayakan untuk bisa mendapatkannya. Bahkan, keanggan merokok yang konvensional dan kemudian dimanfaatkan oleh para produsen rokok elektrik, kini malah menuai masalah kesehatan yang juga sama akutnya.

Harga software yang mahal, dan tidak ada upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan software murah dan legal, menyebabkan pembajakan software terjadi di berbagai tempat.

Munculnya CD bajakan, baik dalam konteks music atau film, adalah bentuk lain mengenai harga CD original yang mahal, sementara hasrat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan itu tidak terbelah dan tinggi, kemudian menyebabkan munculnya bisnis CD bajakan.

Hadirnya ragam produk kw-kw-an, adalah contoh lain yang juga menggambarkan ketidakberdayaan masyarakat dalam menjangkau produk asil, disaat hasratnya sangat kuat dan tidak tertahankan. Hasrat yang tinggi pada masyarakat itulah, yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk menyalurkan produk jualannya.

Pesta miras oplosan bukan sekedar karena pelaku yang “sakit jiwa”. Tetapi, juga karena ada pihak lain yang turut menikmati keuntungan dari suasana ketagihan-massal pemiras oplosan. Warung remang-remang atau toko gelap (*togel*) atau lebih kerennya lagi *dunia gemerlap* (*dugem*) atau bar atau nama lain yang serupa, memanfaatkan ‘hasrat ketagihan massal’ tersebut, sebagai pasar bisnisnya.

Berdasarkan pertimbangan itu, sekali lagi, saya melihat bahwa pemerintah harus berhati-hati dengan kebijakan-kebijakannya. Kebijakan yang setengah-hati, atau kebijakan yang tidak menyeluruh, akan melahirkan rangsangan munculnya penyakit sosial di masyarakat.

Subsidi BBM dicabut yang kemudian menyebabkan naik harga BBM, tanpa diimbangi oleh kemudahan masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar tersebut, selain merangsang untuk penyelundupan dan penimbunan, penyelewengan-

penyelewengan lain akan semakin beragam muncul di masyarakat.

Susah, dan ribet dan mahal nya prosedur menjadi TKI, menyebabkan lahir nya TKI ilegal. Susah dan mahal nya transaksi hasil perikanan, merangsang penyelundupan ikan.

Kenaikan tarif dasar listrik, yang tidak diimbangi oleh pelayanan prima, terlebih lagi malah sering padam, merangsang masyarakat untuk berbuat curang dalam pemanfaatan listrik di rumahnya masing-masing.

Kenaikan tuntutan kerja kepada para pegawai, seperti di pelabuhan, kereta api, jasa transportasi, dan juga pegawai negeri yang lainnya, tanpa diimbangi oleh kesejahteraan yang memadai, akan merangsang lahir nya pelanggaran nilai dan norma di lapangan. Minim nya pendapatan dari retribusi transportasi, adalah contoh pelanggaran yang disebabkan karena kebutuhan tinggi yang tidak terimbangi oleh pendapatan.

Berdasarkan pertimbangan itu, tampak jelas bagi kita saat ini, bahwa pesta miras oplosan, merupakan dampak negative dari kebijakan sepihak pemerintah. Kebijakan menaikkan pajak minuman keras, hanya sekedar memainkan seleksi ekonomi terhadap para pemiras. Sementara hasrat minum minuman keras, bukanlah sekedar masalah ekonomi, tetapi juga masalah psikis atau kejiwaan.

Dengan kata lain, hadir nya kebijakan menaikkan pajak miras, harus disertai penjelasan dan pencerahan kepada public, serta rehabilitas sosial kepada masyarakat mengenai dampak kesehatan dari miras. Intinya, program pendidikan dan rehabilitasi kepada pemiras, jauh lebih penting dari sekedar menaikkan pajak

atau harga miras. Kealpaan kita dalam melakukan rehabilitas dan promosi kesehatan, hanya merangsang mereka untuk mencari teknik baru dalam miras, termasuk oplosan tersebut !

-

Fenomena Partai Gagal

Sadar atau tidak, diakui atau tidak, dari dua perhelatan pesta demokrasi di Indonesia ini kita menemukan ada fenomena kegagalan partai (*party failure*). Kegagalan partai ini terjadi secara bertingkat dan berkelompok, bergantung pada kasus per kasus. Kejadian yang mencuat kepermukaan dan menjadi kegelisahan politik dirasakan oleh kader-kader dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mereka menganggap bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengalami kegagalan dalam mengelola organisasi ini, sehingga partai meraih suara yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pemilu 2004, atau pemilu 1999. Kendati antar faksi sudah mau berishlah (berdamai), kegelisahan politik di internal partai ini sempat meruncing ke permukaan dan menjadi konsumsi publik.

Kegelisahan terhadap fakta kegagalan partai merupakan hal positif. Setidaknya hal ini menunjukkan ada rasa kepemilikan dan tanggungjawab kader terhadap keberadaan partai dan masa depan partai. Malah bila kita tidak merasa gelisah dengan kegagalan partai, bisa jadi ada satu kekeliruan dalam sikap dan persepsi politik terhadap partai itu sendiri. Dalam konteks inilah, fenomena kegagalan partai atau partai gagal menjadi menarik untuk dicermati dengan seksama.

Bila dicermati dengan seksama, sesungguhnya ada sejumlah indikasi yang menunjukkan atau dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengukur kegagalan partai. Dengan indikator-indikator ini, kita dapat melihat kegagalan partai ini tidak hanya terjadi pada PPP, tetapi juga pada partai-partai yang lainnya.

Pertama, kita sepakat, ukuran pertama dan kasat mata, yaitu ukuran raihan suara. Sebuah partai dapat dikategorikan gagal, bila tidak mampu mempertahankan suara atau meningkatkan jumlah suara. Indikator inilah yang banyak digunakan oleh kader partai saat ini, termasuk oleh kalangan PPP, atau mungkin di PDIP dan Partai Golkar yang kini merasakan dampak buruk dari raihan suara yang menurun. Kendati penurunan raihan suara tersebut, tidak bersifat fatal bagi partai politik terkait, karena mereka masih mampu bertahan dalam koridor persyaratan raihan suara partai atau suara di parlemen.

Raihan suara adalah ukuran yang kasat mata dari sebuah proses politik. Raihan suara adalah ukuran pertama dalam menilai keberhasilan organisasi dan mesin politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena dengan peningkatan raihan suara ini, sebuah partai dalam meningkatkan jumlah kursi dan kekuatan *bargaining* baik di masyarakat maupun di parlemen dan pemerintahan. Mandegnya suara atau melemahnya raihan suara politik, berimplikasi pada menurunnya kekuatan politik dihadapan pihak-pihak yang lainnya.

Kedua, kemampuan mempertahankan jumlah suara bukan dikategorikan berhasil secara organisasi dan politik, bila raihan suara tersebut tidak signifikans. Dengan kata lain, sebuah partai dikategorikan gagal (*failure*) manakala dia hanya mampu mempertahankan jumlah suara-pengurus atau partisan yang fanatis, dan tidak memiliki kontribusi terhadap proses dan dinamika politik.

Ada dua ukuran yang sudah dikenal dalam wacana politik di Indonesia untuk mengukur signifikansi raihan suara politik, yaitu *electrolal threshold* dan *electoral parlement*. Kedua ukuran ini

ditetapkan 2 %. Dengan kata lain, sebuah partai yang tidak mampu menunjukkan kinerja politiknya dalam mencapai angka 2 %, baik dalam pengertian electoral threshold maupun electoral parliament, sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai partai gagal.

Bagaimana dengan partai-partai gurem yang sudah dua kali menjadi peserta pemilu namun tidak mampu menunjukkan prestasi raihan suara politiknya sampai batasan yang ditentukan ? meminjam istilah pendidikan, mungkin mereka itulah yang disebut dengan sudah dua kali tidak lulus ujian nasional.

Ketiga, partai gagal (*party failure*) ditunjukkan dengan ketidakmampuan organisasi dalam melahirkan kader-kader internal untuk dijual ke pasar politik. Ketidakmampuan ini merupakan bentuk nyata kegagalan partai dalam melakukan pembinaan dan pengkaderan secara politik. Ada banyak indikasi kegagalan partai dari sisi pengkaderan ini, diantaranya (a) banyak kader dadakan yang masuk dalam jajaran partai tanpa menjalani proses seleksi dan pembinaan, (b) mandegnya kaderisasi dan regenerasi partai, dan (c) lemahnya daya jual kader di pasaran politik.

Kadang kita merasa percaya diri untuk menjual kader-kader ke pasar politik. Namun pada kenyataan (*real politics*), kader-kader kita adalah kader yang tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Mungkin benar, bahwa ketidaklakuannya kader partai dimasyarakat bukan berarti kualitas kader partai yang buruk, namun lebih disebabkan psikologi politik masyarakat yang tidak cocok dengan karakter kader partai. Namun pada konteks itu pulalah, sesungguhnya kader dan partai secara organisasi mengalami kegalam dalam membaca psikologi massa politik.

Keempat, implikasi dari persoalan-persoalan tersebut, memungkinkan telah terjadinya 'kejenuhan jumlah suara pendukung'. Maksud dari kejenuhan suara pendukung itu artinya minimnya peluang mengalami perubahan dalam jumlah pendukung. Suara pendukung yang ada adalah bagian penting dari organisasi, dan sulit mengalami perubahan nyata. Potensi yang ada bukan bertambah prestasi malah mengalami penurunan seiring dengan dinamika politik.

Untuk sekedar bahan refleksi, kita dapat mengajukan kepada partai-partai yang ada hari ini. Bila jumlah pemilih itu tidak pernah berubah secara nyata, padahal partai ini sudah mengalami dua kali seleksi politik (menjadi peserta pemilu), jangan-jangan suara politik dalam partai ini sudah jenuh? bila suara politik yang kita miliki saat ini, masih jauh dari yang diharapkan dan hanya sekedar diikuti oleh keluarga besar pengurus partai, apakah hal ini sudah menjadi indikasi suara jenuh?

Kelima, kegagalan partai terjadi pula karena partai politik yang ada, khususnya diluar mainstream (partai besar) tidak mampu mempengaruhi persepsi publik. Visi dan misi partai politik yang ada selama ini, dianggap memiliki visi dan misi politik yang sudah terdapat (diakomodir) oleh partai besar. Andaiapun agak berbeda dengan partai besar (mainstream), visi dan misi politiknya dianggap tidak realistis dan kemudian kurang mendapat dukungan publik. Rakyat memang sempat dibuat pusing karena sulit membedakan perbedaan antara partai satu dengan partai yang lainnya. bahkan, rakyat pun bisa mengajukan pertanyaan, jika tidak ada perbedaan mengapa tidak bergabung saja?

Dari catatan-catatan tersebut, kegagalan partai politik sejatinya perlu dijadikan sebagai bahan refleksi sekaligus modal awal untuk

melakukan perubahan-perubahan sikap politik di masa depan. Kita tidak mungkin, terus menerus melakukan strategi involusi-politik, atau berjalan di tempat dengan membawa asumsi dan hipotesis pribadi. Karena dengan involusi politik, alih-alih mampu mendulang suara, yang terjadi malah menyebabkan menurunnya jumlah suara politik.

Bukan hal yang mustahil, menurunnya raihan suara PPP adalah sinyal awal adanya involusi-politik dari partai Islam kelahiran Orde Baru ini. Partai ini, di zaman Soeharto memiliki wibawa yang besar dan mendapat simpati cukup kuat. Namun sinyal ini meredup setelah lahirnya gairah baru, khususnya setelah lahirnya PAN, PKB dan PKS, yang mengemas produk-spirit Islam dengan kemasan agenda pembangunan yang lebih "segar". Ide-ide religi yang bersumber Islam dikemas dalam bentuk baru, sehingga memberikan harapan baru bagi masyarakat.

Melakukan pembenahan visi dan misi serta budaya politik ini menjadi sangat penting, khususnya dalam rangka meningkatkan daya jual politik kepada masyarakat. Karena sesungguhnya, bila kader partai politik berkuat dalam 'mimpi-mimpi' politiknya tanpa berdialog dengan realitas politik Indonesia, bukan saja menunjukkan budaya involusi politik, tetapi sekaligus menunjukkan sikap sakitnya paradigma politik kita. Perilaku ini dapat disebut 'autisme politik'.

Kita khawatir, elit politik mengidap autisme politik, yaitu merasa betah, senang, dan bangga dengan 'mimpi-mimpi' politiknya sendiri, tanpa hirau dengan dinamika politik di sekitarnya. Perubahan dan tantangan politik yang ada di sekitarnya, tidak pernah menjadi bagian pertimbangan dan atau penilaian organisasi untuk kemudian melakukan pembenahan manajemen

politik di lembaganya. Akumulasi dari persoalan ini sudah sangat jelas, yaitu terjadinya kegagalan partai dalam proses dinamika politik.

Berdasarkan analisis ini, mungkin kita harus melakukan fusi partai politik ? kiranya harus direnungkan kembali. Fusi akan menjadi jalan baru bagi sebuah partai yang memiliki visi dan misi mirip atau serupa dengan yang lainnya. Melalui jalan ini, diharapkan misi politik organisasi dapat diwujudkan, dan raihan suara politik akan lebih besar. Bila tidak mengambil jalan ini, salah satu diantaranya adalah membubarkan diri.

Partai Rakyat Demokrat (PRD) pimpinan Budiman Sujatmiko adalah contoh ril untuk melakukan pembubaran organisasi setelah partai ini tidak mendapat dukungan nyata dari masyarakat. Tampaknya sikap ini lebih fair daripada harus meneghadapi kegagalan partai dan atau involusi politik secara berulang-ulang. Langkah yang bisa diambil setelah melakukan pembubaran partai, selain ada yang mengambil jarak dengan partai politik, sebagian kader partai itu (PRD) ada yang bergabung dengan PDIP. Pilihan politik ini merupakan sikap realistik terhadap kenyataan politik yang ada saat ini.

Untuk sekedar bahan renungan, ada pepatah yang sering diungkapkan kepada masyarakat kita. Dalam rangka memberikan motivasi untuk eksis dan percaya diri, sering diungkapkan pepatah "Lebih baik jadi kepala kucing daripada buntut harimau". Namun demikian, dalam konteks politik hari ini, akankah kita tetap menjadi kepala kucing, dan hanya dijadikan penggembira demokrasi ?

Mengukur Partai Gagal

Dalam konteks ilmu politik atau kajian kenegaraan, istilah negara gagal sudah menjadi bagian dari konsep akademik. Terdapat banyak indikator, yang bisa menunjukkan sebuah negara bisa dikategorikan sebagai negara gagal. Salah satu diantaranya, adalah ketidakmampuan dalam membayar utang dan gagal memberika jaminan kesejahteraan kepada rakyat, sebagaimana yang terjadi pada negara Yunani. Ciri lainnya adalah lemahnya kemampuan dalam menjaga keamanan dalam negeri.

Selaras dengan penalaran itu, kita dapat mengajukan pertanyaan, mungkinkah ada yang disebut partai gagal ? Bagaimana kita mensikapi adanya partai gagal ?

Ada fenomena menarik yang hari ini banyak menyedot perhatian publik. Fenomena politik yang saya maksudkan ini adalah kelanjutan drama politik selepas Anas Urbaningrum mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Peristiwa politik ini, mengundang banyak perhatian. Bahkan, ada juga yang menyebutnya, kasus ini adalah prahara bagi Partai Demokrat, dan drama politik lembaran pertama yang sedang dimainkan Anas Urbaningrum. Sebelum kasus ini, media diramaikan dengan kasus yang menimpa partai baru, Partai Nasdem.

Kita tidak akan terbawa arus untuk memantau perkembangan drama politik itu. Tetapi, kita ingin melihat sisi lain, yang banyak terabaikan oleh publik, termasuk pengamat. Sisi yang dimaksudkan ini, yaitu aspek kesuksesan sebuah partai, atau kegagalan partai politik.

Gagal dalam bahasa Indonesia adalah ketidakberhasilan. Sementara dalam bahasa Inggris, *failure* selain diartikan gagal, juga dapat diartikan sebagai pengabaian atau pelalaian. Sehingga kalau kita mengoperasikan salah sistem operasi di komputer, dan kemudian ada yang dianggap *failure*, maka aplikasi itu tidak bisa dioperasikan, dan dianggapnya rusak atau gagal. *Failure* pun adalah kata yang digunakan untuk menyebutkan kondisi gangguan, gangguan terhadap sistem yang tengah diaktifkan. Masalah kita saat ini, adakah sebuah partai dapat dikategorikan sebagai sebuah partai gagal ?

Untuk menjawab hal ini, kiranya kita bisa menggunakan pola pikir positif, artinya kita akan memanfaatkan standar normatif atau impian politik dijadikan sebagai alat evaluasinya. Sehubungan hal ini, sesungguhnya kita dapat memanfaatkan beberapa indikator negara gagal dalam menilai sebuah partai.

Pertama, pengusungan kader. Partai politik memiliki fungsi untuk melakukan kaderisasi warga negara, dan membangun jiwa kepemimpinan. Proses kaderisasi dalam sebuah partai, pada dasarnya adalah proses pembibitan menjadi kader. Partai politik berfungsi sebagai lembaga pendidikan politik untuk melahirkan seorang pemimpin. Dengan fungsi seperti ini, partai politik berkewajiban menggodog dan mengusung kadernya untuk menjadi seorang pemimpin. Dengan kata lain pula, bila ada partai yang tidak mampu melahirkan kader dalam satu pilkada, menjadi indikator awal bahwa partai itu mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi kaderisasi. Untuk kasus yang pertama ini, Partai Demokrat mendukung dan mengusung kadernya dalam pemilu kada di Jawa Barat dan DKI. Sayangnya, di kedua propinsi ini, partai ini mengalami kegagalan. PD gagal mengusung kadernya menjadi pimpinan politik di daerah.

Kedua, pencitraan. Partai memiliki kepentingan untuk membangun citra sebagai pejuang aspirasi rakyat. Citra ini diwujudkan dalam visi, misi dan retorika politik pada tokoh atau elit partainya. Di lihat dari teori pemasaran (*marketing*), citra akan menjadi branding partai dalam benak konsumen. Kemampuan pasangan Paten dalam Pilkada Jawa Barat, walaupun gagal meraih posisi pamuncak dalam pilkada tersebut, namun penanaman citra sebagai pasangan baru dan bersih, mampu mendongkrak suara secara signifikan diluar perkiraan pengamat. Sebelum dilaksanakan Pilgub Jabar, pasangan ini hanya diposisikan pada urutan ketiga, tetapi kenyataannya mampu mengungguli pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat – PAN.

Sekali lagi, walaupun gagal menjadi pamuncak dalam Pilgub Jabar, tetapi keberhasilan Paten merupakan keberhasilan partai dalam membangun citra atau *branding* di masyarakat, sebagai pasangan baru dan bersih. Di lain pihak, ada partai yang tengah mengalami kemelorotan citra. Branding yang selama ini dianggap pejuang terdepan dalam pemberantasan korupsi, malah mengalami masalah dengan korupsi. PKS dan PD adalah contoh dari partai yang dapat disebut partai yang mengalami kegagalan dalam menjaga branding partai dihadapan publik.

Kasus ini tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh Partai Baru Nasdem. Partai besutan Surya Paloh ini, diawal kemunculannya mampu menyedot perhatian publik dengan membawa merek barunya, sebagai partai perubahan atau restorasi. Visi tersebut membawa kegairahan baru dikalangan kaum muda dan sebagian warga Indonesia, termasuk sejumlah aktivis. Selepas penetapannya sebagai partai yang lolos verifikasi KPU, partai ini malahan mengalami masalah internal yang berimbas pada friksi

internal partai. Gagal mempertahankan citra restoratifnya, dan kemudian masuk ke dalam “situasi krisis”.

Ketiga, tanpa bermaksud mendahului aparat hukum, kasus yang menimpa Partai Demokrat merupakan partai yang sangat menarik untuk dicermati. Jumlah orang yang tersangka dalam kasus korupsi, khususnya Kasus Hambalang begitu banyak, dan mereka berada pada posisi puncak pimpinan partai. Ketua Umum, Bendahara Umum, Sekertaris Dewan Pembina Partai, dan Anggota. Pertanyaan kita, adalah apakah hal ini menjadi gambaran ‘gunung es’ dari korupsi struktural ? atau, itulah sesungguhnya gambaran organisasi yang benar, bahwa setiap keputusan sifatnya kolektif, sehingga bila ada satu masalah, kemudian menyeret orang lain ? Pertanyaan ini sulit dijawab. Publik hanya diberi kewenangan membaca, menebak dan menyimpulkan, walaupun bisa jadi kesimpulan ini tidak benar.

Persoalan krusial kita adalah sebuah partai terancam menjadi sebuah partai yang gagal, bila tidak mampu membangun sistem organisasi yang sehat dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Bila pemerintah mengajukan agenda pemberantasan korupsi, dan kemudian malahan partai politik itu sendiri yang secara sistemik dan struktural membangun ‘langkah-langkah korup’, maka partai itu gagal menjadi pilar pembangunan, dan pilar kebangsaan.

Keempat, sebuah negara dinyatakan gagal bila melahirkan konflik horisontal di dalam negerinya. Analogi ini bisa kita manfaatkan untuk menganalisis kegagalan sebuah partai. Sebuah partai, dinyatakan gagal bila melahirkan konflik internal partai berkepanjangan, yang malaha berujung lahirnya friksi dan faksi politik di dalamnya. Konflik kepentingan yang berujung pada

konflik internal partai, merupakan wujud dari kegagalan partai dalam membangun soliditas partainya sendiri.

Terakir, keberhasilan sebuah partai pada dasarnya dilihat dari sisi administrasi. Sebuah partai, dapat dikategorikan gagal, hal pertama adalah jelas-jelas bila tidak memenuhi syarat administrasi. Dengan kata lain, melalui indikator administrasi, maka ketiadaan anggota atau ketiadaan simpatisan dapat disebut sebagai negara gagal. Sehingga, wajar bila kemudian mereka tidak bisa lolos dari tahapan verifikasi KPU (Komisi Pemilihan Umum). kelompok partai serupa ini, jelas merupakan salah satu contoh dari partai gagal, setidaknya gagal mejadi partai berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Ketiadaan anggota ini, sifatnya dinamis. Di tahap awal, ada sarat administrasi untuk mendirikan partai. Pihak pengawas dan verifikatornya adalah KPU. Sementara pada selanjutnya, yang akan menjadi verifikatornya adalah anggota legislatifnya itu sendiri. Disaat kalangan legislatif menetapkan electoral thresholdnya meningkat, maka sebuah partai bisa jadi terlikuidasi dari lembaga negara itu, dan dinyatakan sebagai partai gagal. Artinya, kendati pada pemilu sebelumnya sudah memenuhi syarat sebagai sebuah partai, tetapi pada pemilu berikutnya, bisa dinyatakan tidak bisa menjadi partai peserta pemilu.

Berdasarkan pemikiran ini, menjadi pekerjaan rumah akademisi dan juga legislasi, untuk menyelesaikan sikap dalam menghadapi partai-partai yang terancam gagal, gagal sebagai sebuah partai ! Pertanyaan kecilnya, mampukan keputusan politik SBY menyelamatkan Demokrat dari krisisnya sebagai partai gagal ?

Memahami Karakter Kerumunan

Pejabat marah, akibat taman kota rusak oleh warganya. Sekelompok warga kota, di hari minggu itu bersuka ria di taman kota, dengan maksud untuk menyaksikan dan berpartisipasi dalam kegiatan es krim gratis yang disediakan panitia kegiatan saat itu.

Sayangnya, karena mengambil tempat di taman kota, maka ratusan ribu warga kumpul dan berdesakan, yang kemudian menyebabkan taman kota dengan segala keasriannya, kini sirna. Hal yang tertinggal, tinggal puing-puing sampah, dan reruntuhan tanaman di taman kota. Rusak sudah taman kota yang sebelumnya di banggakan.

Lain dengan walikota Risma, dari Surabaya. Walikota Bandung, Ridwan Kamil langsung mengeluarkan kebijakan untuk tidak (akan) mengizinkan lagi kegiatan di Balai Kota. Karena, dalam hematnya, kegiatan tersebut menyebabkan kemacetan yang luar biasa pada ruas-ruas jalan yang melewati Balai Kota Bandung.

Ada yang salah, dengan kemacetan Bandung akibat tumpahnya warga kota pada satu titik pusat kegiatan ? rasanya wajar !

Ada yang salah dengan kerusakan taman kota, akibat tumpahnya warga kota pada satu pusat kegiatan ? rasanya wajar !

Maksud wajar di sini, bukan dimaksudkan untuk memaklumkan perilaku itu. Perilaku perusakan tetaplah perusakan, dan perlu dihindari. Tetapi, munculnya sikap warga itu seperti itu, adalah

sesuatu yang wajar, sesuai dengan karakter kerumunan itu sendiri.

Karena itu, maka kewajaran yang dimaksudkan di sini, bisa berkaitan erat dengan beberapa hal pokok dalam masalah sosiologis. Pertama, kurang cermat panitia penyelenggara dalam menyelenggarakan pesta massal. Kegiatan massal, yang melibatkan kerumunan, tanpa pengaturan dan control yang tegas dari pihak penyelenggara atau keamanan, akan menyebabkan kemacetan dan kerusakan arena kegiatan atau fasilitas umum. Aspek kedua, secara sosiologis, adanya pengabaian terhadap karakter kerumunan. Maksud dari pengabaian ini, yaitu adanya penyamarataan sikap terhadap karakter kerumunan, padahal kerumunan massa itu memiliki karakter tersendiri, dan membutuhkan penanganan khusus.

Tiga karakter kerumunan

Dalam konteks ini, dan juga belajar dari kasus-kasus yang pernah terjadi di tengah kehidupan kita saat ini, setidaknya kita bisa mengelompokkan karakter kerumunan dalam tiga kategori besar.

Pertama, kerumunan massa yang terpecah (*segmented*). Mereka berkumpul, ya, tetapi emosi atau perilakunya tidak menyatu. Emosi satu orang dengan orang lainnya, ada dalam kondisi masing-masing. Seorang penumpang bis, asik dengan emosi dan lakunya sendiri, dan akan berbeda suasana dengan penumpang lainnya. Bahkan, mereka cenderung cuek. Seorang penonton bioskop, akan asik dengan kebutuhannya sendiri, dan bahkan cenderung cuek dengan orang yang ada disampingnya

Kedua, ada kerumunan yang emosional, seperti penonton sepakbola atau massa kampanye. Karakter kerumunan yang

kedua ini, berbeda dengan yang pertama. Antara satu dengan yang lainnya, dia merasa ada ikatan emosional tertentu. Bila ada sesuatu yang melecutnya, atau kalau ada pimpinan yang menggerakkannya dia akan bergerak serentak.

Gerakan massa dalam kelompok emosional ini, sifatnya massal dan terjadi bila ada pelecut atau katalis. Sementara, bila tidak ada katalisnya, maka massa tersebut relative akan berada dalam kondisi kerumunan belaka.

Ketiga, ada kerumunan yang agresif. Lebih eksposif dibandingkan dengan dua kelompok kerumunan sebelumnya. Pada kerumunan yang satu ini, setiap orang memiliki hasrat untuk bergerak, dan bahkan bersaing. Setiap orang memiliki naluri untuk menguasai atau merebut.

Fenomena yang tepat untuk kasus yang satu ini, yaitu kerusuhan pada pembagian zakat dan atau pembagian ang pau, atau es krim gratis, seperti yang terjadi di Kota Surabat dan Bandung. Setiap warga yang datang ke lokasi tersebut, memiliki hasrat dan naluri yang sama, yaitu naluri berjuang untuk meraih kebutuhannya. Naluri inilah yang potensial melahirkan tindakan yang tidak diinginkan.

Perbedaan karakter kerumunan tersebut, nyata-nyata membutuhkan pola penanganan yang berbeda. Kita, Negara ini, sering abai terhadap karakter kerumunan yang agresif. Korban dalam kasus pembagian zakat kerap terjadi, dan penanganan belum juga maksimal. Sering terjadi, tetapi sering pula lupa untuk menanganinya.

Penutup

Berdasarkan pertimbangan itu, hal pokok yang perlu dicermati di sini, bahwa pemerintah, aparaturnya keamanan dan penyelenggara kegiatan, perlu cermat dalam menyelenggarakan kegiatan, khususnya dengan potensi kehadiran kerumunan dengan karakter yang tertentu.

Karakter kerumunan itu, hadir dan muncul secara ekspresif, sebagai sebuah karakter social yang 'genuin' muncul dalam sebuah komunitas. Apakah memang hal itu bisa dibina dan dikendalikan? butuh waktu untuk melakukannya. Hal pokok yang perlu dilakukan, hendaknya para penyelenggara mengubah pola, dari mendatangkan kerumunan yang agresif, ke kerumunan yang sistematis terstruktur. Mekanisme pemanfaatan voucher dengan jadwal kehadiran tertentu, akan jauh lebih menertibkan kehadiran kerumunan agresif tersebut.

Perubahan pola kehadiran kerumunan itu, satu sisi merupakan bentuk pembelajaran dan pembinaan kepada masyarakat, tetapi juga mengubah karakter kerumunan pada masyarakat kita. Hanya saja, untuk konteks terakhir ini, siapapun kita, bahwa perbedaan karakter kerumunan tersebut, merupakan fenomena social yang perlu disikapi oleh para penyelenggara termasuk pemerintah saat ini.

KOIN, CICAQ DAN KITA

Mulai mencairnya sikap dari pihak manajemen RS OMNI Internasional, merupakan sebuah angin segar bagi pihak ter”pidana”. Hal ini pun, merupakan satu berita baik bagi Departemen Kesehatan yang tengah berusaha untuk melakukan dialog, dengan cara mediasi dalam menyelesaikan masalah hukum terkait dengan kasus “pencemaran nama baik”. Sengaja kita tulis, dengan tanda “...”, karena publik masih sangat-sangat mempertanyakan keabsahan tuduhan tersebut. Hal yang terbaca oleh masyarakat umum, adalah karena masalah “curhat” di dunia maya, ibu Prita Mulyasari harus berhadapan dengan jeruji besi dan denda jutaan rupiah.

Bagi pihak RS OMNI dan pengacaranya, curhatan di dunia maya (email) bukan sekedar curhat dan tidak bernilai sepele. Kita harap maklum. Ini mungkin karena ada perbedaan sudut pandang dan kepentingan dalam memandang kasus tersebut. Namun, ‘radikalitas’ perspektif itu akan juga sangat terasa (dan dirasa menyayat hati) bila dicontohkan dengan kasus yang menimpa oleh Ibu Minah dengan kasus pencurian Kakao sebanyak tiga butir, namun kemudian malah berujung dirinya harus mendekam dalam penjara kurang lebih 2 bulan. Apa yang dilakukan Ibu Minah adalah sangat sederhana, selain jumlahnya kecil dan tujuannya pun adalah membantu kelangsungan hidupnya sendiri (baca : sepele).

Bila kita catat kembali, dari perspektif social dan moral sudah cukup banyak kejadian yang dianggap sepele namun berkembang menjadi masalah besar. Selain kedua kasus itu, kita masih

mendengar ada berita bahwa karena mencuri sabun, seorang kakek tua renta di Cirebon harus berhadapan dengan polisi. Mengapa hal ini terjadi ? sementara dilain pihak, banyak masalah besar malah yang lolos dari jerat hukum. Kalangan akademisi dan pejabat negaranya, hendaknya segera untuk merumuskan jawabannya terkait dengan masalah hukum ini ?

Di luar masalah itu, ada fenomena yang menarik dan perlu dicermati dengan seksama.

Pertama, publik atau rakyat Indonesia saat ini sudah tidak buta, dan memang tidak pernah buta. Rakyat Indonesia akan tetap dan senantiasa tetap untuk melek hukum. Persoalan di masa Orde Baru, lebih disebabkan karena ketidakberdayaan dalam bersuara dan berbuat, maka hasil cermatannya itu sulit disuarakan. Sementara di saat ini, rakyat kita sudah memiliki ruang yang terbuka dan memiliki keberanian yang jauh lebih besar dari apa yang kita perkirakan sebelumnya.

Bukti dari hal ini, adalah yaitu adanya keberanian untuk menyuarakan aspirannya, dan atau apresiasinya mengenai apa yang tengah terjadi. Jangankan masalah-masalah yang langsung terkait dengan perut dan dirinya, masalah politik yang biasanya dianggap sebagai 'konsumsi elit' pun sudah biasa dikonsumsi oleh masyarakat kita. Oleh karena itu, perubahan psikologi masyarakat seperti ini, tidak boleh diabaikan oleh siapapun.

Kedua, masyarakat kita, serendah apapun posisi sosial ekonominya, masih tetap dan selalu tetap memiliki solidaritas yang kuat. Jangan dilupakan, kebangkitan ekonomi nasional pun sesungguhnya berawal dari kelompok pedagang islam Indonesia kelompok kecil. Sarikat Dagang Islam adalah solidaritas pedagang

kecil di pesisir Jawa yang membangun solidaritas ekonomi di kalangan pribumi.

Bak pepatah sunda, “*sireum ge, ari ditincak-tincak teuing mah, ngegel*”. Artinya, kendatipun binatang itu kecil –seperti semut—namun bila diinjak secara semena-mena, dia akan melakukan perlawanan. Koin Prita adalah perlawanan semut yang kemudian menggurita menjadi sebuah kekuatan social dalam melawan OMNI Internasional. Demikian pula dengan fenomena perlawanan facebooker ketika melawan buaya. Facebooker bersatu dan bergandengan tangan dengan kekuatan cicak, yang kemudian bangkit merebut keadilan.

Ketiga, kedua hal tersebut mengantarkan kita pada satu kesimpulan sederhana. Untuk menjalani hidup dan kehidupan di Indonesia, keadilan ternyata masih perlu terus diperjuangkan. Banyak alasan yang menuntun kita harus terus merebut keadilan, diantaranya (a) penegakkan hukum kerap tampil dengan wajah yang berbeda disaat berhadapan dengan orang kecil dan orang besar, (b) banyak orang tak bersalah tertimpa musibah, atau (c) pengusaha tampak memiliki peluang menang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang tak mampu.

Dari kondisi itulah, maka keadilan dinegeri ini harus terus diperjuangkan dan direbut. Tidak ada kata lain, yang bisa mewakili pemahaman kita mengenai perkembangan hukum di Indonesia pasca reformasi ini.

Ketiga, bila trend ini dipegang, publik bisa mengambil satu kesimpulan umum, bahwa selain harus direbut, ternyata keadilan di Indonesia harus tetap melibatkan kekuatan publik. Suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox Dei*). Sedangkan bila rakyat tak

berusaha secara serentak, maka suara Tuhan atau suara keadilan dan kemahapenyayangan akan terpinggirkan dalam hidup dan kehidupan ini.

Perjalanan panjang kasus Bibit – Chandra, dapat diselesaikan dengan hadirnya “suara Tuhan”. Karena gerakan suara Tuhan itulah, kemudian mendesak (baca : nurani) para penegak hukum dan pemerintah, serta aparat hukum bergerak dengan sigap. Hasil dari gerakan suara Tuhan itulah, kemudian kasus ini sedikit banyak berkurang dan mereda, dan Bibit - Chandra pun kembali mendapat haknya untuk bisa bertugas di KPK.

Gejala serupa sedang tampak dalam kasus Prita vs RS. Omni Internasional. Kasus ini termasuk cukup panjang dan menguras perhatian publik. Selain karena berawal dari sebuah curhatan (baca : *curhat*), ternyata berujung pada tuntutan pidana dan perdata sekaligus. Dua tuntutan yang sangat “dahsyat” untuk ukuran ‘vonis’ terhadap tindakan curhatan. Selain itu, denda 204 juta pun terlayangkan dari pengadilan terhadap Prita.

Karena keputusan itulah, kemudian solidaritas rakyat (baca : rakyat) Indonesia bergerak. Mulai dari TK sampai PT. Dari buruh sampai Pejabat Tinggi Negara. Tanpa mengenal agama, suku bangsa dan ras atau profesi, mereka bergerak untuk satu kata “kumpulkan koin untuk Prita”. Banyak kalangan sudah maklum. Koin adalah sebuah simbol. Koin adalah simbol rakyat kecil. Dan Koin adalah simbol perlawanan terakhir dari rakyat terhadap ketidakadilan yang ada di negeri ini.

Sebagai penutup, dan ini yang perlu dicermati dengan seksama. Pemerintah khususnya, dan para penegak hukum umumnya, hendaknya tidak boleh menciptakan ruang gerakan massa dalam

menyelesaikan masalah hukum. Bila kita berkehendak untuk membangun masyarakat hukum maka masalah hukum harus diselesaikan oleh masalah hukum.

Kelemahan kita selama ini. Masalah hukum diselesaikan oleh masalah politik. Masalah hukum diselesaikan oleh ekonomi. Kita sangat setuju. Bila ada yang mengatakan bahwa kompleksitas bangsa ini yang paling sulit diurai adalah masalah hukum. Korupsi yang kini menjadi budaya-buruk di birokrasi atau eliy politik kita, adalah penggunaan sudut pandang dan kepentingan politik dengan ekonomi. Bila hukum bisa diintervensi oleg politik, maka hancurlah sudah masalah hukum tersebut.

Begitu pula sebaliknya. Bila masalah hukum diselesaikan secara politik, juga memiliki trend yang kurang baik. Sayangnya, ruang terjadinya 'perkawinan' kepentingan tersebut masih terus berjalan. Kasus Pansus Century tidak akan mampu melahirkan hasil kerja yang optimal, bila dalam proses pelaksanaannya dihiasi oleh kepentingan politik. Begitu pula, kasus hukum tidak akan berjalan secara benar dan objektif, bila masih membuka ruang intervensi ekonomi.

Penyakit kolusi, korupsi dan nepotisme, bila dicermati dengan seksama ternyata adalah bentuk nyata dari pelacuran kepentingan pribadi, kepentingan ekonomi dengan kepentingan nasional dan keadilan.pada konteks inilah, maka dalam rangka membangun Indonesia yang bersih, kita membutuhkan ketegasan diri dalam mengembangkan sudut pandang yang mandiri dan proporsional. Dengan cara seperti inilah, diharapkan kita dapat menemukan keadilan, sekaligus kenyamanan dan demokratis.

Sebagai tambahan, pelajaran dari Prita ini yaitu pentingnya Pemerintah memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat dapat memperjuangkan haknya. Kita takut jadi preseden buruk, bila setiap kasus yang melawan nurani publik, harus dilawan dengan kekuatan ril publik. Dua pengalaman terakhir ini, adalah bentuk demonstrasi baru dari masyarakat. Kalau dulu yang dikenal itu adalah unjuk rasa dengan demonstrasi dan orasi. Maka dalam kasus Bibit Chandar itu, dunia elektronik yang berjaya. Sedangkan dalam kasus Prita, kekuatan koin dari rakyat kecil yang memainkan peran. Sekali lagi perlu ditegaskan, bila pemerintah telat dan tak peduli dengan hal-hal seperti ini, saya khawatir, pengalaman ini akan menjadi preseden baru, bahwa “pengadilan harus kita rebut, dan keputusan pengadilan hanya bisa dilawan oleh kekuatan massa”. Itulah kesimpulan yang khawatir muncul di masyarakat. Namun perlu ditegaskan di sini, bahwa peluang persepsi itu muncul adalah sangat terbuka, bergantung pada kepekaan pemerintah dalam memahami psikologi masyarakat yang terbaru.

Kolonialisasi Hukum Rakyat

Padaroks yang sangat nyata. Sangat kasat mata. Gejala ini tengah muncul di tengah-tengah negeri kita. Pada satu sisi, Prita tengah menghadapi tuntutan hukum dan denda ratusan juta rupiah. Dia menghadapi ancaman itu, karena mengeluhkan nasib kesehatan dirinya di media elektronik. Namun akhirnya malah berujung derita yang berkepanjangan. Prita bukan saja dirugikan secara kesehatan, namun secara ekonomi, psikologis dan juga social. Tepat sudah bila dikatakan bahwa “dia sudah jatuh ketimpa tangga, dan ditimpukin orang, kemudian pada ditontonnya pula penderitaan itu”. Karena mengeluh, kemudian dirinya malah terkena jeratan hukum yang begitu berat. Walau kemudian, Prita bisa dibebaskan oleh kekuatan rakyat “koin prita”.

Pada sisi lain, kita pun melihat, mendengar dan membaca, Presiden SBY mengeluh dan merasa difitnah oleh seseorang atau sekelompok orang. Bedanya sangat sederhana, Prita berhadapan dengan meja hijau, kalau SBY malah bisa mengantarkan orang lain ke meja hijau.

Masih ingat dalam benak kita. Ketika dirinya merasa dirugikan dan kemudian mencurahkan kepada pihak pengadilan dan public, kemudian dia mendapat dukungan penuh untuk menyeret Zaenal Ma’arif ke pengadilan. Keluhan dan rasa ketidakadilan dari perlakuan orang lain,

bagi seorang penguasa dapat menyeret pelakunya ke pengadilan. Sedangkan, bagi seorang warga biasa, keluhan karena ketidakadilan orang lain dimaknai sebagai pencemaran nama baik, dan menyeret orang yang mengeluhnya masuk ke balik jeruji besi. Aneh dan sungguh sangat memprihatinkan.

Terhadap fenomena ini, kita semua tersentak dan sontak bertanya-tanya. Apa yang sedang terjadi pada Negara ini, dan apa yang terjadi pada hukum di negeri ini ?

Dugaan yang dapat diajukan dalam wacana ini, saya khawatir kita masih menjalankan sebuah hukum kolonial dan masih mengembangkan tradisi penegakkan hukum para kolonialis, khususnya kolonialisme Belanda. Dalam meneguhkan argumentasi ini, setidaknya kita menemukan ada beberapa indikasi yang dapat mengarah pada karakter hukum kolonial. Pertama, seperti sudah diungkapkan sebelumnya bahwa objek hukum yang banyak menderita itu adalah orang kecil. Masyarakat kecil, baik di desa maupun di kota adalah objek hukum yang paling menderita. Kasus Prita dan Minah (pencuri Kakao) adalah contoh nyata dari karakter yang pertama ini.

Di era kolonialisme dan imperialisme, rakyat kecil Indonesia adalah kelompok inlander yang sangat menderita. Kelompok ini bukan saja menderita secara ekonomi, tetapi menjadi objek ketidakadilan hukum yang diberlakukan pemerintah Belanda. Rakyat kita, tidak diizinkan mengeluh,

dan hanya punya satu kewajiban yaitu “tunduk patuh pada perintah penguasa”. Sementara hak yang dimilikinya yaitu berhak untuk menjalankan kewajiban itu sendiri. Karena kewajiban itulah, nasib Mpok Minah menjadi cermin awal dari karakter kolonisasi rakyat oleh penguasa.

Kedua, argumentasi hukum rakyat kecil tidak menjadi bahan pertimbangan dalam meringankan masalah hukum. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi pada para penguasa. Masih hangat dalam ingatan kita. Presiden Soeharto sulit disentuh hukum karena alasan bahwa berbagai tindak atau kebijakannya adalah memiliki alasan kuat dalam membangun bangsa. Begitu pula argumentasi Sri Mulyani dan Boediono tentang Bank Century. Bila pejabat berargumen bahwa yang dilakukannya itu adalah menyelamatkan bangsa dan Negara, (walau memang ada keuntungan bagi pribadinya), dia bisa selamat dari jerat hukum. Sedangkan, kalau rakyat kecil yang berbuat, walau hanya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri (karena kelaparan), dan tidak mempengaruhi ekonomi global, tetap terjerat hukum.

Namun jelas sudah bahwa seseorang sulit dijerat oleh hukum ketika dirinya memiliki alasan rasional (dipahami) dalam menyelamatkan sesuatu yang dianggapnya (dalam persepsi pelaku dan pendukung) jauh lebih besar. Namun demikian, argumentasi kasus hukum itu ternyata tidak berlaku bagi Mpo Minah yang mengambil Kakao untuk sekedar menyelamatkan nyawa dirinya dan keluarganya.

Ketiga, meminjam analisis Deny Indrayana (2007, 2008) tentang adanya Mafioso di Indonesia, ditandai oleh adanya mafia peradilan. Penyelamatan hak hukum warga Indonesia bukan diselimuti perjuangan keadilan, namun lebih disandarkan pada 'transaksi ekonomi' itu sendiri. Para penegak hukum, tampak sigap dan bersungguh hati dalam membela klien yang memiliki kemampuan untuk membayar jasanya. Sementara kasus yang dialami oleh mereka yang tidak berkeuatan ekonomi, kurang mendapat perhatian.

Keempat, hukum di Indonesia seolah tidak mengenal psikologi kejahatan dan atau rasa keadilan. Hukuman kepada mereka yang merugikan Negara jutaan bahkan milyaran rupiah, jauh lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang sekedar 3 buah kako atau ngecharge hape. Tidak proporsional dan rasa keadilan yang timpang adalah bentuk nyata dari karakter hukum yang kita sebut kolonialis.

Sudah tentu, dan sangat jelas dapat kita rasakan bahwa hukuman yang dirasakan Mpo Minah amat sangat membuat jera pelaku. Tetapi, hukuman yang diterima oleh koruptor tidak akan membuat jera, dan jauh dari menjerakan. Hal ini dibuktikan, dengan masih terus bermunculannya pelaku-pelaku korupsi di Indonesia. Kondisi inilah, yang kita sebut buah dari penegakkan hukum yang tidak berkeadilan hanya akan melahirkan kejahatan berikutnya.

Secara pribadi, ada fenomena yang lebih memprihatinkan lagi. Bila kondisi ini terus dibiarkan, bukan saja bangsa kita

mengalami darurat keadilan, tetapi akan melahirkan perlawanan dari rakyat terhadap hukum. Praktek main hakim sendiri, dan atau pelanggaran terhadap aturan dan norma hukum yang banyak dilakukan oleh masyarakat, atau rendahnya penghormatan warga terhadap para penegak hukum adalah buah dari adanya ketidakadilan penegak hukum dalam melakukan penegakkan hukum. Semua tindakan ketidaktaatan warga terhadap hukum itu adalah bentuk lain dari perlawanan hukum dari rakyat terhadap hukum Negara.

Hal tersebut terjadi, bukan disebabkan karena rakyat kita tidak mau taat kepada hukum. Hal yang pasti, justru sebaliknya. Mereka lakukan pelanggaran hukum karena dia sangat paham terhadap kondisi hukum di Indonesia. Menyelesaikan hukum di Indonesia seolah tidak akan selesai secara hukum, dan hanya bisa selesai oleh cara politik dan atau ekonomi. Oleh karena itu, penyelesaian masalah-masalah hukum banyak dilakukan dengan cara di luar hukum itu sendiri.

Kelima, meminjam pandangan dari Amin Rais (2009), di era kolonialisme Belanda dulu, kekuasaan dipegang oleh penguasa yang bergandengan dengan pengusaha (VOC). Kompeni Belanda adalah istilah yang ditunjukkan pada penjajah Belanda dulu. Istilah kompeni itu sendiri mengandung makna pengusaha. Oleh karena itu, hukum yang beraroma kolonialis itu adalah hukum yang dipegang oleh penguasa dan pengusaha.

Implikasi dan dampak nyata dari kondisi ini, yaitu hilangnya rasa keadilan. Dalil hukum yang berlaku dari sistem itu adalah sangat sederhana. “Hukum hanya mampu menjerat orang kecil, dan tidak untuk orang Besar”. Bagi orang kecil, gunakan hukum material sedangkan terhadap penguasa, gunakan kepentingan politik atau ekonomi. Akibat dari kedua hal itu, sekali lagi harus ditegaskan yaitu hilangnya rasa keadilan.

Terakhir, bila sifat ini dibiarkan, maka wajah hukum kolonialis itu akan semakin kentara. Kita memang tidak mengulas secara keseluruhan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum kolonialisme Belanda itu. Namun bila, hukum di kita ini hanya berpihak pada penguasa, pengusaha, atau elit politik yang berkiblat ke penguasa, maka karakter kolonialisme itu sudah muncul.

Dalam menyelesaikan masalah ini, sudah tentu kita satu gerakan intelektual dalam mengubah karakter hukum di Indonesia menuju hukum Indonesia yang modern, demokratis dan berkeadilan. Melalui gerakan ini, diharapkan akan terjadi perubahan paradigma berfikir para penegak hukum terhadap hukum itu sendiri.

KRIMINALISASI PUBLIK DAN DEMOCIDE

Siapapun yang bersalah, hendaknya dikenai hukuman. Itu adalah rumus pasti, dan tidak boleh ditolerir. Logika dan pemahaman seperti ini, amat telanjang untuk dipahami. Setiap orang akan dengan mudah untuk memahaminya, dan mudah untuk menyetujuinya. Apalagi, bila dalam proses persidangan, fakta-fakta hukum menunjukkan bahwa bukti-bukti yang ada memperkuat si terdakwa telah melakukan tindak pidana kesalahan. Sebagaimana yang terjadi pada kasus AAL, terkait dengan pencurian sandal jepit seorang anggota kepolisian.

Tetapi, mengapa kasus ini menjadi istimewa ? dan mengapa, kasus ini menjadi pemberitaan besar-besaran dari berbagai penjur media massa baik di dalam maupun di luar negeri ? Tentu jawabannya, bukanlah semata-mata karena persoalan sentimen, atau kegenitan publik, tetapi lebih merupakan bentuk kepedulian dan kepekaan hukum publik terhadap pentingnya keadilan hukum di negeri ini.

Di saat, negeri ini tidak memiliki kemampuan yang tegas dalam memberangus korupsi, atau menindak kejahatan-kejahatan yang jauh lebih substansial, pihak kepolisian dan hakim malahan mempertontonkan 'kekuasaannya' dihadapan anak kecil, dihadapan rakyat kecil dan dihadapan orang-orang yang tidak berdaya, dan kejahatan ekonomi yang memiliki pengaruh kecil terhadap perekonomian negara.

Di lain pihak, tradisi 'mempertontonkan kekuasaan' dihadapan rakyat kecil ini, sesungguhnya bukan saja pada kasus tersebut. Pihak kepolisian khususnya, kerap kali mempertontonkan kekuasaan-hukumnya dihadapan rakyat.

Bagi rakyat kecil, walau SIM sudah punya, STNK pun dibawa, tetapi tetap saja kita sering kena tilang. Ternyata, alasannya adalah karena kaca spionnya tidak standar. Lebih ekstrim lagi, menurut versi rakyat kecil lainnya, polisi di jalanan kerap kali mencari-cari kesalahan kecil kita, hanya sekedar untuk bisa menilang kendaraan kita, dan kemudian memaksa kita untuk melakukan sidang di tempat. Bila kita tidak bersedia sidang di tempat, dia kemudian memperlihatkan UU Lalu Lintas, yang menunjukkan bahwa denda terhadap pelanggarannya tersebut berdampak hukuman penjara sekian tahun sekian bulan, dan atau denda jutaan rupiah.

Sontak saja, bagi seorang rakyat biasa, yang tidak paham hukum dan atau tidak punya pengalaman hukum yang baik, dia akan langsung terpukul KO. Daripada mendapatkan resiko yang jauh lebih berat dan tidak mungkin dia bisa hadapi, maka lebih baik melakukan sidang ditempat dengan membayar denda sekian ribu rupiah tanpa kuitansi dan tanda bukti pembayaran sedikitpun.

Fenomena mudahnya mempertontonkan kekuasaan hukum dihadapan publik, dengan maksud untuk meraih kepentingan pribadi inilah, yang dapat kita sebut sebagai kriminalisasi publik. Aparat hukum, baik itu kepolisian maupun penegak hukum yang lainnya, bahkan juga parat birokrasi lainnya, potensial melakukan tindakan kriminalisasi publik.

Seorang penguasa, dalam sebuah birokrasi tertentu, potensial melakukan kriminalisasi publik. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, staff atau aparatnya ditakuti-takuti dengan ancaman pemutasian dari jabatan dan tempat kerjanya, bila tidak mau melakukan tugas sebagaimana yang diinginkannya. Dengan wajah kekuasaannya itu, kemudian dia menampakkan diri bukan lagi sebagai seorang pemimpin tetapi 'seorang penguasa' yang menebar aura kekuasaan dan ancaman kepada bawahannya. Daripada di mutasi, maka bawahannya takut dan kemudian turut serta pada kemauan sang penguasa tersebut. Itulah kriminalisasi publik yang dilakukan oleh seorang penguasa birokrasi.

Bercermin pada kasus-kasus seperti itu, setidaknya kita menemukan ada beberapa indikator yang menunjukkan gejala kriminalisasi publik. *Pertama*, pemerintah dan atau penegak hukum, lebih menonjol menggunakan pendekatan kekuasaan daripada pendekatan kemanusiaan. Pelaku kejahatan dan/atau rakyat pada umumnya, diposisikan sebagai objek kekuasaan, yang bisa diancam, ditakuti-takuti dan dijebloskan ke balik penjara sesuai dengan 'mekanisme' yang disusunnya sendiri oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Ciri utama dari pendekatan kekuasaan itu, adalah 'memaksa', memaksa pihak terdakwa harus 'mengakui' sebuah tindakan, yang belum tentu dilakukannya.

Kedua, penegakkan hukum secara kaku dihadapan rakyat yang tidak paham terhadap hukum, sehingga pada akhirnya, rakyat kecil banyak yang terkena hukum secara maksimal. Kasus-kasus pencurian sandal (AAL, Palu, 2012) dan pencurian 3 butir kakao (Nenek Minah di Purwokerto, 2009) adalah contoh nyata dari kriminalisasi publik. Aparat hukum, merasa lebih paham dan begitu kaku dalam menggunakan ketentuan hukum dihadapan rakyat yang tidak memiliki pemahaman hukum.

Kita sebut kaku, karena dalam kasus-kasus seperti itu, masih ada ruang penyelesaian yang jauh lebih proporsional. Satu sisi, pelakunya adalah rakyat kecil, individual, dan tidak memiliki imbas ekonomi secara nasional. Pendekatan kekeluargaan akan jauh lebih bermakna dibandingkan dengan pendekatan kekuasaan.

Ketiga, ketidaksimetrisan aksesibilitas terhadap hukum. Sebagaimana dipahami bersama, bahwa dalam kasus hukum seorang terdakwa memiliki hak untuk mendapat pengacara atau penasehat hukum. Untuk kasus-kasus yang besar, seperti korupsi dan atau yang melibatkan pejabat tinggi, posisi pengacara atau penasehat hukum itu begitu kuat, sehingga proses hukum bisa berjalan lambat dan bahkan bisa berbalikan dengan opini publik sebelumnya. Bila sebelumnya diduga korupsi, namun hasil dari persidangan bisa bebas tanpa syarat. Hal itu, bisa jadi –salah satu diantaranya, karena adanya peran dari para pengacara itu sendiri. Sementara dihadapan rakyat kecil, baik fungsi pengacara tidak optimal, kekuasaan hakim dan kepolisian begitu sangat kuat, sehingga rakyat yang memiliki akses terhadap hukum sangat kecil kerap kali menjadi korban, dan harus merelakan diri tinggal di balik penjara.

Terakhir, ketajaman hukum lebih tampak pada kelompok bawah. Bila hukum sudah berposisi sebagai ‘alat kekuasaan’, aparat hukum akan lebih kuat dalam menunjukkan diri sebagai aktor kriminalisasi publik. Situasi seperti itu, kekuatan hukum lebih tajam ke arah rakyat dibandingkan kepada pejabat. Rakyat, apakah dia itu bersalah atau tidak, akan dengan mudah terkena hukum, sedangkan bila ada pelaku pejabat yang melakukan kejahatan, kemudian dia melakukan tebang pilih.

Fenomena kriminalisasi publik ini, bila dibiarkan terus, akan menjadi trend munculnya *democide*. Rummel (1994) memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *democide* itu adalah pembantaian atau pembunuhan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada rakyatnya, dengan alasan politik atau perbedaan kepentingan politik. Karena alasan politik atau kepentingan pragmatis para penguasa, rakyat kemudian dibantai. Banyak faktor yang mendorong pembantaian rakyat oleh pemerintahnya sendiri, misalnya saja karena dorongan pengusaha, perbedaan paham politik, perbedaan sikap politik, atau karena kerakusan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tersebut. Dengan kekuasaannya dalam mengendalikan kekuatan kepolisian dan militer, penguasa kemudian melakukan pembunuhan terhadap rakyatnya sendiri.

Bila indikasi-indikasi seperti itu tampak, maka kasus-kasus yang terjadi di Mesuji Lampung dan atau di Bima, dapat dikategorikan sebagai praktek *democide* yang dilakukan aparat kepolisian (baca : pemerintah). *Democide* pun dapat terjadi, bila pihak kepolisian lebih senang menggunakan kekerasan, termasuk peluru dalam menyelesaikan masalah dengan rakyat-rakyat kecil, sedangkan dengan koruptor atau penjahat kelas kakap 'menggunakan diplomasi dan dalih' untuk menghindarnya.

Meminjam istilah Johan Galtung, *democide* dapat kita sebut sebagai bentuk kekerasan fisik. Sedangkan, kriminalisasi publik adalah *democide* secara psikis. Sebagai pemilik kekuasaan, aparat hukum, kepolisian atau pemerintah pada umumnya, menggunakan kekuasaanya untuk 'memuaskan' hasrat kekuasaannya dihadapan rakyat yang tidak berdaya. Dengan dalil yang dibuatnya sendiri, dengan argumentasi tentang mekanisme sebagaimana yang disusunnya berdasarkan persepsinya sendiri,

pemerintah melakukan tindak kriminalisasi terhadap rakyatnya sendiri. Rakyat senantiasa diposisikan sebagai pihak lemah, dan pihak yang harus menerima hukuman, tanpa pembelaan dan keadilan.

Dalam situasi seperti itu, sudah selayaknya, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, melakukan reformasi budaya kerjanya. Aspek ini menjadi penting. Andai, moto kepolisian itu benar, yaitu melayani rakyat, maka pendekatan humanisme hendaknya jauh lebih diutamakan dan dikedepankan, daripada pendekatan kekuasaan. Sangat benar, bila hukum harus tegak, mekanisme hukum harus berjalan, buktir material dijadikan bukti, tetapi, dihadapan rakyat, keadilan jauh lebih penting dibandingkan semua dalil yang dikemukakan tersebut.

Kristus dan Kenegarawanan

Hari Natal mengingatkan kita pada sejarah Yesus Kristus. Hari Natal itu sendiri adalah hari kelahiran Yesus Kristus, pemilik jiwa pengorbanan yang agung. Satu sesi kehidupan Kristus yang tak bisa dilupakan banyak pihak, yaitu pengorbanannya. Itulah puncak spiritualitasnya dan itulah puncak keluhuran kemanusiaan dan peribadahan. Pengorbanan Kristus adalah pengorbanan total demi kemaslahatan manusia, kemanusiaan dan keselamatan manusia. Pada titik inilah, pengorbanan diri merupakan bentuk nyata dari jiwa Kristus dalam menjaga misi penyelamatan manusia.

Lima moralitas Kristus

Dalam suasana perayaan natal sebagaimana yang dirayakan oleh sebagian saudara kita di Indonesia ini, setidaknya ada lima titik moralitas yang perlu direnungkan bersama.

Pertama, pengorbanan adalah puncak dari ketulusan jiwa seseorang dalam memperjuangkan visi dan misi hidup. Tidak ada kata lain, tidak ada langkah lain, tidak ada alasan lain, selain bentuk pengorbanan. Pengorbanan adalah bentuk nyata ketulusan atau keikhlasan seseorang dalam perjuangannya. Ketika kita rela berkorban untuk orang lain, maka orang lain akan merasa rela berkorban untuk kita semua, dan kehidupan ini. Sedangkan, bila kita mengorbankan orang lain, maka jangan kaget bila mereka

pun akan berusaha keras untuk mengorbankan diri kita demi kepentingannya sesaat.

Kedua, dalam hematian sosiologi, kelahiran manusia itu hanya akan dikenang manakala dirinya memiliki catatan indah diujung hidupnya. Ini hukum sosial. Sedangkan mereka yang memiliki catatan buruk diujung hidupnya, atau ujung karirnya, tidak akan dikenang mengenai masa kelahirannya. Pengorbanan Yesus Kristus diakhir hayatnya, adalah pelecut sejati hasrat manusia untuk terus merayakan hari kelahirannya.

Analisis ini mengantarkan kita pada satu kesimpulan bahwa penghormatan manusia itu dilakukan terhadap kualitas hidupnya diakhir. Citra manusia diakhir hidupnya adalah aura yang akan memancarkan ke citra awalnya. Citra buruk di akhir akan melenyapkan seluruh aura perjalanan sejarah hidupnya.

Menarik untuk dicermati di sini, siapapun kita, apakah Presiden, Menteri, Gubernur BI, Gubernur, atau jendral sekalipun, hanya akan dikenang sejarah hidupnya manakala memiliki citra positif diujung karirnya. Di masa pelantikan (baca : *natalitas/kelahiran*), bisa jadi mereka memiliki citra yang positif. Namun bila diujung karirnya mereka menunjukkan sikap yang kurang selaras nilai-nilai kemartabatan yang luhur, maka track record itu akan sirna seketika itu pula.

Pada konteks itulah, sosok Menteri Keuangan atau Gubernur BI, menjadi kontroversial dihadapan masyarakat. Satu kelompok menganggap percaya dan sangat tidak percaya bila mereka bertindak melawan hukum terkait Century. Sikap ini mereka ajukan, berdasarkan pengalaman dan track record kelahirannya profesionalisme mereka. Sedangkan pihak lain, malah

menemukan indikasi bahwa ujung karirnya tidaklah semulia dengan masa kelahirannya. Sehingga kelompok pengkritik menganggap bahwa Menkeu dan Gubernur BI bertanggungjawab terhadap kasus Century.

Persepsi manusia seperti ini memang tidak adil, namun itulah persepsi manusia. Manusia akan dikenang, bila ujung hidupnya diakhiri dengan puncak kemartabatannya sendiri. Karena ujungnya bermartabat, maka manusia mengenang pula awalnya.

Ketiga, pengorbanan kadang tidak memperdulikan masalah formalitas dan legalitas. Pengorbanan adalah usaha nurani untuk menegakkan kemanusiaan dan kemartabatan hidup. Yesus Kristus berkorban bukan karena dirinya salah. Begitu pula dengan Socrates. Socrates rela menghebuskan nafas dengan cara meminum racun, bukan karena dirinya mengakui kesalahan, melainkan demi tegaknya moralitas dan kemartabatan dirinya dihadapan manusia dan kehidupan.

Socrates pada akhirnya wafat pada usia tujuh puluh tahun dengan cara meminum racun sebagaimana keputusan yang diterimanya dari pengadilan dengan hasil voting 280 mendukung hukuman mati dan 220 menolaknya.

Socrates sebenarnya dapat lari dari penjara, sebagaimana ditulis dalam Krito, dengan bantuan para sahabatnya namun dia menolak atas dasar kepatuhannya pada satu "kontrak" yang telah dia jalani dengan hukum di kota Athena. Keberaniannya dalam menghadapi maut digambarkan dengan indah dalam Phaedo karya Plato. Kematian Socrates dalam ketidakadilan peradilan menjadi salah satu peristiwa peradilan paling bersejarah dalam masyarakat Barat di samping peradilan Yesus Kristus.

Keempat, bercermin pada kisah Kristus dan juga Socrates, sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa menjadi terhukum bukan berarti terhina. Orang yang menjadi korban bukan menjadi orang terhina. Setidaknya itulah yang terjadi pada Kristus atau Socrates. Kendati beliau menjadi orang terdakwa, dan kemudian mendapat hukuman, nama baik dan keharumannya malah menjulang tinggi ke permukaan, melebihi pihak pengadilan dan juga lawan-teologisnya (baca : lawan politik).

Prita Mulyasari adalah contoh ril di kehidupan bangsa Indonesia. kendati menjadi pesakitan, dan didenda 204 juta rupiah, Prita tidak menjadi orang terhina. Dalam persepsi public, malah dirinya diposisikan sebagai orang yang bermartabat dan menjadi figur pejuang keadilan di Indonesia. Dalam situasi buram dan kusamnya potret pengadilan dan keadilan, menjadi terdakwa jauh lebih terhormat daripada menjadi pemenang dalam pengadilan.

Terakhir, yang ingin dikemukakan di sini Kristus lahir sebagai mukjizat dan wafat pun dalam posisi penuh keagungan. Demi sebuah kehormatan, Kristus dan Socrates lebih mengedepankan moral daripada hokum-formal, yang notabene hukumnya belum 'tercerahkan'.

Meminjam istilah Jalaludin Rakhmat (2007), tidak selamanya kita harus mengedepankan hokum (baca : *fiqh*). Dalam konteks kehidupan nyata, moral jauh lebih penting, jauh lebih strategis, jauh lebih bermakna bagi kehidupan manusia. Dahulukan moral (akhlak) daripada hukum (*fiqh*). Pada kehidupan inilah, manusia akan diukur oleh moralitasnya, dan bukan sekedar legalitas-formal (perspektif hukum).

Carut marutnya etika birokrasi di Indonesia selama ini, kadang lebih disebabkan karena elit politik kita lebih mengutamakan hukum (legal formal) daripada moral (akhlak). Sekedar contoh, Menteri Keuangan Jepang Shoichi Nakagawa hari Selasa mengatakan akan mengundurkan diri, setelah membantah sedang mabuk ketika menyampaikan sambutan yang kacau dan tidak jelas di pertemuan Kelompok Tujuh di Roma (Tempo. 17/02/2009). Perilaku inilah, yang kita sebut sebagai perilaku yang lebih mendahulukan moral daripada hukum.

Penutup

Energi bangsa ini akan terus carut marut dan terlarut-larut. Energi rakyat dan elit politik jauh lebih banyak dikeluarkan untuk masalah menangani masalah pribadi, daripada masalah bangsa dan negara. Isu mengenai pergantian yang mendadak (menkes), kasus Bibit-Chandra, kisruhnya pengelolaan sepakbola Nasional, dan kaburnya skandal Century, semua ini menguras perhatian sekaligus energi dari pemerintah.

Perlu dicermati dengan seksama. Pengorbanan dan pengedepan moral, memiliki efek yang lebih positif bagi menjaga stabilitas dan kelanjutan pembangunan. Sedangkan penguraian legalitas dan status hukum, lebih banyak mencari kebenaran posisi pribadi dan menghabiskan energi bangsa. Tidak mengherankan pula, bila kemudian muncul pandangan bahwa hanya untuk mendapatkan legalitas dan atau kepastian hukum, agenda pembangunan banyak yang terbengkalai.

Hukum harus jadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun bila mencermati apa yang dilakukan Kristus,

alangkah indahny bila negeri ini diwarnai oleh para pejabat negara yang mampu mengedepankan semangat pengorbanan, dan moralitas kenegarawanan. Semangat pengorbanan dan moralitas itulah, keluhuran budi dan martabat manusia terjaga dengan seksama.

KAMPANYE ISU TERMINALIS

Klasik. Itulah apresiasi sebagian kalangan terhadap apa yang dikampanyekan para kandidat dalam Pilgub atau Pilkada Kabupaten/Kota saat ini. Mereka cukup banyak mengeksploitasi harapan-harapan besar mengenai pasca pilkada dihadapan masyarakat. Ada yang memberikan janji mengenai sekolah gratis, biaya kesehatan murah dan tambahan lapangan kerja. Isu-isu seperti ini merupakan satu isu yang ‘strategis’ atau cocok untuk masyarakat Indonesia yang telah lama menderita krisis ekonomi berkepanjangan.

Namun demikian, akankah hal ini akan mudah direalisasikan di masa pemerintahannya nanti ? ini adalah pertanyaan penting dan wajib untuk diperhatikan oleh semua pihak, khususnya masyarakat pemilih. Karena bila jawaban kita masih negative, maka pilihan politik pun harusnya dilakukan secara selektif, dan bukan ditentukan oleh janji manis semata.

Rumusan visi dan misi adalah sesuatu hal penting. Menurut ilmu manajemen yang baru, kesuksesan seseorang dalam mewujudkan kepemimpinannya perlu didukung oleh kepastian rumusan visi dan misi. Dengan kata lain, hadirnya visi dan misi merupakan bukti lain mengenai rencana kerja di masa depan. Namun demikian, akankah rencana kerja merupakan satu rencana kerja yang rasional dan berpeluang terwujud ?

Terhadap kondisi ini, ada lima alat ukur yang dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam menjelaskan atau mengkritisi isu-isu kampanye yang dilakukan para kandidat saat ini.

Pertama, kemampuan real kandidat. Ini adalah satu hal penting dalam mengukur kandidat mengenai janji-janji politiknya. Dalam ukuran tertentu, setiap kandidat telah memiliki *trackrecord* kemampuan dirinya dalam membangun diri, membangun organisasi atau membangun instansinya. Orang *incumbent* dapat dengan mudah diukur kemampuannya dalam mengelola pembangunan wilayah. Apapun hasilnya, keadaan hari ini adalah realitas kemampuan manajerial dirinya dalam mengelola pembangunan di Jawa Barat. Ini adalah salah satu alat ukur nyata dalam menilai seorang kandidat, dan pada wilayah inilah Danny Setiawan atau Numan A Hakim dapat dipotret. Sementara bagi kader yang lain, misalnya calon dari militer, dapat diuji dari kemampuan dirinya dalam membangun instansi unit kerjanya. Masyarakat harus ingat ketika dia menjabat sebagai Pangdam, sebagai menteri, atau dalam tugas-tugas sosial lainnya. Pada konteks inilah, kandidat Iwan Sulandjana atau Agum Gumelar dapat dianalisis. Sedangkan untuk kandidat dari lainnya, masyarakat pun dapat melihatnya dari kemampuan dirinya dalam membangun organisasi, baik organisasi profesi, organisasi politik maupun organisasi agama. Pada konteks yang terakhir itulah, pasangan Hade dalam pilgub Jabar perlu diposisikan.

Bangsa kita memang belum menganut prinsip kaderisasi yang ketat atau disiplin kader yang professional. Bila prinsip ini sudah dibangun, mungkin dalam satu waktu, pilgub itu dapat dipililh dari kepala daerah – kepala daerah yang berbakat dan berhasil. Hasil pembangunan di daerah –yang lebih rendah—akan menjadi success story atau modal politik untuk berkompetisi pada pilkada

di jenjang yang lebih tinggi (misalnya pilgub atau pilpres). Melalui model pilkada seperti ini, masyarakat tidak akan mengalami kesulitan untuk menilai kemampuan real kandidat kepala daerah.

Kedua, analisa isu. Bila disimak dari sudut pandang sosiologi, isu kampanye pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni isu terminalis dan isu instrumentalis. Yang dimaksudkan dengan isu terminalis, yaitu isu-isu kampanye yang dirumuskan secara normative dan atau tujuan akhir (terminal). Sekedar contoh, *statement* yang termasuk dalam isu terminalis yaitu “meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas kesehatan, membangun sekolah gratis”. Isu-isu ini merupakan isu yang masih normative dan berkarakter terminalis. Dikatakan sebagai isu terminalis, karena isu-isu tersebut masih merupakan mimpi-mimpi besar bagi masyarakat Jawa Barat khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Untuk meraih tujuan normative tersebut, para kandidat harus memiliki kemampuan lain dalam mengimplementasikannya. Kemampuan operasional inilah yang kita sebut sebagai kemampuan instrumental dalam mewujudkan isu-isu terminalis.

Sampai pada hari ini, isu-isu kampanye belum mampu menunjukkan hasrat politik yang kuat dari kandidat untuk mengemukakan isu instrumentalis dalam mewujudkan isu terminalis. Misalnya untuk mewujudkan sekolah gratis, apa yang mau dilakukan ? adakah anggaran daerah itu cukup untuk mendukung terwujudnya sekolah gratis ? untuk membuka lapangan kerja, adakah perusahaan mampu meregulasi peraturan bisnis dan usahanya, atau adakah anggaran pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru ? untuk menyediakan layanan

kesehatan yang murah, adakah kemampuan pemerintah meregulasi bidang kesehatan secara radikal dihadapan liberalisasi kesehatan dan kapitalisasi kesehatan global ?

Kelemahan yang ada selama ini, para pemimpin kita cenderung lebih mampu merumuskan ide normative dibandingkan ide operasional. Banyak diantara kita, yang masih lemah dalam menunjukkan kemampuan-kemampuan operasional. Oleh karena itu, sekali lagi perlu ditegaskan, bila para kandidat lebih banyak bertutur tentang isu terminalis, sesungguhnya kita jangan dulu berharap besar terhadap kemampuan dirinya dalam merealisasikan visi-misi atau isu kampanye yang dituturkannya di atas panggung.

Ketiga, idealnya masyarakat harus mendapatkan informasi platform rancangan pemerintahan di masa depan. Mirip dengan pilpres, pada dasarnya seorang kandidat perlu memberikan gambaran mengenai agenda pembangunan yang diterjemahkan dengan agenda pemerintahannya, lebih tepatnya isu kabinet.

Isu ini menjadi penting terkait dengan asumsi bahwa seorang pemimpin tidak akan dapat berbuat banyak, bila tidak memiliki tim pemerintahan yang solid. Dalam birokrasi yang korup, dan tindak kejahatan Negara yang sudah terstruktur, kehadiran pemimpina dalam puncak kekuasaan tidak akan memiliki dampak yang nyata terhadap anjakan perubahan di masa depan.

Bagi para incumbent, kita tidak percaya akan mampu melakukan perubahan nyata pada periode kedua kepemimpinannya, bila dirinya tidak memilik agenda-tim pemerintahan yang baru. Bila incumbent akan tetap mengandalkan tim-pemerintahan yang ada selama ini, dan lebih lagi dengan budaya kerja yang ada selama ini,

maka jalannya pemerintahan tidak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah berjalan selama ini. Kecuali memang, bila hasil-hasil pemerintahan yang ada selama ini sudah dianggap mencukupi dan memuaskan kandidat incumbent tersebut.

Sementara bagi kandidat pendatang baru, akan mengalami kesulitan nyata bila tidak memiliki tim—pemerintahan yang solid. Dia akan menjadi ‘perawan masuk ke sarang penyamun’, yang akhirnya akan menjadi bulan-bulanan birokrasi. Dampak akhirnya sudah nyata, berbagai agenda yang dikampanyekan selama ini, akan sulit diwujudkan bahkan mustahil untuk bisa dilaksanakan.

Dalam masa orde baru, memang sudah ada pemeco ‘ganti pejabat ganti kebijakan’. Namun, kalimat ini lebih mengarah pada sindiran terhadap budaya formalisnya pejabat Negara. Perubahan yang dilakukannya tersebut tidak diikuti oleh perubahan perangkat khusus yang mampu mengawal perubahan sebagaimana yang diinginkannya. Pada konteks inilah, pengenalan terhadap platform pemerintahan baru dari kandidat menjadi penting untuk melihat keteguhan kandidat dalam melakukan perubahan nyata di Jawa Barat.

Selain ketiga aspek tersebut, ada aspek lain yang perlu dihindari oleh para kandidat. Kedua aspek ini, akan menjadi bagian dari faktor yang bisa mempengaruhi ketercapaiannya visi dan misi yang dikampanyekannya.

Pertama, kandidat akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan visi dan misi kampanye politiknya, bila isu kampanye saat ini lebih bersifat politis. Artinya, isu kampanye lebih banyak digunakan sebagai barang dagangan dan hasrat mulia pengabdian kepada masyarakat. Sebagai sebuah barang dagangan politik, maka isu

kampanye akan berusia seumur jagung. Isu kampanye akan turut lenyap ditelan waktu seiring dengan tuntasnya masa kampanye. Sehingga di kemudian hari, isu kampanye tersebut lebih banyak menjadi tulisan tangan yang tertera di papan pengumuman.

Berdasarkan hal seperti ini, rakyat Jawa Barat pada umumnya diharapkan untuk menunjukkan kecerdasan, kejelian dan kesadaran yang tinggi dalam memosisikan isu kampanye. Karena isu kampanye adalah isu politik dan politik adalah ilmu taktik. Sebagai isu taktik maka tidak mustahil isu-isu itu hanya sekedar sebuah dagangan belaka.

Kedua, kandidat akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan visi dan misi politik, bila dikemudian hari lebih banyak didialogkan dengan sponsor politiknya masing-masing. Bila sudah demikian, kesulitan menjalankan visi dan misi politik akan menjadi lebih jelas, seiring dengan tarik-menarik kepentingan politik para pemegang pilkada.

Ada sahabat yang menunjukkan sms dari rekanannya nun jauh di ujung selatan Jawa Barat. Dia berharap banyak untuk mendapat dukungan untuk memenangkan kandidat yang tengah diusungnya. Menurut pengakuannya, dia menjadi sponsor calon secara *all out* (habis-habisan), dengan harapan bila dia memang akan menjadi kenyataan impiannya untuk menjadi kepala dinas di daerah tersebut.

Membaca sms sahabat itu, kita patut untuk tersenyum. Dan terkait dengan masalah isu kampanye ini, kita pun dapat mengajukan pertanyaan kritis kepada kandidat, mampukah dia merealisasikan janji-janji politiknya, bila kemudian hari dia akan dihadapkan dengan kepentingan para sponsornya? terlebih lagi,

bila para kandidat itu hanya mampu merumuskan tujuan ideal, tanpa disertai dengan strategi operasional atau taktis dalam mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan cermatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelima aspek tersebut di atas, dalam pandangan penulis jelas-jelas akan menjadi bagian dari faktor yang dapat mempengaruhi suksesnya visi dan misi atau isu kampanye yang dipromosikan kandidat. Dan bila mereka tidak mampu memberikan jawaban positif terhadap masalah ini, yakinlah, isu kampanye hasalah isu hari ini, dan besok akan terbit matahari yang baru.

BAYANG-BAYANG PILKADA JAWA BARAT

Pilkada Jawa Barat semakin dekat. Secara geopolitik, ada yang memandang Jawa Barat –selain DKI Jakarta, sebagai parameter politik Indonesia. Dulu ditahun 1990-an, aktivis mahasiswa memiliki keyakinan bahwa dinamika politik mahasiswa Bandung adalah ‘nadi-terakhir’ politik Indonesia. Jika Bandung belum bergejolak, maka dinamika dan akselerasi politik nasional masih dianggap wajar. Sedangkan, bila mahasiswa Bandung sudah turun, ada yang menganggapnya masalah bangsa dan negara ini sudah parah.

Sehubungan hal ini, apakah masalah politik nasional saat ini, pun berpengaruh nyata terhadap pemilukada di Jawa Barat ?

Kita bisa mencatat, bahwa pasangan Aher-Dedy akan memiliki bayangan buram, dengan hadirnya kasus LHI (Lutfi Hasan Ishaq), yang notabene Presiden PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Kasus nasional itu, adalah kasus besar secara politik. Bukan karena korupsinya (saja), tetapi, karena menyangkut petinggi langsung dari sebuah partai yang selama ini dicitrakan bersih. Bukan karena tindak pidana korupsi (saja), tetapi karena peristiwa terjadi di pusaran pusat politik nasional, yaitu di Jakarta.

Pertanyaan sudah jelas, apakah kasus ini akan berimbas pada citra partai pengusung Aher-Dedy di pilkada Jawa Barat ?

Pertanyaan serupa, dapat diajukan pada pasangan Dede Yusuf – Laksamana. Pengusung utama partai ini, adalah Partai Demokrat, partainya SBY. Publik sudah paham, dan masih kuat dalam ingatan, bahwa SBY dengan partainya, masih memiliki pekerjaan rumah yang “amat sangat besar” harus diselesaikan. Selain kasus,

korupsi di Kemenpora yang menyeret salah satu petinggi Partai Demokrat, partai ini pun dianggap belum mampu bersikap tuntas dalam menyelesaikan kasus Century. Sehubungan hal ini, maka pertanyaan serupa tadi, dapat diajukan pula kepada pasangan Dede Yusuf –Laksamana.

Bagaimana dengan pasangan Irianto MS Syafiuddin-Tatang Farhanul, apakah mereka selamat dari bayang-bayang politik nasional ? belum tentu. Partai pengusung utama pasangan ini, yaitu Partai Golkar. Sementara pekerjaan rumah Partai Golkar, khususnya Ketua Umumnya, belum tuntas dalam menyelesaikan masalah Lapindo.

Lumpur Lapindo sudah menjadi masalah nasional. Tetapi, penyebab dan akar masalahnya, khusus bagi korban Lapindo, terasa tuntas diselesaikan oleh pejabat teras Partai Golkar. Rendahnya raihan *polling* ARB menurut sejumlah lembaga penelitian, menunjukkan bahwa tokoh politik ini, masih dianggap belum tuntas menunakan kewajiban politiknya kepada masyarakat. Sehingga wajar, bila kemudian, di dalam partainya sendiri, terbelah dua, antara mereka yang menganggap perlu ada ‘konvensi’ baru mengenai calon presiden dari partai Golkar, dan ada yang ‘keukeuh’ untuk menjual ARB sebagai capres pada pemilu mendatang.

Bila dilihat dari skala makro, bayang-bayang kasus nasional terhadap kandidat Gubernur dan Wagub dari partai Golkar ini, cukup krusial. Setidaknya, karena citra Partai Golkarnya sendiri, belum pulih dan ‘bersih’ dari citra-citra yang kurang positif di masyarakat.

Apakah dengan demikian, pasangan Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki, dan Dikdik Mulyana Arief Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib memiliki jalan mulus pada pilkada Jawa Barat kali ini ?

Calon independen ? mana contoh calon independen yang sudah menjadi berita nasional atau pembahasan publik karena prestasinya ? Untuk sekedar kasus kecil, kepala daerah di Kabupaten Garut (Aceng Fikri dan Dicky Chandra), yang maju dan menang dari pasangan independen, ternyata tidak mampu bertahan lama, dan tidak mampu menunjukkan kinerja yang ‘signifikan’ berbeda dengan kandidat dari partai politik. Bahkan, untuk kasus daerah ini, malahan berbuntut masalah dan merugikan masyarakat. Bahkan, kandidat dari jalur independen di Pilkada DKI Jakarta pun tidak meraih hasil yang memuaskan, padahal kandidatnya amat sangat menasional.

Kandidat dari jalur independen, adalah kandidat yang dianggap bersih. Bersih karena belum pernah bersentuhan dengan birokrasi dan atau partai politik. Ini adalah nilai jualnya. Tetapi dengan alasan seperti itu juga yang menjadi kelemahan dari calon independen. Mereka dianggap tidak memiliki kekuatan politik di parlemen, belum teruji kemampuan birokrasi dan organisasi, serta belum tampak hasil kerjanya.

Terakhir, adalah pasangan Paten. Apa bayangan dari kandidat ini ? apakah, orang akan menganggapnya memiliki potensi baik dan positif dalam perjalanan Pilkada Jabar ? bayangan tidak orisinal menjadi masalah bagi kandidat ini. Mulai dari pakaian, dan ‘ideologinya’ yang memanfaatkan Jokowi sebagai ‘teladan politik’nya, menjadi nilai yang lemah dari kandidat ini. Setidaknya, inilah yang dapat dirasakan. Batik adalah simbol tidak orisinal.

Strateginya terlalu 'mengcopy paste' dari gaya orang lain. Kemudian, ada juga yang menganggap pasangan ini terbalik. Sebagian (kecil) masyarakat melihat bahwa pasangan ini terbalik, bukan Rieke cagub dan Teten Masduki Wagub, tetapi Teten Masduki yang pantas menduduki jabatan sebagai Gubernur.

Bayang-bayangan kandidat Pilkada itu, adalah citra. Itu semua adalah citra politik. Kebenarannya bukan pada argumentasi, tetapi lebih pada pengaruh emosional terhadap calon pemilih. Saya melihat, bahwa bayangan-bayangan itu adalah hambatan yang harus disingkirkan. Memang benar, butuh kerja-kerja politik yang besar untuk membangun citra positif kandidat dalam melawan citra-citra politik di tingkat nasional itu.

Hal yang pasti dan ini yang menjadi kunci dari wacana ini, adalah akan terjadi perang citra politik antara citra nasional (citra umum) dengan citra lokal (pribadi) dari kandidat itu sendiri. Lebih sederhananya, saya melihat bahwa pemilukada Jawa Barat akan menjadi pertarungan mengenai pengaruh citra politik nasional terhadap citra politik dan kemenangan politik daerah. Secara sederhananya, kemenangan kandidat dalam Pilkada Jabar ini, bisa mengacu pada dua hipotesis, (1) pengaruh citra partai berpengaruh nyata terhadap sikap politik rakyat dalam pilkada, (2) pengaruh citra partai tingkat nasional terhadap sikap politik rakyat dalam pilkada. Dalam konteks itu pula, pertarungan kandidat di Jawa Barat ini, *akan menunjukkan antara kekuatan sentimen politik dan emosi, dengan kekuatan rasionalitas-individu kandidat.*

Untuk menjawab pertanyaan ini, kiranya kita akan menunggu sampai pada hasil Pilkada Jabar kali ini ?

MENIMBANG WAKIL KEPALA DAERAH DARI KARIR

Sikap politik dari Prijanto (wagub DKI Jakarta) dan Dicky Chandra (Wabup Kabupaten Garut) mengundang kepenasaran kita untuk terus merumuskan model pasangan kepala daerah. Mau tidak mau, peristiwa itu memberikan satu pekerjaan rumah, baik kepada elit politik, rakyat, maupun akademisi untuk merumuskan kembali eksperimen politik di Indonesia guna mewujudkan pemerintahan yang stabil (pasangan), dinamis dalam kerja dan efektif dalam pencapaian visi pemerintahan. Bila hal ini, tidak kita selesaikan saat ini, sudah tentu, ketidakstabilan politik ini, akan menyebabkan daerah di Indonesia mirip Indonesia 1955-1959, yaitu pasca pemilihan umum 1955.

Bagi sebagian orang, pandangan seperti ini dianggapnya sebagai terlalu berlebihan. Terlalu dini dan terlalu berlebihan, bila kejadian-kejadian seperti di atas, mirip dengan kondisi Indonesia pasca Pemilu 1955. Tetapi, bila diperhatikan, kondisi ketidakstabilan politik akibat ketidakstabilan pimpinan nasional (Perdana Menteri dan Kabinet saat itu), maka perjalanan roda pemerintahan menjadi mandeg.

Kondisi pemerintahannya yang tidak stabil, bisa terjadi bukan saja karena ada konflik antara Kepala Daerah dengan Legislatif, tetapi konflik di lingkaran internal kepala daerah pun (seperti Kepala dan Wakil Kepala Daerah), merupakan faktor dominan yang menyebabkan mandegnya pemerintahan. Karena, pada satu sisi, kestabilan pemerintah potensial terganggu, dan peta politik daerah pun terpecah.

Kondisi ini diperparah lagi, dengan tidak adanya pengalaman bangsa ini dipimpin oleh seorang pemimpin dengan stabil. Pada waktu, Moh Hatta mundur dari jabatan Wapres, kepemimpinan Soekarno goyah dan bahkan cenderung melakukan pelanggaran hukum. Sekedar perenungan kepada pemimpin bangsa ini, bila 1 Desember adalah sebuah momentum bersejarah di negeri ini, dimana 55 tahun silam, tepatnya 1 Desember 1956, Hatta mundur dari posisinya sebagai Wakil Presiden karena berbeda pendapat dengan Bung Karno, yang menyebabkan kursi Wapres lowong hingga tahun 1973. Perjalanan berikutnya, elit politik waktu itu malah memosisikan Soekarno menjadi Presiden Seumur Hidup. Akibat dari keputusan politik, atau lebih tepatnya hasrat kekuasaan elit politik saat itu, maka pemerintahan dan stabilitas politik Indonesia pun terganggu.

Pemimpin tunggal pun, terjadi pula pada pemerintahan Habibie. Selepas Soeharto menyatakan mundur pada tanggal 21 Mei 1998, Habibie menjadi Presiden ke-3 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jabatannya itu pun, tidak memiliki pendamping sebagai wakil presiden. Soeharto waktu itu, mundur karena di desak oleh kekuatan publik, karena dianggap sudah tidak mampu lagi mengendalikan kondisi bangsa, dan sudah 'berada' di luar kewajarannya memimpin negara berlama-lama.

Sayangnya, dari dua pengalaman tersebut, kondisi bangsa Indonesia tidak stabil dan tidak menunjukkan kemajuan di bawah kepemimpinan tunggal. Tetapi, pada sisi lain, bila situasi dan budaya politik bangsa Indonesia masih terus seperti ini, potensi lahirnya pemimpin tunggal akan terus terjadi. Karena berbagai alasan, seorang wakil kepala bisa mundur di tengah jalan. Istilah populernya, antara Kepala dengan Wakil Kepala bisa mengalami

pecah kongsi di tengah perjalanan. Bagaimana kita mensikapi realitas seperti ini ?

Ada banyak alternatif, mulai dari yang spekulatif sampai pada pemikiran-pemikiran praktis empirik. Yang paling spekulatif, sudah tentu adalah tidak perlu adanya wakil kepala daerah. Kepala daerah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, cukup oleh seorang pemimpin, dan tidak memiliki wakil kepala daerah. Para pembantu kepala daerah, langsung diserahkan kepada aparat atau birokrasi pada Pemerintahan Daerah terkait. Model ini, sesungguhnya, mirip dengan pemerintahan di tingkat Nasional, yaitu di saat Perdana Menteri hanya dipegang oleh seseorang, dan tidak perlu (baca : tidak harus) ada wakil perdana menteri.

Model dan pola kepala daerah tunggal ini, sesungguhnya tidak berarti bahwa Pimpinan Daerah hanya satu orang. Karena, bila dilihat dari struktur pemerintahan yang ada saat ini, di tingkat daerah, ada yang disebut MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang terdiri dari Gubernur, Pangdam, Kapolda dan Kajati, sehingga jalannya pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan sebuah pimpinan kolektif. Hanya saja, kepala daerah yang sifatnya politis (dipilih oleh rakyat), hanyalah satu orang, yaitu Kepala Daerah itu sendiri.

Model kedua, yaitu kepala daerah yang dibantu oleh wakil kepala daerah dari kelompok independen dan/atau akademisi. Wakil kepala daerah itu, harus benar-benar berasal dari independen dan/atau akademisi yang dipilih oleh Partai Politik yang sama dengan calon kepala daerah, dan bukan dicalonkan oleh partai lain, termasuk partai koalisi.

Andaipun ada koalisi partai, setidaknya, usulan pencalonan wakil kepala daerahnya, tetap dari calon kepala daerah, dan atau dari partai calon kepala daerah, yang kemudian dipilih dan ditetapkan oleh anggota partai koalisi. Dengan demikian, otoritas dan ikatan emosional wakil kepala daerah, tidak pada partai lain, dan tidak pada kelompok lain, melainkan hanya pada kepala daerah dan/atau partai kepala daerahnya sendiri.

Terakhir, yaitu wakil kepala daerah ditetapkan dari pejabat karir pada pemerintahan daerah terkait. Para pejabat karir, selain memiliki pemahaman yang baik mengenai daerahnya, dan wilayah kerja, juga loyalitas terhadap tugas pokok dan fungsinya sudah teruji, sebagaimana yang telah ditunjukkannya selama kerja. Selain itu, pejabat karir ini pun, relatif memiliki kepentingan yang kecil dibandingkan dengan calon wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik.

Ada titik kelemahan terkait dengan pejabat karir ini, yaitu citra kinerja ke-PNS-an, yang masih dianggap rendah. Tetapi, dari sejumlah pejabat karir yang ada, sesungguhnya masih tersedia kelompok pegawai negeri sipil yang memiliki kinerja baik, dan bisa dipertanggungjawabkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Wakil kepala daerah dari pejabat karir ini, selain mempersempit munculnya pecah kongsi di tengah jalan, Kepala Daerah akan memiliki pendamping pimpinan daerah yang benar-benar paham mengenai daerahnya. Hal itu berbeda dengan wakil kepala daerah, yang berasal dari partai politik. Kadang-kadang, mereka itu berasal dari kelompok orang yang tidak memiliki pengetahuan birokrasi, pengalaman organisasi dan atau pengalaman dalam birokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah, banyak yang 'ngatog' (meraba-raba) tugas

pokok dan fungsinya sebagai pimpinan daerah. Sehingga pada akhirnya, pada tahun pertama, otomatis mereka masih belajar memahami wilayah kerja. Sayangnya, bulan madu kepala daerah seperti itu, hanya berlaku pada tahun pertama. Karena tahun pertama, mereka sama-sama belajar memahmai daerah, dan tahun kedua sudah memulai muncul hasrat memiliki daerah, dan tahun ketiga baru beradu kekuatan untuk menguasai daerah, sementara tahun keempat dan kelima, berusaha menarik simpati kekuatan daerah, dan bila hasrat kekuasaan ini tidak terkendali maka akhirnya pecah kongsi juga.

Sehubungan hal ini, maka mempertimbangkan wakil kepala daerah dari unsur pejabat karir, hendaknya dapat dijadikan sebagai alternatif bagi elit politik ataupun para perumus peraturan perundangan mengenai Pemilihan Umum. Umur Indonesia masih panjang, dan tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan sesaat pencari kekuasaan belaka.

Pancasila Dalam Mozaik Kepribadian Indonesia

Pancasila adalah ideologi bangsa. Inilah pernyataan yang seringkali didengar selama masa Orde Baru. Dengungan pernyataan itu, merupakan lanjutan spirit kebangsaan yang lahir sejak masa pergerakan bangsa Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Dalam setiap kesempatan, baik peralihan jenjang pendidikan maupun diklat yang diselenggarakan Pemerintah, setiap peserta akan mendengar sekali atau lebih mengenai eksistensi Pancasila sebagai ideologi Bangsa.

Namun demikian, kendati tidak pernah ada survey ilmiah, namun orang memandang bahwa selepas Reformasi dengungan seperti yang dialaminya tempo dulu, hampir tidak terasa. Bahkan, jangankan untuk membicarakan Pancasila sebagai ideologi atau kepribadian bangsa Indonesia, untuk menyebut-nyebut Pancasila saja, mungkin hanya anak sekolahan saja yang mengucap ulangnya di saat upacara bendera.

Karena hal itulah, tak mengherankan bila kemudian muncul pertanyaan “benarkah Pancasila itu adalah –masih menjadi – ideologi bangsa Indonesia ?” pertanyaan ini tampak radikal atau malah melawan arus. Namun, bila dicermati dengan seksama, pertanyaan tersebut berarti dimaksudkan untuk mengingkari Pancasila. Makna dibalik pertanyaan itu adalah adanya satu keinginan untuk melakukan peneguhan ulang, mengenai ideologi bangsa Indonesia ini, dalam konteks kekinian, yang seolah saat ini sudah (sedikit) dilupakan sebagian orang.

Pertarungan ideologi di awal millenium III ini, pada dasarnya relatif reda. Pada millenium sebelumnya, istilah perang bintang atau perang dingin begitu kuat mewarnai geopolitik dunia. Pada masa itu, geopolitik dunia diwarnai oleh adanya perang ideologi antara Barat (kapitalisme atau individualisme) dan Timur yang berkarakter sosialisme. Perang ideologi ini, berakhir seiring dengan runtuhnya negara Uni Sovyet. Geopolitik kemudian berubah. Bergeser.

Di penghujung millenium, peristiwa WTC seolah membenarkan peta politik internasional yang diprediksikan oleh Huntingthon. Geopolitik dunia berubah, sudah bukan lagi antara Barat – Timur dalam pengertian Sosialisme-Kapitalisme, namun konflik peradaban antara Islam dan Barat. Geopolitik yang dipetakan ilmuwan Politik Amerika Serikat itu, sudah tentu tidak seluruhnya tepat. Namun, aura politik yang kini dirasakan adalah pertempuran peradaban antara Barat dan Islam.

Terorisme menjadi isu global. Kendati tidak harus identik dengan kelompok agama tertentu, namun isu ini menjadi salah satu isi dari geopolitik dunia terbaru. Peta sosialisme Vs kapitalisme, seolah mereda. Kendati negara pengusung sosialisme, malah kian menguat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Negara China. Negara yang terakhir ini, kini muncul sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia yang mampu mengimbangi kekuatan ekonomi Jepang dan atau Amerika dan Eropa. China dengan ideologi yang dianutnya, kini telah memosisikan diri sebagai salah satu kekuatan peradaban di dunia, baik dari sisi ekonomi, maupun sosial budaya.

Dari uraian tersebut di atas, pertanyaan yang dikemukakan di awal, muncul kembali, di mana posisi Pancasila berada ?

Ada lima pengalaman penting dari negara lain yang bisa ditarik dan perlu dijadikan bahan refleksi oleh bangsa Indonesia. Pengalaman penting ini, sudah tentu, merupakan cermatan sepintas lalu terhadap perjalanan sejarah ideologi bangsa kita, dan atau bangsa lain.

Pertama, sebuah ideologi adalah karakteristik mental pada umumnya dari masyarakat pendukung. Ini penting untuk dikemukakan. Karena tidak mungkin kita mengakui adanya sebuah ideologi yang tidak mencerminkan karakteristik mental dari masyarakat pendukungnya. Soekarno di masa lalu, benar, jika mengatakan Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia. hal itu terjadi, karena Pancasila digali dari bumi Indonesia. Pancasila adalah kristal dari peradaban atau kepribadian bangsa Indonesia. Persoalan sekarang adalah benarkah bangsa karakteristik mental bangsa kita ini masih mencerminkan hal-hal yang dinisbatkan dalam Pancasila ?

Ada yang memandang bahwa Pancasila adalah potret ideal bangsa Indonesia. Pancasila adalah kepribadian normatif yang harus dibangun dan atau diinternalisasikan terhadap pribadi bangsa Indonesia. Pandanga itu, bisa benar, jika memang kepribadian itu memiliki nilai praksis bagi bangsa ini.

Kedua, kelanjutan dari pandangan pertama tadi, sebuah ideologi akan eksis, manakala memiliki nilai praksis bagi bangsanya. Ideologi harus menjadi bagian penting dari pandangan hidup untuk memecahkan masalah bangsa dan negara Indonesia. Dengan kata lain, manakala sebuah ideologi tidak memiliki kemampuan praksis dalam memecahkan masalah, maka ideologi itu akan menjadi bagian penting dari penyebab kehancurannya

sebuah bangsa. Seperti yang dialami oleh Negara Uni Sovyet dipenghujung millenium II.

Ketiga, tidak kalah pentingnya lagi, sebuah ideologi akan menguat dan menjadi karakter sebuah bangsa, bila dipadukan dengan gerakan pembudayaan atau pemeradaban. Ideologi bangsa akan menguat dan memiliki nilai praksis, bila tercermin dalam kebijakan-kebijakan politik, baik dalam konteks pendidikan, politik, budaya maupun ekonomi.

Uni Sovyet sempat menjadi negara kuat dengan ideologi ekonomi sosialisme-komunisnya. Eropa dan Amerika Serikat kokoh dengan ideologi ekonomi demokrasi liberal atau kapitalismenya. Kemudian China, kendati ekonominya cenderung kapitalis namun mampu mengokohkan ideologi sosialis-komunis dalam konteks ekonomi demokrasi rakyat. Semua hal itu, merupakan bentuk nyata implementasi ideologi dalam kebijakan politik atau kebijakan pembangunan. Data itu menunjukkan bahwa kebijakan pembangunannya memiliki karakteristik atau bermuatan ideologi kebangsaan sebagaimana yang dianutnya. Bagaimana dengan Indonesia ?

Bangsa ini sempat memiliki konsep ekonomi Pancasila sebagaimana yang diusung oleh Mubyarto atau Sri Edi Swasono atau Emil Salim. Namun pendekar Ekonomi Pancasila ini, kurang mampu meyakinkan politisi muda Indonesia, sehingga ide-ide ini tertinggal dalam kertas akademik dan mulai banyak dilupakan. Padahal, saya merasa yakin bahwa ideologi bangsa kita tidak akan mampu membumi jika tidak dibumikan melalui kebijakan pembangunan, atau tidak tampak dalam kebijakan pembangunan.

Terakhir, dan ini menjadi penting bagi kita semua, pembumian Pancasila sebagai ideologi bangsa ini harus menjadi tanggungjawab seluruh komponen bangsa. Termasuk dunia pendidikan. Tanpa gerakan seperti ini, Pancasila akan mengalami kesulitan menjelma menjadi sebuah ideologi bangsa, disaat kepribadian bangsa ini telah menjelma menjadi mozaik kepribadian yang membaaur.

Mozak kepribadian atau kepribadian yang terbentuk dari susunan batu-bata kepribadian yang berbeda, kadang tidak beriringa dan berseiringan. Mozaik kepribadian bangsa kita ini, kepalanya berbentuk rasionalisme, emosi primitisme, hatinya cenderung spiritualisme, perutnya sudah konsumerisme kapitalis, tangannya determinisme (malas), sedangkan kakinya sudah pragmatisme. Mozaik ini tambah campur aduk, seiring dengan prosentase pendidikan nilainya yang berlaku pada lingkungan masing-masing.

Dalam konteks wacana inilah, tiga langkah tersebut merupakan ikhtiar minimal dalam membumikan Pancasila sebagai ideology bangsa dan Negara yang kita cintai ini.

Parlemen Transaksional

Sebelum pilpres, publik mendapat sajian akrobat politik dari elit partai. Ada kelompok yang dengan sengaja, membuka wajah politik koalisinya dengan transaksi kekuasaan. Mereka yang berkoalisi, seolah mendapatkan ruang-gerak politik yang leluasa dibandingkan dengan mereka yang tidak berkoalisi dalam menduduki posisi politik tertentu, kelak dikemudian hari jika kompetisi politik dimenangkan. Disamping itu, ada juga akrobat politik partai yang berkoalisi dengan wajah yang agak buram, dengan menyatakan diri tidak ada (tidak akan ada) transaksi politik dalam koalisi partainya.

Selepas pemilihan presiden, dan ini adalah pengulangan fenomena dalam siklus lima tahunan. Presiden dan Wapres terpilih, tidak cepat tanggap dalam menetapkan kabinet yang akan mendukung pemerintahannya. Media khususnya atau pengamat pada umumnya, kadang melihat Presiden dan Wapres terpilih lambat dalam mengambil keputusan pengumuman susunan kabinetnya sebagai bentuk dari diplomasi politik di internal partai yang intens dan kuat. Fenomena ini pun, kemudian ditengarai sebagai efek dari transaksi politik diinternal tim sukses atau partai koalisinya.

Politik transaksional. Itulah istilah yang muncul dalam mencermati fenomena yang terjadi saat itu. Walaupun sebutan itu relative menunjukkan sesuatu hal yang wajar, tetapi tetap memiliki karakter seksis dalam wacana-wacana kritis masalah perilaku politik di negeri ini. Membicarakan politik sudah tentu adalah membicarakan kekuasaan. Membicarakan interaksi kekuasaan, yang tiada lain adalah komunikasi kekuasaan antara

satu pihak dengan pihak lain. Inti dari komunikasi dan interaksi kekuasaan, tidak jauh dari masalah transaksi-kekuasaan itu sendiri. Loby, diplomasi, kunjungan, atau bentuk komunikasi lainnya adalah bentuk-bentuk nyata dari transaksi kekuasaan.

Hal yang menariknya, selepas pilpres, isu ini kemudian menguat. Koalisi Merah Putih (KMP) mampu menyabet posisi-posisi strategis di DPR dan MPR. Bahkan, UUMD₃ dan alat kelengkapan dewan dikuasanya. Ujung-ujungnya Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dibuatnya tidak hebat dalam perebutan posisi politik itu.

Perebutan kekuasaan dalam konteks legislative itu, selain argumentasi dan wacana, hal yang menonjol adalah pemilihan suara terbanyak. Metode ini digunakan dan sah diberlakukan dalam konteks pengambilan keputusan. Logika sederhananya, untuk memenangkan seluruh kompetisi politik di parlemen, pada dasarnya kelompok yang mayoritas tidak perlu berargumen. Sepanjang bisa solid untuk mengacungkan tangan dan menggunakan jari telunjuknya untuk mendukung atau menolak, maka permainan politik sudah selesai. Inilah yang saya sebut politik kuantitatif atau *jarikrasi*.

Politik kuantitatif, dengan ‘kekuasaan jari telunjuk’ (acungkan tangan untuk setuju dan tidak setuju), menjadi penyebab kelemahan dan kekalahan KIH. Kelompok mayoritas dengan menggunakan politik “jarikrasi” (baca : kekuasaan ada di jari telunjuk), mampu menyabet seluruh posisi strategis. KIH tidak berkutik, baik dalam membicarakan MD₃, maupun pemilihan pimpinan parlemen.

Mau tidak mau, public harus menyadari, disitulah yang disebut ‘kehebatan demokrasi’. Perjuangan politik tanpa harus

mengedepankan argumentasi, cukup dengan jari telunjuk, mampu diraih. Tetapi, fenomena serupa itu jugalah, yang potensial melahirkan anomali demokrasi, dengan lahirnya tirani mayoritas.

Dengan memanfaatkan pendekatan lain, KIH mewacanakan DPR tandingan. Mereka bergerak dan memainkan isu tandingan dihadapan media, sekalian mewacanakan adanya tindakan tirani mayoritas dan ketidakadilan di dalam parlemen, termasuk dalam pembahasan MD3. Ujungnya mereka mampu memenangkan wacana ini, dan KMP luntur serta kemudian mengajaknya untuk mendialogkan kembali perangkat kelengkapan Dewan.

Wacana ini tidak bermaksud untuk mengatakan, bahwa KIH mampu memainkan isu yang “hebat” dalam menekan KMP. Karena pada dasarnya, acrobat politik ini bisa juga diartikan sebagai kelegowoan kelompok KMP dalam menyelamatkan masa depan parlemen. Lebih jauhnya lagi, acrobat politik dengan memainkan parlemen tandingan pada dasarnya malah menunjukkan kuatnya fenomena transaksional dalam tubuh elit politik kita saat ini.

Dalam konteks penyelamatan parlemen dan masa depan Indonesia, rujuk politik itu, perlu diapresiasi secara positif. Karena wacana DPR tandingan, jika dilawan dengan politik kekerasan lagi, akan melahirkan suramnya masa depan Indonesia. Karena itu, dengan legowonya KMP dalam menghadapi DPR tandingan perlu diapresiasi positif dalam konteks penyelamatan parlemen. Tetapi, dibalik itu semua, kita melihatnya, akrobat politik yang dimainkan kedua kelompok itu termasuk dalam kategori permainan politik yang kasar, yang menyulut disintegrasi bangsa.

KMP menyulut kecemburuan kelompok minoritas. Tradisi tirani mayoritas adalah tradisi politik yang buruk untuk konteks masyarakat majemuk. Pendekatan KIH dengan DPR tandingan adalah wacana buruk, dan potensial memancing isu separatistis. Renungkan baik-baik, elit politik kita ini, kerap memanfaatkan pendekatan separatistis dalam meraih kekuasaannya. Tidak jadi ketua umum membuat partai baru, tidak diakomodir di parlemen, mengusulkan membuat parlemen baru. Tidak jadi pimpinan daerah, mewacana pemekaran daerah. Dan lain sebagainya. Itulah yang saya sebut, nalar separatistis yang mengedepankan prinsip, jika tidak diakomodir kita bikin partai baru !

Untuk masa depan Merah Putih yang Hebat, wacana tirani mayoritas atau pendekatan separatistis hendaknya dihindari jauh-jauh. Karena itu pula, hasrat untuk rujuk antara KMP dan KIH, patut untuk dihargai, walaupun kemudian wajah ini, mengarah pada drama atau wajah politik transaksional di parlemen transaksional.

Ketika Pemerintah di-TKO

Bila realitas politik diartikan sebagai sebuah panggung kompetisi kekuasaan, saya khawatir kesimpulan ini menjadi kenyataan. Pemerintah mengalami beberapa kali TKO (*technical knock out*) dalam kompetisi ini. Betapa tidak dikatakan sebagai kelompok yang TKO, bila dalam beberapa pertandingan tidak mampu hadir secara nyata, hadir secara penu, dan mampu memenangkan kompetisi politik di tengah masyarakatnya sendiri. Pemerintah kadang, hanya mampu bertanding dalam beberapa waktu, dan kemudian tidak mampu mengakhirinya dengan kemenangan gemilang.

Kasus Ahmadiyah, baik di Cikeusik maupun Temanggung, merupakan kasus pengulangan dari sejumlah kejadian yang telah berlalu sebelumnya. Kasus ini muncul ke permukaan, dengan intensitas masalah yang tidak kalah buruk dibandingkan kejadian sebelumnya. Perusakan fisik yang disertai kekerasan social terus terjadi. Hal yang unik, ternyata Pemerintah tidak mampu berbuat banyak dalam menyelesaikan masalah ini. Pemerintah, seolah kehilangan akal dalam memecahkan tarikan kepentingan dalam menghadapi masalah Ahmadiyah di Indonesia. Ini adalah contoh TKO-nya Pemerintah dihadapan kompetisi politik.

Kasus yang sekarang sedang ramai dibicarakan, yaitu PSSI, pun Pemerintah menjadi kelompok yang TKO. Mau tidak mau, PSSI dengan Nurdin Halid cs, sebagai nakhodanya telah mampu mendirikanb “Negara di dalam Negara”. PSSI dengan dalih statute FIFA-nya, mampu mengelak dari sebuah opini politik Negara. PSSI begitu yakin untuk tetap menganut pada ajaran FIFA

daripada mengedepankan aspirasi politik rakyat dan bangsa Indonesia.

Dalam kasus PSSI ini, saya melihat (a) Negara tidak hadir, (b) PSSI lebih bangga dengan pengacuan pada FIFA daripada kepentingan Negara, dan (c) orientasi politik global jauh lebih dikedepankan daripada kepentingan politik local. Semua itu, memberikan petunjuk, mengenai ketidakhadiran Negara dalam penyelenggaraan Negara. PSSI merupakan Negara didalam Negara. PSSI adalah Negara di luar Indonesia.

Sebelum ini terjadi, public sempat membicarakan masalah tarik ulurnya pemain muda belia potensial yang tidak masuk pada Timnas Indonesia. Irfan Bachdim, adalah subjek pembicaraan waktu itu. Karena Irfan masuk dalam salah satu Tim LPI (Liga Primer Indonesia), oleh PSSI di coret dari calon Timnas Indonesia. Alasan utama PSSI, yaitu karena Irfan masuk dalam Tim yang ikut dalam kompetisi yang tidak diakui oleh PSSI. Maka, nasib Irfan pun kandas, dan tidak bisa masuk ke skuad Timnas Indonesia.

Di lain pihak, Pemerintah SBY, melalui lisannya Menpora Andi Malarangeng memberikan jaminan, bahwa Irfan Bachdim bisa masuk ke dalam Timnas Indonesia. Seolah memberi jaminan, bagi pemain naturalisasi berbakat ini. Namun pada kenyataannya, kekuasaan PSSI jauh lebih besar dibandingkan dengan Menpora, atau Pemerintah SBY-Boediono itu sendiri. Di sinilah, saya menyebut, Pemerintah SBY-Boediono pun tidak hadir, dan sulit bisa hadir di PSSI. Pemerintah pun TKO dihadapan PSSI.

Kejadian yang paling meyakinkan, adalah kejadian yang dipertontonkan oleh Gayus. Secara retorik, Pemerintahan SBY-Boediono menyatakan perang terhadap mafia. Namun, berkali-

kali, Gayus mampu pelesiran tanpa hambatan. Macao, Bali dan Singapura adalah tempat-tempat yang dijadikannya sebagai tujuan wisatanya. Gayus yang actor utama dalam drama pelesiran tersebut, mampu memainkan skenarionya sendiri, di atas agenda pemerintah yang berhendak untuk menghapus mafia pajak.

Sekali lagi, pada kasus Gayus pun, Pemerintah tidak bisa hadir dalam kompetisinya dengan mafia hokum. Mafia hokum di Indonesia, masih bisa berjalan dengan baik, dan mengabaikan retorika politik Pemerintah. Pemerintahan SBY-Boediono pun TKO dihadapannya.

Ada satu lagi yang perlu dikemukakan di sini. Yaitu peristiwa gerakan moral yang dilakukan oleh Kelompok Agamawan. Gerakan moral dari Kelompok Agamawan itu, dilihat dari kacamata kita ini, dapat disebut sebagai salah satu pukulan telak terhadap Pemerintah. Walaupun masih mampu memberikan perlawanan politik terhadapnya, namun Pemerintah sempat TKO dibuatnya. Pemerintah, sempat kalang kabut untuk menangkis serangan moral dari kelompok Agamawan mengenai kebohongan public yang dilakukan Pemerintah.

Dalam kaitan ini, kita memang tidak menutup mata. Pemerintah SBY-Boediono telah mampu menorehkan keberhasilannya dalam program lain. Setidaknya, argumentasi ini sempat dikemukakan Pemerintah saat merespon teriakan kelompok Agamawan Indonesia yang mensinyalir Pemerintah telah berbohong. Tetapi, saya memandang, indikasi adanya kompetisi politik yang menyebabkan pemerintah TKO, akan sulit dihindari bila Pemerintah tidak bisa hadir dalam proses politik itu. Pemerintah harus hadir, dan mampu menunjukkan eksistensi dirinya. Sebab

bila tidak demikian, alih-alih bisa menghindar dari TKO,
Pemerintah malah KO !

PEMERINTAHAN BERBIAYA MAHAL

Mungkinkah kita bisa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif ? pertanyaan ini, terasa perlu dikemukakan, dan bahkan sejatinya harus menjadi panduan siapapun yang duduk di kursi kekuasaan. Untuk mempercepat pewujudan kesejahteraan rakyat, maka penyelenggaraan pemerintahan yang efisiensi dan efektif, menjadi sarat pertama dan utama untuk dilakukan. Pada tingkat pemerintahan manapun. Baik Pusat maupun Daerah. Kita perlu dan butuh model penyelenggaraan pemerintahan yang berbiaya murah.

Sayangnya, dan walau ini pahit untuk dikemukakan, tetapi memang harus dikemukakan bahwa kita masih melihat gejala penyelenggaraan yang kurang menguntungkan bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Kita masih melihat pemerintah menampilkan perilaku penyelenggaraan Negara yang lebih banyak menyedot ongkos social dan ongkos politik yang tinggi dari pada efisiensi penyelenggaraan negara.

Untuk sekedar contoh. Dalam satu bulan terakhir. Bursa Ketua Umum PSSI, menyita hampir banyak pihak penyelenggara negara. Pejabat olahraga, pejabat Negara, penggiat bola, penggiat media, pengamat, jurnalis, mahasiswa, dan masyarakat. semuanya turut bicara mengenai bursa ketua Umum PSSI. Sementara Pemerintah, masih duduk indah di kursi kekuasaan.

Biarkan mekanisme demokrasi yang menentukan nasib masa depan PSSI. Itulah dalil utama yang dianut pemerintah. Biarkan 'pasar-demokrasi' yang akan memberikan vonis akhir terhadap kelanjutan PSSI. Namun, adakah sensitivitas kita lahir dengan

mengajukan pertanyaan, efisienkah proses demokratisasi yang sedang berkembang di tubuh PSSI saat ini ?

Saya melihat, pembiaran dari Pemerintah terhadap model proses politik seperti itu, adalah hanya mendukung pada terciptanya proses politik yang berbiaya mahal. Untuk sekedar satu kursi ketua umum PSSI, Negara ini harus mengeluarkan biaya social, biaya politik, dan ongkos ekonomi yang tidak sedikit jumlahnya. Dan semua biaya tersebut, harus dikeluarkan oleh rakyat Indonesia pada umumnya.

Kejadian itu, hanya satu kasus. Kita bisa menemukan beberapa kasus lain yang juga memberikan indikasi adanya penyelenggaraan pemerintahan yang berbiaya mahal. Untuk melakukan analisis terhadap hal itu, setidaknya kita dapat merinci beberapa persoalan penting yang ada kaitannya dengan masalah penyelenggaraan berbiaya mahal.

Pertama, tidak berjalannya roda demokrasi. Demokrasi lebih banyak diartikan secara procedural-formal, dan bukan esensial. Akibat dari pemahaman dan kesadaran seperti ini, biaya politik dan ongkos social lebih banyak dikorbankan sebagai ‘pemanis’ retorika politik dibandingkan dengan upaya penghidupan semangat demokrasi. Karena, proses demokrasi yang dilakukan sekedar memenuhi sarat-sarat procedural semata. Gejala seperti ini, mirip dengan kasus yang terjadi di zaman Orde Baru. Pemilihan Umum belum terjadi, tetapi setiap orang sudah tahu siapa akan menjadi apa. Hal itu, tak jauh berbeda dengan apa yang sedang terjadi di tubuh PSSI.

Akibat lanjutan dari masalah pertama, yaitu berdampak pada lahirnya gerakan social yang mendukung upaya peneggakkan

demokrasi secara substantive. Akhir dari semua ini, perang antara aliran esensialisme demokrasi dan procedural demokrasi, melahirkan konflik horizontal yang meluas. Gerakan social di berbagai daerah, seperti yang terjadi pada kasus PSSI atau hasil-hasil Pilkada, merupakan bentuk akhir dari biaya politik dan biaya social yang mahal untuk sebuah proses demokrasi.

Kedua, tidak berjalannya moralitas berorganisasi. Penyelenggaraan organisasi, baik dalam pengertian organisasi politik maupun organisasi social kemasyarakatan lainnya, termasuk di PSSI, ongkos social yang besar terjadi karena hilangnya moralitas berorganisasi. Karena persoalan kekalahan dalam kompetisi politik, kemudian menyusulkannya dengan gerakan massa. Akibat dari itu semua, maka lahirlah kekacauan organisasi.

Dalam hemat saya, walaubagaimanapun juga, penggunaan gerakan massa dalam mewujudkan tujuan politik, merupakan bentuk ongkos politik termahal. Harusnya adalah langkah terakhir, dan bukan menjadi kebiasaan rutin. Sebab, bila gerakan massa menjadi kebiasaan, maka biaya demokrasi di negeri ini, terbilang sebagai biaya politik yang mahal.

Ketiga, penyelenggaraan Negara berbiaya mahal terjadi karena Pemerintah tidak mampu untuk hadir dalam proses pemerintahan Negara. Negara selalu absen di tengah masyarakat. Kasus Bibit-Chandra, Kasus Century, Konflik SARA, Konflik PSSI, dan masalah Angket Mafia Pajak, merupakan masalah-masalah Negara yang terselesaikan dalam waktu yang sangat lama dan mahal. Bukan saja, secara ekonomi (ongkos rapat dan pelaksanaan) tetapi juga menyebabkan ongkos social dari proses demokrasi yang teramat mahal.

Terakhir, penyelenggaraan tidak efisien karena diemban oleh elit politik yang tidak cerdas dalam menjalankan tugas. Rakyat kerap kali melihat, Pemerintah banyak mendirikan organisasi atau kelompok kerja, baik di parlemen maupun dieksekutif. Istilahnya pun beragam, ada satgas, ada Pansus, komnas, ada Tim Khusus, dan lain sebagainya. Semua lembaga itu sudah pasti menyedot biaya Negara. Namun, lagi-lagi kita melihat bahwa hasil investigasi dari tim-tim tersebut, seperti satgas mafia pajak, Pansus Century, kandas tak berbekas padahal sudah menghabiskan biaya Negara milyaran rupiah (hampir 5 M).

Terkait dengan semua hal itu, pertanyaan di awal wacana ini perlu dikemukakan kembali, mungkinkah kita menciptakan penyelenggaraan yang efisien ?

Untuk sampai pada jawaban yang positif terhadap masalah ini, saya melihat bahwa Pemerintah Pusat, khususnya SBY, hendaknya mampu mengambil posisi cepat tanggap, dalam membaca realitas. Kemampuan seperti ini, tampaknya hanya bisa dilakukan, bila SBY-Boediono memiliki keberanian untuk membaca realitas dan berkemampuan untuk menemukan permasalahan secara tepat. Sedangkan, bila Pemerintah tetap menggunakan dalil pembiaran terhadap mekanisme-pasar-demokrasi itu sendiri, maka mekanisme-pasar-demokrasi di negeri yang belum matang berdemokrasi, hanya melihat aborsi demokrasi dan pelacuran demokrasi.

Reformasi Sistem Rekrutasi PNS

Menjelang bulan September-Oktober, kalangan muda Indonesia dan/atau pencari kerja sudah mulai membelalakan mata dan membuka telinga mengintai pengumuman pembukaan rekrutmen pegawai negeri. Tidak terkecuali, bagi masyarakat Jawa Barat. Entah dari mana awalnya, banyak kalangan dari berbagai pihak mencoba mencari informasi mengenai pengumuman penerimaan PNS. Siapapun kita, barangkali memiliki anak, adik, atau saudara yang masih berminat menjadi pegawai negeri, kita akan berusaha untuk menemukan informasi lowongan kerja tersebut.

Namun demikian, akankah ada pihak yang merasa sakit hati bila ada pembukaan lowongan kerja dari instansi pemerintah ? pertanyaan ini memang paradoks. Ketika sebagian besar orang merasa bangga dengan adanya pengumuman lowongan kerja, mereka yang merasa sudah terikat dengan Depag ini merasakan hal seperti ini. Bagi kebanyakan pihak, dengan adanya pengumuman saja, sudah bangga walau belum tentu diterima. Dengan tercantumnya nama dalam daftar peserta ujian PNS saja mereka sudah bangga, walau belum tentu diterima sebagai PNS. Namun hal ini, jauh berbeda dengan sejumlah “CPNS” yang ada di lingkungan Departemen Agama.

Sebagaimana yang dimaklumi bersama, HU *Pikiran Rakyat* (6/7/09), memberikan informasi bahwa terdapat masalah yang terkait dengan penanganan guru honorer Departemen Agama (Depag) di Kabupaten Majalengka. Kendati jumlahnya tidak diketahui, namun CPNS yang telah dinyatakan lulus pada seleksi

tahun 2005 – 2008, masih ada yang belum mendapat kepastian nasib. Mereka terkatung-katung antara status sebagai honorer dan status “CPNS”. SK yang mereka nantikan, tidak pernah kunjung tiba. Masalah yang dialami sejumlah CPNS ini, mendapat pembenaran dari pihak aparat di lingkungan Depag Kabupaten Majalengka. Sayangnya, pemberitaan itu belum mendapat respon yang memadai bagi para penanti di lapangan.

Hal ini menarik atau malah menambah keprihatinan, karena kejadian ini pun terjadi pula di Kota Bandung. Sebuah kota yang dianggap sebagai pusat administrasi di Jawa Barat, dan dekat dengan kekuasaan, namun ternyata memiliki masalah yang tidak jauh krusialnya dengan rekan-rekan honorer Departemen Agama di daerah. Informasi yang ada saat ini, yaitu masih terdapat sejumlah honorer yang sudah 5 (lima) tahun menanti kepastian hukum status kepegawaiannya, yang sampai saat ini belum juga ada kejelasan atau belum ada berita yang menggembirakan.

Realitas ini bukanlah sebuah anomaly. Atau andai disebut anomaly pun, hendaknya perlu segera ada perhatian dari pihak Pemerintah, khususnya Departemen Agama dan pihak Menteri Aparatur Negara (MENPAN), dalam proses seleksi pegawai negeri, khususnya di lingkungan Departemen Agama. Terlebih lagi, bila dikaitkan dengan agenda tahunan Pemerintah dalam membuka lowongan kerja di lingkungan instansi pemerintah yang biasanya muncul pada bulan September – Oktober.

Sebelum hal ini terjadi, jauh hari kami harus menyampaikan, sebuah aspirasi dari dari kelompok yang sampai saat ini masih belum didengar oleh Pemerintah, khususnya yang ada di lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia. Tidak masalah, bila analisis ini, diposisikan sebagai sebuah surat terbuka

bagi Menteri Agama Republik Indonesia. Bahkan, mungkin hal itu akan lebih baik bagi penyelesaian masalah ini. Bagi sebagian orang, menyampaikan analisis atau bicara langsung ke pejabat seperti ini, masih merupakan sebuah hal yang menakutkan, terlebih lagi setelah ada kasus Prita yang berhadapan langsung dengan pengadilan setelah dirinya curhat mengenai ketidakadilan pelayanan kesehatan yang diterimanya. Namun, bila hal ini tidak disampaikan, maka aspirasi publik ini akan terus mengendap dalam kurungan ketidakpastian dan kurang mendapat perhatian yang seksama dari pemerintah. Oleh karena itu, sebelum terlambat, dan sebelum pemerintah membuka lowongan kerja untuk tahun ini, tepat kiranya bila hal ini disampaikan saat ini.

Pertama, pihak departemen harus melakukan klarifikasi dan penjelasan terhadap mereka yang pernah mendapat pengumuman resmi dari departemen mengenai status kelulusannya dalam seleksi CPNS. Ini penting. Karena, penantian mereka selama ini terkait erat dengan penunaian kewajiban dari pihak Pemerintah. Keterlambatan dalam penanganan ini, bukan saja menunjukkan ketidakprofesionalan dalam penanganan calon pegawai di lingkungan instansi pemerintah, namun dapat mengganggu psikologi CPNS itu sendiri.

Sebagaimana diketahui, bila seseorang mendaftar pada usia 35 tahun dan kemudian harus menanti SK selama 5 tahun, berarti dia sudah kehilangan kesempatan dan kesejahteraannya selama 5 tahun. Terlebih lagi, diantara mereka yang ada sudah berusia di atas 40 tahun. Oleh karena itu, semakin lama penantian yang mereka jalani, menyebabkan tidak sehatnya bagi regenerasi pegawai di lingkungan instansi pemerintah dimaksud.

Kedua, sebelum terlambat –terkait dengan penerimaan pegawai baru pada tahun ini, kita berharap Pemerintah tidak membuka pendaftaran pegawai baru sebelum masalah ini terselesaikan. Kebutuhan penyelesaian masalah ini, lebih terkait dengan kebutuhan kita dalam membangun sistem perekrutan pegawai secara bersih dan berwibawa, serta berkeadilan.

Sepakat dengan Kasubah TU Depag Majalengka, bahwa hal ini perlu ditelaah mengenai masalah utama yang menjadi penghambat turunnya SK pegawai yang telah lama lulus di lingkungan Depag ini. Namun hal yang lebih strategi dari itu, yaitu jangan dulu membuka lowongan baru sebelum ada kepastian pada kelompok-kelompok tersebut. Karena bila hal ini tidak terselesaikan, potensial melahirkan analisis dan atau interpretasi yang kurang sehat terhadap pola dan system rekrutasi pegawai di lingkungan Depag.

Ketiga, kebutuhan melakukan pembenaharan dalam penataan sistem rekrutmen pegawai ini, erat kaitannya dengan agenda reformasi birokrasi. Saya meyakini, bila rekrutmen yang bersih, dapat menghasilkan calon pegawai yang bersih. Calon pegawai yang bersih potensial memberikan kontribusi nyata dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, pembenahan system penerimaan pegawai, sangat relevan dan strategis dalam menjaga kelangsungan kita dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Terkait dengan hari kemerdekaan Indonesia tahun ini, kiranya tidak ada salahnya, bila kita mengatakan bahwa pelayanan prima pemerintah terhadap rakyat, merupakan bentuk nyata dari usaha kemerdekaan terhadap ketidakberdayaan rakyat. Pemerintah yang cerdas dalam melayani rakyat, adalah pemerintah yang

memerdekakan rakyatnya sendiri. Pemerintah yang memberikan pelayanan yang prima kepada rakyat, adalah pemerintah yang memahami substansi kemerdekaan bangsa dihadapan rakyatnya sendiri. Karena sesungguhnya, kalau kita renungkan dengan sebaik-baiknya, kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan di masa lalu adalah usaha seksama para pahlawan dalam upaya pembebasan rakyat dari tindakan sewenang-wenang para penguasa saat itu !